



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2022

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



ditjenperkeretaapian



ditjenperkeretaapian



djka.dephub.go.id



@perkeretaapian

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan alat bantu untuk mendorong tercapainya institusi pemerintah yang *Good Government*.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun laporan penyelenggaraan SPIP tahun 2022. Laporan Penyelenggaraan SPIP ini mencakup lingkungan pengendalian unit kerja yang terdiri dari daftar kelemahan dan rencana tindak perbaikan, serta penilaian risiko oleh masing-masing pemilik risiko yang terdiri dari daftar risiko, peta risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) serta pemantauan RTP. Selain itu pada laporan penyelenggaraan SPIP juga mencakup hasil pelaksanaan penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP serta rencana aksi *Area Of Improvement* (AOI) sebagaimana hasil penilaian maturitas SPIP tahun 2022 tersebut.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022.

Jakarta, 2022

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, SE, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621005 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 TUJUAN PELAPORAN.....	3
1.4 RUANG LINGKUP	3
1.5 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	4
BAB 2 PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNIT KERJA.....	6
2.2 PENILAIAN RISIKO.....	20
2.3 KEGIATAN PENGENDALIAN.....	26
2.4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI	27
2.5 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN.....	27
BAB 3 PENILAIAN MATURITAS SPIP	29
3.1 PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI.....	29
3.1 HASIL PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS	31
3.2 RENCANA AKSI AREA OF IMPROVEMENT	33
BAB 4 PENUTUP.....	40
4.1 KESIMPULAN	40
4.2 RENCANA PENGEMBANGAN.....	41
4.3 SARAN	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Hasil Rekapitulasi Kuisisioner CEE	8
Tabel 2-2	Hasil Penilaian terhadap Lingkungan Pengendalian	16
Tabel 2-3	Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan	17
Tabel 2-4	Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilakukan Penilaian Resiko	20
Tabel 2-5	Rekapitulasi Jumlah Identifikasi Resiko	23
Tabel 2-6	Rekapitulasi Identifikasi dan Analisis Risiko	24
Tabel 2-7	Rekapitulasi Rencana Tindak Pengendalian	25
Tabel 2-8	Rekapitulasi Pemantauan Tindak Pengendalian	26
Tabel 2-9	Rekapitulasi Pemantauan Perbaikan Informasi dan Komunikasi	27
Tabel 2-10	Rekapitulasi Perbaikan Pemantauan Pengendalian Intern	28
Tabel 3-1	Komponen, Unsur dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	30
Tabel 3-2	Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022	31
Tabel 3-3	Rincian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5
Gambar 2-1 Implementasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022.....	7
Gambar 3-1 <i>Framework</i> Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi Pemerintah, baik instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberi arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil namun hingga kepada masing-masing individu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan SPIP mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan penilaian efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, analisa risiko, merancang rencana perbaikan kegiatan pengendalian, rencana perbaikan informasi dan komunikasi serta rencana perbaikan pemantauannya.

Selain itu, setiap penyelenggara SPIP di unit kerja wajib menyusun, mencatat, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada unit kerja Eselon I terkait. Laporan penyelenggaraan SPIP yang disusun setiap tahun berisi rencana pelaksanaan seluruh unsur SPIP yang mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam kurun waktu satu tahun.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
10. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 205 tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/3/19/DJKA/2022 tentang Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Resiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.3 TUJUAN PELAPORAN

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai untuk mendeteksi dan mencegah adanya risiko yang akan menghambat dalam proses pencapaian tujuan serta untuk meminimalisasi risiko dan mengurangi dampak agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi:

1. Penilaian risiko dalam melaksanakan program/kegiatan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk tata cara pengendalian resiko yang diidentifikasi;
2. Tersedianya informasi apabila terdapat permasalahan dalam pencapaian target dan tujuan kegiatan sehingga dapat dilakukan upaya penyelesaian permasalahan agar hasil yang dicapai dapat optimal;
3. Mendorong pelaksanaan pengawasan *intern* lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang lebih optimal sehingga setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel dalam pencapaian target dan tujuan kegiatan;
4. Mewujudkan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian unit kerja;
2. Penilaian resiko mencakup Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Laporan Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 juga dilengkapi dengan hasil pelaksanaan penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP dengan juga diuraikan rencana aksi *Area Of Improvement* (AOI) sebagaimana hasil penilaian maturitas SPIP tersebut.

1.5 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggungjawab terhadap koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan adiminstrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evauasi dan pelaporan kinerja serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan

4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan unit struktural yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum yang masing-masing Bagian didukung dengan kelompok fungsional tertentu.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

BAB 2 PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNIT KERJA

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan dan kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan pengendalian yang baik dan kondusif mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan instansi Pemerintah.

Lingkungan pengendalian merupakan tahapan awal dalam penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dan penyusunan rencana tindak perbaikan. Pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai mewujudkan lingkungan pengendalian dengan komitmen bersama dalam terselenggaranya unsur-unsur SPIP

di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Implementasi Penyelenggaraan SPIP tahun 2022 telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan unit eselon III serta pejabat struktural/fungsional tertentu pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar 2-1 Implementasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022

2.1.1 Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022, telah dilakukan langkah-langkah strategis meliputi identifikasi kondisi lingkungan pengendalian serta inventaris hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas pengendalian *intern* dalam tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Survey persepsi melalui pengisian kuesioner *Survey Control Environment Evaluation* (CEE) kepada seluruh pejabat struktural dan perwakilan fungsional di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 65 responden dari total 121 orang pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Melakukan penilaian/*skoring* terhadap pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian;
3. Merumuskan rencana tindak perbaikan untuk lingkungan pengendalian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh

pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil rekapitulasi kuisioner CEE disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Hasil Rekapitulasi Kuisioner CEE

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
				1	2	3	4	Σ	
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	1	Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	Memadai	4	1	3	30	31	65
	2	Telah ada aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)	Cukup Memadai	3	2	0	45	18	65
	3	Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	Cukup Memadai	3	0	2	41	22	65
	4	Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	Kurang Memadai	2	3	26	22	14	65
	5	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	Cukup Memadai	3	0	17	41	7	65
	6	Dokumen pernyataan aturan perilaku telah disampaikan kepada seluruh pegawai	Cukup Memadai	3	0	11	41	13	65
	7	Dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari	Cukup Memadai	3	8	20	37	0	65
	8	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	Cukup Memadai	3	12	20	33	0	65
	9	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) telah menginformasikan	Cukup Memadai	3	10	18	37	0	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER						
				1	2	3	4	Σ		
		pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai								
	10	Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan perilaku	Memadai	4	3	12	21	29	65	
	11	Pernyataan aturan perilaku telah dibaca oleh semua pegawai	Cukup Memadai	3	0	12	29	24	65	
	12	Pernyataan aturan perilaku telah dipahami oleh semua pegawai	Cukup Memadai	3	0	12	34	19	65	
	13	Pimpinan telah memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku	Cukup Memadai	3	0	16	30	19	65	
	14	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku	Cukup Memadai	3	1	6	37	21	65	
	15	Pimpinan instansi telah mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan perilaku di instansi	Cukup Memadai	3	0	7	37	21	65	
	16	Pelanggaran aturan perilaku telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Cukup Memadai	3	0	15	25	25	65	
	17	Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku telah dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen	Memadai	4	2	6	15	42	65	
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	18	Instansi telah memiliki strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	Memadai	4	1	4	27	33	65
		19	SDM yang memadai telah tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	Cukup Memadai	3	0	9	41	15	65
		20	Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi telah didefinisikan	Cukup Memadai	3	0	7	38	20	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
				1	2	3	4	Σ	
		secara tepat.							
	21	Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut	Cukup Memadai	3	1	13	43	8	65
	22	Pimpinan di Instansi saudara telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja	Cukup Memadai	3	0	4	40	21	65
	23	Kompetensi SDM telah dipantau secara efektif	Cukup Memadai	3	0	14	39	12	65
	24	Telah terdapat perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya	Cukup Memadai	3	6	4	31	24	65
	25	Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	Cukup Memadai	3	1	14	27	23	65
	26	Instansi telah memiliki rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting	Cukup Memadai	3	5	9	28	23	65
	27	Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik	Cukup Memadai	3	1	7	43	14	65
	28	Assessment/penilaian kompetensi dari pegawai yang menduduki posisi penting telah dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap	Cukup Memadai	3	0	10	45	10	65
	29	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah dilakukan secara periodik	Cukup Memadai	3	0	16	35	14	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN		JAWABAN KUESIONER					
					1	2	3	4	Σ	
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	30	Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	0	2	46	17	65
		31	Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat	Cukup Memadai	3	0	2	42	21	65
		32	Gaya dan tone (aura) kepemimpinan yang kondusif telah dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi	Cukup Memadai	3	0	3	45	17	65
		33	Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan pengendalian (SPIP).	Cukup Memadai	3	0	1	44	20	65
		34	Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan pengendalian dalam setiap kegiatan organisasi	Cukup Memadai	3	0	1	47	17	65
		35	Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait	Cukup Memadai	3	0	1	50	14	65
		36	Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern	Cukup Memadai	3	0	2	45	18	65
D.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	37	Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya	Cukup Memadai	3	0	2	53	10	65
		38	Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu	Cukup Memadai	3	0	0	48	17	65
		39	Risiko yang muncul dari struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan	Cukup Memadai	3	0	0	52	13	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER						
				1	2	3	4	Σ		
		instansi								
	40	Struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian	Cukup Memadai	3	0	1	54	10	65	
	41	Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai	Cukup Memadai	3	0	1	50	14	65	
	42	Uraian tugas untuk masing-masing pejabat kunci/ penting telah ditetapkan dan dimutakhirkan	Cukup Memadai	3	0	1	52	12	65	
	43	Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala	Cukup Memadai	3	0	6	45	14	65	
E.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	44	Pimpinan telah melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait pengendalian	Cukup Memadai	3	1	8	42	14	65
		45	Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan telah secara rutin membahas efektivitas penyelenggaraan pengendalian	Cukup Memadai	3	0	3	44	18	65
		46	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal	Cukup Memadai	3	0	0	51	14	65
		47	Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat	Cukup Memadai	3	0	2	52	11	65
		48	Pejabat kunci/ penting (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya	Cukup Memadai	3	0	0	54	11	65
		49	Kewenangan telah direviu dan dimutakhirkan secara periodik	Cukup Memadai	3	0	5	50	10	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER						
				1	2	3	4	Σ		
	50	Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai	Cukup Memadai	3	0	3	51	11	65	
	51	Batasan kewenangan telah diverifikasi dan diuji	Cukup Memadai	3	1	12	45	7	65	
	52	Proses dan tingkatan otorisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Cukup Memadai	3	0	8	42	15	65	
F.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	53	Instansi telah mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	Kurang Memadai	2	11	54	0	0	65
		54	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah didokumentasikan secara formal	Cukup Memadai	3	10	5	35	15	65
		55	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	Cukup Memadai	3	10	9	30	16	65
		56	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dipahami oleh seluruh pegawai	Cukup Memadai	3	10	11	36	8	65
		57	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Cukup Memadai	3	9	6	32	18	65
		58	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah dimutakhirkan sesuai kebutuhan	Cukup Memadai	3	8	9	34	14	65
		59	Pimpinan telah menetapkan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan	Cukup Memadai	3	0	5	41	19	65
		60	Pimpinan telah menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik	Cukup Memadai	3	1	11	41	12	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN		JAWABAN KUESIONER				
					1	2	3	4	Σ
	61	Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya	Cukup Memadai	3	0	4	47	14	65
	62	Instansi telah menempatkan SDM pada posisi kunci/ penting melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC)	Cukup Memadai	3	0	6	41	18	65
	63	Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis)	Cukup Memadai	3	0	5	47	13	65
	64	Setiap pegawai telah mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan	Cukup Memadai	3	2	8	34	21	65
	65	Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran akan pengendalian	Cukup Memadai	3	0	3	44	18	65
	66	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Cukup Memadai	3	0	1	54	10	65
	67	Instansi telah mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan kemampuan individu (inter personal skill)	Cukup Memadai	3	0	9	42	14	65
	68	Instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) yang didokumentasikan	Kurang Memadai	2	8	57	0	0	65
	69	Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) tersebut telah diterapkan sesuai ketentuan	Cukup Memadai	3	2	11	36	16	65
	70	Instansi telah memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan produktivitas pegawai/unit kerja	Cukup Memadai	3	4	15	36	10	65

SUB UNSUR	NO.	PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN		JAWABAN KUESIONER					
					1	2	3	4	Σ	
G.	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	71	APIP telah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik	Cukup Memadai	3	0	4	36	25	65
		72	APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	0	0	46	19	65
		73	APIP telah berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan pengendalian di instansi	Cukup Memadai	3	0	6	40	19	65
		74	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Cukup Memadai	3	0	4	39	22	65
		75	APIP telah melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik	Cukup Memadai	3	0	4	35	26	65
		76	APIP telah melakukan pengujian keuangan secara periodik	Cukup Memadai	3	0	5	37	23	65
		77	APIP telah melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik	Cukup Memadai	3	0	5	37	23	65
		78	APIP telah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Cukup Memadai	3	0	6	39	20	65
		79	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Cukup Memadai	3	0	6	37	22	65
H.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	80	Pimpinan instansi telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional	Cukup Memadai	3	0	1	39	25	65
		81	Pimpinan instansi telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)	Cukup Memadai	3	0	0	34	31	65

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dan penilaian terhadap 8 sub unsur lingkungan pengendalian telah diidentifikasi area-area lingkungan pengendalian yang masih lemah dan membutuhkan penguatan dan perbaikan lebih lanjut. Lingkungan pengendalian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang masih terdapat kelemahan yaitu pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika serta Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan SDM, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2-2 Hasil Penilaian terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Uraian/Sub Unsur	Kondisi	Penanggung Jawab
Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian SDM dan Umum
Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Instansi belum mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang memadai	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian SDM dan Umum
2	Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) yang didokumentasikan	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian SDM dan Umum • Kepala Bagian Perencanaan

2.1.2 Rencana Tindak Perbaikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan pengisian kuisioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan 65 responden pegawai dari masing-masing Bagian dan melakukan penilaian terhadap 8 sub unsur lingkungan pengendalian untuk identifikasi area-area lingkungan pengendalian yang masih terdapat kelemahan dan membutuhkan penguatan serta perbaikan lebih lanjut.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan pada Rencana Tindak Perbaikan terhadap kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki. Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-3 Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan

No	UNSUR / KELEMAHAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
A	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	<p>Pengoptimalan penggunaan termasuk sosialisasi aplikasi AP2KP dan e-lapkin sebagai sistem penilaian kinerja individu pegawai di seluruh unit kerja yang terhubung dengan pemberian tunjangan kinerja pegawai mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 91 tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan. 2) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 	✓	Kepala Bagian SDM dan Umum	Maret – Desember 2022
B	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia				
1.	Instansi belum memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang memadai	<p>a. Untuk menambah pemahaman berkelanjutan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM, diperlukan sosialisasi secara berkala diantaranya terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PP nomor 11 tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2) PM nomor 99 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 3) PM nomor 91 tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan; 	✓	Kepala Bagian SDM dan Umum	Maret – Desember 2022

No	UNSUR / KELEMAHAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
		<p>4) KM nomor 82 tahun 2020 tentang Peta jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.</p> <p>5) Peraturan lainnya termasuk SOP terkait kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.</p> <p>Pada saat sosialisasi perlu dilaksanakan <i>pre test</i> dan <i>post test</i> guna mengukur tingkat pemahaman peserta terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM.</p>			
		<p>b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur SDM melalui rapat koordinasi setiap tahun termasuk dengan Setjen Kemenhub/Biro Kepegawaian guna memantau pemahaman dan implementasi kebijakan dan prosedur SDM di seluruh unit kerja yang kemudian dapat dijadikan acuan/pedoman untuk usulan perubahan/revisi untuk melengkapi kebijakan dan prosedur yang telah ada, termasuk petunjuk teknis terkait penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.</p>	✓	Kepala Bagian SDM dan Umum	Juli – September 2022
2.	Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) yang didokumentasikan	<p>a. Pengoptimalan penggunaan termasuk sosialisasi aplikasi AP2KP dan e-lapkin sebagai sistem penilaian kinerja individu pegawai di seluruh unit kerja yang terhubung dengan pemberian tunjangan kinerja pegawai mengacu pada:</p> <p>1) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 91 tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan.</p>	✓	Kepala Bagian SDM dan Umum	Maret – Desember 2022

No	UNSUR / KELEMAHAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
		2) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.			
		b. Pemberian tanda penghargaan Satya Lencana kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih	✓	Kepala Bagian SDM dan Umum	Maret – Desember 2022
		c. Pemberian penghargaan (<i>reward</i>) terkait pencapaian kinerja dan kepatuhan pelaporan secara rutin dan terdokumentasi kepada unit kerja yang berkinerja baik sesuai ketentuan yang berlaku.	✓	Kepala Bagian Perencanaan	Maret – Desember 2022
		d. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kemenhub untuk percepatan rencana integrasi aplikasi AP2KP dan <i>e-Performance</i> untuk integrasi penilaian kinerja individu dengan kinerja unit kerja.	✓	Kepala Bagian Perencanaan	Maret – Desember 2022

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menginginkan terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 PENILAIAN RISIKO

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilakukan penilaian risiko terhadap 59 kegiatan operasional/rutin pada masing-masing pejabat struktural/fungsional selaku Pemilik Risiko, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan : 29 Kegiatan.
2. Bagian Keuangan : 8 Kegiatan.
3. Bagian Hukum : 7 Kegiatan.
4. Bagian SDM dan Umum : 15 Kegiatan.

Tabel 2-4 Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilakukan Penilaian Risiko

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
Bagian Perencanaan		Kepala Bagian Perencanaan
1	Penyusunan Kegiatan Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri	Koordinator Rencana
2	Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri	Koordinator Rencana
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Koordinator Rencana
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Koordinator Rencana
5	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
6	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
7	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
8	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
9	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
10	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
11	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setditjen Perkeretaapian Tahun 2022	Koordinator Program
12	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
13	Pengisian Aplikasi E-Performance	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
14	Penyusunan Bahan Rapim Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
15	Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Semesteran	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
16	Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Tahunan	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
17	Penyusunan LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
18	Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
19	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
20	Penyusunan Laporan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
21	Penyusunan LKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
22	Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
23	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
24	Publikasi Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
25	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
26	Pengelolaan Administrasi Perkantoran/Persuratan pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
27	Pengelolaan Aplikasi SILAKI Ditjen Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
28	Pengelolaan Media Penyimpanan Dokumen Melalui Menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
29	Penyusunan Laporan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Keuangan		Kepala Bagian Keuangan
1	Pemrosesan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Koordinator Pelaksana Anggaran
2	Pengusulan PNBPN yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBPN Ditjen Perkeretaapian	Koordinator Pelaksana Anggaran
3	Inventarisasi dan Penilaian BMN	Koordinator Perbendaharaan dan Barang Milik Negara
4	Peninjauan Lapangan	Koordinator Perbendaharaan dan Barang Milik Negara
5	Serah Terima Barang Milik Negara	Koordinator Perbendaharaan dan Barang Milik Negara
6	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara	Koordinator Perbendaharaan dan Barang Milik Negara
7	Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinator Verifikasi Anggaran
8	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan BPK RI	Koordinator Verifikasi Anggaran
Bagian Hukum		Kepala Bagian Hukum
1	Penghimpunan, pendokumentasian, penginformasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian	Koordinator Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum
3	Pemberian Bantuan Hukum (Advokasi)	Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum
4	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama	Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
5	Pemantauan dan Investasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Di Bidang Perkeretaapian	Koordinator Humas dan KSLN
6	Bahan Publikasi dan Edukasi Publik Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian	Koordinator Humas dan KSLN
7	Dukungan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Humas dan KSLN
Bagian SDM dan Umum		Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
1	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Koordinator SDM dan Organisasi
2	Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA	Koordinator SDM dan Organisasi
3	Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian	Koordinator SDM dan Organisasi
4	Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi	Koordinator SDM dan Organisasi
5	Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	Koordinator SDM dan Organisasi
6	Penataan Arsip Aktif	Koordinator Tata Usaha
7	Penataan Arsip In-aktif	Koordinator Tata Usaha
8	Mengkoordinasikan Kegiatan Keprotokolan	Koordinator Tata Usaha
9	Memproses Proses Surat Masuk	Koordinator Tata Usaha
10	Memproses Proses Surat Keluar	Koordinator Tata Usaha
11	Keamanan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Rumah Tangga
12	Sosialisasi P4GN di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Koordinator Rumah Tangga
13	Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Rumah Tangga
14	Penghapusan BMN Kantor di Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Rumah Tangga
15	Rapid Test Covid-19 (Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19) dan Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Koordinator Rumah Tangga

2.2.1 Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko terhadap kegiatan operasional/rutin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan dengan pengisian kertas kerja dan *output* berupa daftar resiko. Penyusunan daftar resiko masing-masing pemilik risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara lengkap sebagaimana terlampir dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2-5 Rekapitulasi Jumlah Identifikasi Resiko

No	Unit Kerja	Identifikasi/Daftar Resiko		
		Jumlah Pejabat Struktural/ Fungsional Tertentu	Jumlah Kegiatan	Jumlah Resiko
1	Bagian Perencanaan	Eselon III : 1 Koordinator/ Eselon IV : 3	29	157
	a. Kelompok Rencana		4	25
	b. Kelompok Program		7	39
	c. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan		17	93
2	Bagian Keuangan	Eselon III : 1 Koordinator/ Eselon IV : 3	8	38
	a. Kelompok Pelaksana Anggaran		2	10
	b. Kelompok Perbendaharaan dan BMN		4	16
	c. Kelompok Verifikasi Anggaran		2	12
3	Bagian Hukum	Eselon III : 1 Koordinator/ Eselon IV : 3	7	20
	a. Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum		1	2
	b. Kelompok Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum		3	9
	c. Kelompok Humas Masyarakat & KSLN		3	9
4	Bagian SDM dan Umum	Eselon III : 1 Koordinator/ Eselon IV : 3	12	47
	a. Kelompok SDM dan Organisasi		5	20
	b. Kelompok Tata Usaha		5	17
	c. Kelompok Rumah Tangga		2	10

2.2.2 Analisis Risiko

Pada prinsipnya risiko yang sudah teridentifikasi maka pernyataan risiko dan penyebab risiko serta dampak risiko dapat dipahami dan tidak mengurangi risiko yang akan terjadi dari risiko sebelumnya. Penanggulangan risiko dilakukan melalui analisis risiko prioritas dan penanggulangan penyebab risiko, sehingga dapat mencegah terjadinya dampak negatif bagi kegiatan itu sendiri. Penyusunan analisis risiko masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara lengkap sebagaimana terlampir dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2-6 Rekapitulasi Identifikasi dan Analisis Risiko

No	Unit Kerja	Identifikasi/Daftar Risiko			
		Jumlah Pejabat Struktural/ Fungsional Tertentu	Jumlah Kegiatan	Jumlah Risiko	Jumlah Analisis Risiko
Setditjen Perkeretaapian		Eselon III : 4	56	262	262
1	Bagian Perencanaan	Koordinator/ Eselon IV : 3	29	157	157
2	Bagian Keuangan	Koordinator/ Eselon IV : 3	8	38	38
3	Bagian Hukum	Koordinator/ Eselon IV : 3	7	20	20
4	Bagian SDM dan Umum	Koordinator/ Eselon IV : 3	12	47	47

2.2.3 Rencana Tindak Pengendalian

Hasil analisis resiko selanjutnya menjadi acuan untuk merumuskan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang meliputi:

A. Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

B. Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang menguraikan bagaimana pemenuhan atas parameter sesuai dengan metodologi yang digunakan. Penerapan unsur Informasi dan Komunikasi mempunyai peran penting dalam instansi Pemerintah dan informasi-informasi yang diterima harus mampu disaring untuk menjaring informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut kemudian perlu dikomunikasikan untuk mendapat umpan balik. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang efektif (segala arah/atas ke bawah maupun bawah ke atas dan sebagainya). Dengan komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pimpinan dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta aspek pengendalian penting yang terkait dapat berjalan dengan secara memadai.

C. Rencana Perbaikan Pemantauan

Hasil pemetaan atas kondisi penerapan pemantauan menguraikan bagaimana pemenuhan atas parameter sesuai dengan metodologi yang digunakan. Uraian kondisi yang ada harus sampai pada kesimpulan umum seberapa memadai penerapan setiap sub unsur pemantauan serta kondisi-kondisi yang memerlukan perbaikan.

Jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang teridentifikasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat dalam tabel berikut dan secara lengkap sebagaimana terlampir.

Tabel 2-7 Rekapitulasi Rencana Tindak Pengendalian

No	Unit Kerja	Jumlah Pejabat Struktural/ Fungsional Tertentu	Jumlah Kegiatan	Jumlah Resiko	Jumlah Rencana Tindak Pengendalian
Setditjen Perkeretaapian		Eselon III : 4	56	262	262
1	Bagian Perencanaan	Koordinator/ Eselon IV : 3	29	157	157
2	Bagian Keuangan	Koordinator/ Eselon IV : 3	8	38	38
3	Bagian Hukum	Koordinator/ Eselon IV : 3	7	20	20
4	Bagian SDM dan Umum	Koordinator/ Eselon IV : 3	12	47	47

2.3 KEGIATAN PENGENDALIAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko organisasi yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko. Dalam hal ini masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun beberapa kegiatan pengendalian baik yang bersifat *preventif* ataupun *mitigation*. Kegiatan-kegiatan tersebut tertuang dalam pengisian Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Pada Form Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah tersusun dari pernyataan risiko, penyebab, rencana kegiatan pengendalian, waktu pelaksanaan, rencana informasi dan komunikasi, rencana pemantauan dan waktu pemantauan. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah merangking risiko per kegiatan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun selanjutnya pada akhir tahun 2022 akan dipantau untuk melihat realisasi kegiatan pengendalian per kegiatan. Hasil realisasi kegiatan pengendalian yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2-8 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Pengendalian

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengendalian	
			Rencana	Terlaksana
1	Bagian Perencanaan	29	157	
	a. Kelompok Rencana	4	25	Pemantauan tindak pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Program	7	39	
	c. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	18	93	
2	Bagian Keuangan	8	38	
	a. Kelompok Pelaksana Anggaran	2	10	Pemantauan tindak pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Perbendaharaan dan BMN	4	16	
	c. Kelompok Verifikasi Anggaran	2	12	
3	Bagian Hukum	7	20	
	a. Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum	1	2	Pemantauan tindak pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum	3	9	
	c. Kelompok Humas Masyarakat dan KSLN	3	9	

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengendalian	
			Rencana	Terlaksana
4	Bagian SDM dan Umum	15	50	
	a. Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	5	20	Pemantauan tindak pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Tata Usaha	5	17	
	c. Kelompok Rumah Tangga	5	13	

2.4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Penerapan informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam pemantauan kegiatan pengendalian sangat penting dalam penguraian parameter sesuai metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengendalian. Hasil realisasi kegiatan perbaikan informasi dan komunikasi yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2-9 Rekapitulasi Pemantauan Perbaikan Informasi dan Komunikasi

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Perbaikan Informasi Dan Komunikasi			
			Informasi		Komunikasi	
			Rencana	Terlaksana	Rencana	Terlaksana
1	Bagian Perencanaan	29	157	Pemantauan perbaikan informasi dilakukan pada akhir tahun 2022	157	Pemantauan perbaikan komunikasi dilakukan pada akhir tahun 2022
2	Bagian Keuangan	8	38		38	
3	Bagian Hukum	7	20		20	
4	Bagian SDM dan Umum	15	50		50	

2.5 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun per kegiatan oleh masing-masing pemilik risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada akhir tahun akan dilakukan pemantauan secara detail terhadap realisasinya. Daftar pemantauan risiko dan kegiatan pengendalian tersebut menampilkan hasil penilaian, skala dampak dan skala kemungkinan, kesimpulan dari hasil pemantauan terhadap tujuan kegiatan, perbaikan pemantauan jika akan ada perubahan dan waktu pemantauan.

Hasil realisasi pemantauan terhadap RTP oleh masing-masing pemilik risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2-10 Rekapitulasi Perbaikan Pemantauan Pengendalian Intern

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Perbaikan Pemantauan Pengendalian Intern	
			Rencana	Terlaksana
1	Bagian Perencanaan	29	157	
	a. Kelompok Rencana	4	25	Perbaikan pemantauan pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Program	7	39	
	c. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	18	93	
2	Bagian Keuangan	8	38	
	a. Kelompok Pelaksana Anggaran	2	10	Perbaikan pemantauan pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Perbendaharaan dan BMN	4	16	
	c. Kelompok Verifikasi Anggaran	2	12	
3	Bagian Hukum	7	20	
	a. Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum	1	2	Perbaikan pemantauan pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum	3	9	
	c. Kelompok Humas Masyarakat dan KSLN	3	9	
4	Bagian SDM dan Umum	15	50	
	a. Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	5	20	Perbaikan pemantauan pengendalian dilakukan pada akhir tahun 2022
	b. Kelompok Tata Usaha	5	17	
	c. Kelompok Rumah Tangga	5	13	

BAB 3 PENILAIAN MATURITAS SPIP

3.1 PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI

Pada tahun 2022, sistem penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.



Gambar 3-1 *Framework* Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sistem penilaian maturitas SPIP meliputi penilaian SPIP terintegrasi dengan penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terdapat 7 hal yang dilakukan penilaian pada penyelenggaraan maturitas SPIP sebagai berikut:

1. **Objek Penilaian:** SPIP Terintegrasi sudah mencakup objek perencanaan dan pencapaian hasil (bukan hanya struktur dan proses).
2. **Kaitan dengan 4 Tujuan SPIP:** Telah dikaitkan dengan empat tujuan SPIP antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Asset Negara dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

3. **Penentuan Satker Sampel:** Selain berdasarkan keterwakilan fungsi juga mempertimbangkan sasaran strategis dan tujuan SPIP.
4. **Metodologi Penilaian:** Tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen namun lebih mengedepankan substansi.
5. **Pengintegrasian Penilaian:** Bukan hanya menilai unsur-unsur SPIP namun juga mengintegrasikan penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP.
6. **Fokus Penilaian:** Penentuan Area of Improvement (Aoi) melalui pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, tidak hanya fokus pada skor/level.
7. **Proses Penilaian:** Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) menjadi satu proses bagian dan dilakukan oleh K/L/D (BPKP tidak lagi memberikan penilaian sebagai penjamin kualitas peran BPKP dalam proses SPIP Terintegrasi adalah melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Adapun komponen, unsur dan sub unsur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-1 Komponen, Unsur dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Pengakuan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencataltannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencataltannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100.00%	
TOTAL BOBOT		100.00%

3.1 HASIL PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri pada seluruh unit kerja termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan yang diajukan untuk dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan sebanyak 7 unit kerja yaitu 5 unit eselon II (Setditjen, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) dan 2 unit eselon III/UPT (Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat dan Balai Pengujian Perkeretaapian).

Berdasarkan hasil penilaian mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan (termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian), diperoleh hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2021/2022 bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor sebesar 3,578 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-2 Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,753
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,825
	-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,578
	-MRI	3	3,190
	-IEPK	2	2,070

Dengan karakteristik level maturitas SPIP ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif untuk perlu banyak perbaikan perbaikan di masa yang akan datang. Adapun rincian hasil penilaian maturitas SPIP tahun 2022 untuk Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-3 Rincian Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,50
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	5	5,00
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,000
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,203	0,661
Penilaian Risiko	20.00%	2,750	0,550
Kegiatan Pengendalian	25.00%	2,909	0,727
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,325	0,232
Pemantauan	15.00%	2,271	0,340
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,753
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			0,90
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	3	0,45
Capaian <i>Output</i>	15.00%	3	0,45
Keandalan Pelaporan Keuangan			0,75
Opini LK	25.00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			0,90
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5.00%	2	0,10
Keamanan Hukum	10.00%	5	0,50
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			0,20
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1	0,20
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
BOBOT HASIL	30.00%		0,825
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,578

Untuk mencapai level yang baik, dalam PP nomor 60 tahun 2008 juga menegaskan tentang tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah dalam keberhasilan penyelenggaraan SPIP di instansi dapat dijabarkan dalam 3 hal pokok yaitu:

1. Menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi;
2. Membangun sistem pengendalian yang memadai;
3. Mencapai tujuan organisasi melalui 4 tujuan SPIP (efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang undangan).

Dari hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP rekomendasi/saran untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat terkelola, agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, diantaranya dengan melakukan reviu Renstra Unit Kerja Eselon I.
2. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, diperlukan implementasi Manajemen Risiko, membentuk Unit Manajemen Risiko, melakukan sosialisasi dan publikasi atas pentingnya *Whistle Blowing* serta melakukan evaluasi secara berkala atas keandalan sistem *Whistle Blowing*.
3. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan PNBPN dan Pencatatan Aset.

3.2 RENCANA AKSI AREA OF IMPROVEMENT

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti pada *Area of Improvement* (AOI). AOI tersebut selanjutnya disusun rencana aksi untuk unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan komponen, unsur dan sub unsur penilaian sebagaimana pada matriks berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Aksi Area of Improvement (AOI)

No.	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Area Of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	PENETAPAN TUJUAN				
	Penilaian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Ditjen Perkeretaapian (KK 2)	<i>Cascading</i> indikator kinerja dan penetapan target pada Renstra perlu penyesuaian	Revisi Renstra tahun 2020-2024	Bagian Perencanaan	Triwulan I – II 2023
2	STRUKTUR PROSES				
2.1	Lingkungan Pengendalian				
2.1.1	Penegakkan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1.1.1 K/L/D menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala terkait peraturan-peraturan tentang integritas, perilaku dan etika sebagai apatur sipil minimal 2 kali dalam 1 tahun	Sosialisasi peraturan-peraturan tentang integritas, perilaku dan etika ASN	Bagian SDM dan Umum	Triwulan IV 2022, Triwulan II 2023
2.1.2	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	1.2 Komitmen terhadap Kompetensi Perlu dilakukan sosialisai dan bimtek secara berkala terkait peraturan-peraturan tentang kompetensi untuk pengembangan SDM dalam pengembangan Karir sebagai apatur sipil minimal 2 kali dalam 1 tahun	Sosialisasi peraturan-peraturan tentang kompetensi untuk pengembangan SDM	Bagian SDM dan Umum	Triwulan IV 2022, Triwulan II 2023

No.	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Area Of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
2.1.3	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	<p>1.3.1 Pimpinan K/L/D menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi</p> <p>Kebijakan SPIP sebagaimana PM 25 Tahun 2018 belum memwadahi penerapan <i>New SPIP</i> terintegrasi yang meliputi Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan dengan didukung Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi dan Level Kapabilitas APIP.</p>	Koordinasi dengan Setjen untuk usulan revisi PM 25 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP	Bagian Perencanaan	Triwulan II 2022
		<p>1.3.4 Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja</p> <p>Penerapan manajemen risiko melalui penggunaan sebagai indikator penilaian kinerja belum memadai dimana hanya diterapkan di tingkat eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa indikator level maturitas SPIP.</p>	Penyempurnaan <i>cascading</i> unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penambahan indikator terkait level maturitas SPIP di unit kerja lainnya	Bagian Perencanaan	Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023
2.1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	<p>1.6.3 Kesadaran Pegawai terkait Manajemen Risiko</p> <p>Saat ini belum terdapat aturan/kebijakan khusus yang menjelaskan terkait manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perkeretaapian</p>	Sosialisasi Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko Ditjen Perkeretaapian dan koordinasi dengan Setjen terkait penyusunan kebijakan manajemen risiko/revisi PM 25 tahun 2018	Bagian Perencanaan	Triwulan I – II 2023

No.	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Area Of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
2.2	Penilaian Risiko				
2.2.1	Identifikasi Risiko	<p>2.1.1 K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko</p> <p>2.1.2 Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko</p> <p>2.1.3 Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D</p> <p>Belum ada kebijakan terkait manajemen risiko khususnya pada penetapan konteks risiko strategis dan operasional, penetapan <i>risk appetite</i>/selera risiko dan pembangunan budaya risiko di lingkungan Ditjen Perkeretaapian</p>	Sosialisasi Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko Ditjen Perkeretaapian	Bagian Perencanaan	Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023
2.2.2	Analisis Risiko (2.2)	<p>2.2.1 Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya</p> <p>2.2.2 K/L/D telah menentukan prioritas risiko</p> <p>2.2.3 K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian</p> <p>Bahwa penilaian risiko korupsi tidak berjalan (unit kerja tidak pernah melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko dan penyusunan kebijakan)</p>	Pelaksanaan penilaian risiko dalam kerangka manajemen risiko dengan memasukkan kategori risiko kepatuhan/risiko hukum	Seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023
2.3	Kegiatan Pengendalian				
2.3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.3.1 Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi aset dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan	Koordinasi dengan Pusdatin Kemenhub untuk evaluasi dan optimalisasi kemanfaatan	Bagian Perencanaan dan Bagian	Triwulan I – II 2023

No.	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Area Of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
		<p>tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna (KK 3.2 dan KK 3.3) Belum adanya pemetaan dan analisis kemanfaatan pada sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian</p>	<p>aplikasi pengelolaan keuangan dan BMN termasuk integrasi dengan portal aplikasi Ditjen Perkeretaapian.</p>	Keuangan	
2.3.8	<p>Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)</p>	<p>3.8.1 Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen</p> <p>Saat ini Ditjen Perkeretaapian belum memiliki SOP yang mengatur pencatatan/ penatausahaan/ inventarisasi dokumen Arsip.</p>	<p>Penyusunan SOP inventaris arsip yang juga mengatur klasifikasi yang jelas dan tenggat waktu.</p>	Bagian SDM dan Umum	Triwulan I – II 2023
		<p>3.8.1 Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen</p> <p>Fungsi pencatatan belum dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur SIK.</p>	<p>Evaluasi SOP terkait pencatatan/arsip</p>	Bagian SDM dan Umum	Triwulan I – II 2023
2.3.9	<p>Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)</p>	<p>3.9.1 Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya</p> <p>Saat ini belum ada SOP mekanisme/desain pembatasan akses yang tidak diinginkan terhadap pencatatan sumber daya</p>	<p>Penyusunan SOP tentang pembatasan akses terhadap pencatatan sumber daya keuangan maupun kegiatan operasional organisasi</p>	Bagian Keuangan, Bagian SDM dan Umum	Triwulan I – II 2023

No.	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Area Of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
2.3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	<p>3.10.1 Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya belum direviu secara periodik.</p> <p>Fungsi pertanggungjawaban belum dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan terkait sistem informasi kepegawaian sesuai PM 82 Tahun 2011 secara periodik (3 bulan) yang selanjutnya direviu sebagai fungsi pertanggungjawaban untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur. • Rapat evaluasi terkait manajemen resiko akibat kelemahan alur/prosedur pada fungsi pertanggungjawaban. 	Seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan I – II 2023
2.3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	<p>3.11.1 Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan</p> <p>Fungsi pendokumentasian belum dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur.</p>	Rapat evaluasi terkait manajemen resiko akibat kelemahan alur/prosedur pada fungsi pendokumentasian	Seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan I – II 2023
2.4 Informasi dan Komunikasi					
2.4.1	Informasi yang Relevan (4.1)	<p>4.1.3 Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan</p> <p>Komunikasi terhadap risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja belum dilakukan secara optimal</p>	Pemantauan secara berkala realisasi pengendalian risiko dan perbaikan komunikasi yang ditetapkan pada rencana tindak pengendalian.	Seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV 2022
2.5 Pemantauan					

No.	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Area Of Improvement (Aoi)	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Target Waktu
2.5.1	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	5.1.3 Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan Monitoring risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja belum dilakukan memadai.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi RTP yang dilakukan/yang telah ditindaklanjuti.	Seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Triwulan IV 2022
3	PENCAPAIAN TUJUAN SPIP				
	Pengamanan atas Aset	Keamanan Hukum	Penyelesaian pendataan dan pengamanan asset sebagai tindak lanjut temuan BPK	Bagian Keuangan	Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023
	Ketaatan pada Peraturan	Temuan Ketaatan - BPK	Penyelesaian pendataan dan pengamanan asset sebagai tindak lanjut temuan BPK	Bagian Keuangan	Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- A. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan *output* penyelenggaraan SPIP meliputi:
1. Daftar kelemahan lingkungan pengendalian unit kerja;
 2. Penilaian resiko mencakup Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko;
 3. Rencana tindak pengendalian mencakup kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern;
 4. Pemantauan rencana tindak pengendalian yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan.
- B. Daftar kelemahan lingkungan pengendalian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disusun berdasarkan hasil pengisian kuisisioner *Survey Control Environment Evaluation* (CEE) dimana diperoleh kelemahan pengendalian adalah pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika serta Kebijakan Pengembangan SDM.
- C. Dokumen penyelenggaraan SPIP berupa daftar resiko, peta risiko dan rencana tindak pengendalian telah disusun untuk kegiatan operasional/rutin yaitu sebanyak 59 kegiatan oleh pemilik risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selanjutnya telah dilakukan pemantauan terhadap realisasi dari rencana tindak pengendalian tersebut.
- D. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan penilaian mandiri pada seluruh unit kerja termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan yang diajukan untuk dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP/Itjen Kementerian Perhubungan sebanyak 7 unit kerja yaitu 5 unit eselon II (Setditjen, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan) dan 2 unit eselon III/UPT (Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat dan Balai Pengujian Perkeretaapian) dengan diperoleh hasil nilai level maturitas SPIP sebesar 3,578 (terdefinisi). Dengan karakteristik level maturitas SPIP ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu

mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif untuk perlu banyak perbaikan di masa yang akan datang.

4.2 RENCANA PENGEMBANGAN

- A. Unsur-unsur SPIP merupakan proses yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan diperlukan komitmen bersama pimpinan dan pegawai untuk penyelenggaraan SPIP melalui penyusunan dokumen pada awal tahun, diimplementasikan serta dievaluasi penyelenggaraannya pada akhir tahun.
- B. Pelaksanaan penilaian risiko perlu diperbaiki kualitas dokumennya (daftar resiko, peta resiko termasuk rencana tindak pengendalian) melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan evaluasi dokumen yang telah disusun. Selain itu juga diperlukan penyempurnaan proses bisnis/SOP terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- C. Pada tahun 2022, penilaian risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan untuk kegiatan operasional/rutin. Ke depan penilaian risiko harus dilaksanakan dalam kerangka implementasi manajemen risiko dengan mengacu pada rencana strategis yaitu sasaran dan indikator kinerja unit kerja.
- D. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat menciptakan pengawasan terhadap perencanaan sampai dengan pencapaian di seluruh kegiatan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oleh karena itu diperlukan pemantauan implementasi terhadap rencana tindak pengendalian secara berkala.
- E. Diperlukan penyelesaian pendataan dan pengamanan asset bidang perkeretaapian sebagai tindak lanjut temuan BPK, termasuk revisi Renstra tahun 2020-2024 untuk perbaikan penetapan tujuan organisasi.

4.3 SARAN

Penyelenggaraan SPIP bukan hanya sekedar kewajiban namun sebuah kebutuhan bagi organisasi dengan melakukan upaya perubahan antara lain:

- A. Evaluasi regulasi terkait penyelenggaraan SPIP dan sosialisasi pedoman teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- B. Peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko melalui pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- C. Pengoptimalan peran Unit Kepatuhan Intern (UKI) sebagai unit manajemen risiko yang berfungsi untuk menyusun kebijakan teknis, kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko
- D. Pengotimalan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan penilaian maturitas SPIP terintegrasi.
- E. Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, terdapat rekomendasi untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat terkelola, agar melakukan hal-hal diantaranya:
 - 1. Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, diantaranya dengan melakukan reviu Renstra Unit Kerja Eselon I.
 - 2. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, diperlukan implementasi manajemen risiko, membentuk Unit Manajemen Risiko, melakukan sosialisasi dan publikasi atas pentingnya *Whistle Blowing* serta melakukan evaluasi secara berkala atas keandalan sistem *Whistle Blowing*.
 - 3. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan PNBPN dan Pencatatan Aset.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP

LAMPIRAN 2. CEE DAN DAFTAR KELEMAHAN KEGIATAN
PENGENDALIAN

LAMPIRAN 3. PENILAIAN RISIKO (DAFTAR, PETA, RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN)

LAMPIRAN 4. SK TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP

LAMPIRAN 5. HASIL PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH DILAKUKAN
PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP

LAMPIRAN 1
SK SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR: HK.206/116/K1/DJKA/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 4890);
- h. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Nomor Lembaran Negara Tambahan 5707);
- i. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 202 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).

Memperhatikan : DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-022.08.1.467504/2022 Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:

- a. Bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

2. Ketua:

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas SPIP;
- b. Menyusun rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP, termasuk penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP;
- c. Mensosialisasikan penerapan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP;
- d. Melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan Tim Satgas;
- e. Membimbing dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan kepada penanggungjawab secara periodik.

3. Sekretaris:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- b. Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Satgas SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- d. Melakukan inventarisasi hasil penyelenggaraan SPIP dari seluruh anggota Satgas SPIP;
- e. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP;
- f. Mendukung tugas Satgas SPIP dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP.

4. Anggota:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait SPIP;
- b. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Mempersiapkan instrumen-instrumen pelaksanaan SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan setiap sub unsur SPIP dan mengevaluasi instrumen yang telah dimiliki;
- d. Menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian resiko, rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan komunikasi, serta rencana tindak perbaikan pemantauan;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara periodik.

5. Sekretariat:

- a. Membantu anggota Satgas SPIP menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan komunikasi, rencana tindak perbaikan pemantauan serta laporan penyelenggaraan SPIP;
- b. Membantu Tim Satgas PIP dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SPIP serta membantu menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja terkait;
- c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi kegiatan penyelenggaraan SPIP.

- KETIGA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, S.E., M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621005 198903 1 001

SALINAN ini disampaikan
Kepada:

1. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal
Perkeretaapian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Direktorat
Jenderal Perkeretaapian
Nomor : HK.206/1/6/K1/DJKA/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

- Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan
- Sekretaris : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Kepala Bagian Kepagawaian dan Umum.
- Sekretariat : 1. Sub Koordinator Kelompok Rencana;
2. Sub Koordinator Kelompok Program;
3. Sub Koordinator Kelompok Perbendaharaan dan Barang Milik Negara;
4. Sub Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran;
5. Sub Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum;
6. Sub Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum;
7. Sub Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri;
8. Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi;
9. Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga;
10. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha;
11. Arinta Luwiyana;
12. Yurnaliza;
13. Novie Hasta;
14. Viki Okissa Syaifudin;
15. Andhika Marjuni;

18. Gunawan;
19. Merinda Pangertikasari;
20. Trinanda Meinar.

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, S.E., M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621005 198903 1 001

LAMPIRAN 2
CEE DAN DAFTAR KELEMAHAN
KEGIATAN PENGENDALIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal perkeretaapian

NO	UNSUR / KELEMAHAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA					
1.	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun belum diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	Melakukan sosialisasi peraturan terbaru Kementerian Perhubungan kepada masyarakat, rekanan, instansi lainnya, dengan mengoptimalkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial, pertemuan virtual), antara lain terkait perizinan, cipta kerja, pengaduan pelanggaran, pelayanan transportasi perkeretaapian, kode etik ASN dan lainnya.	√	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator Kelompok Hukum.• Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum.	Juli – Desember 2021
2.	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) belum menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku oleh para pegawai	Mengoptimalkan buletin, papan pengumuman, website dan media komunikasi internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian lainnya untuk mensosialisasikan aturan perilaku ASN sebagaimana Permenhub nomor 99 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	√	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum• Koordinator Kelompok Hukum.	Februari – Desember 2021
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM					
1.	Instansi belum mempunyai kebijakan dan prosedur	a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur SDM melalui rapat koordinasi setiap tahun termasuk dengan Setjen Kemenhub/Biro Kepegawaian guna memantau pemahaman dan implementasi kebijakan dan prosedur SDM di seluruh unit kerja yang	√	<ul style="list-style-type: none">• Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum	Februari – Desember 2021

NO	UNSUR / KELEMAHAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
		Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2) PM nomor 91 tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan.			
		b. Pemberian penghargaan (<i>reward</i>) yang rutin dan terdokumentasi kepada unit kerja yang berkinerja baik sesuai ketentuan yang berlaku.	√	• Koordinator Kelompok Perencanaan	Februari, Juli 2021
		c. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kemenhub untuk percepatan rencana integrasi aplikasi AP2KP dan <i>e-Performance</i> untuk integrasi penilaian kinerja individu dengan kinerja unit kerja.	√	• Koordinator Kelompok Perencanaan • Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum.	April – Desember 2021

Jakarta,

2021

**SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**



ZULMAFENDI, S.E, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610904 198703 1 001

LAMPIRAN 3
PENILAIAN RISIKO
(DAFTAR, PETA, RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Anggota tim belum memahami/kompeten dalam menyusun rencana pinjaman dalam dan luar negeri	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Anggota tim belum mendapatkan sosialisasi/ bimbingan teknis maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring pinjaman dalam dan luar negeri	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif
2.	Usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh direktorat teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator Kelompok rencana	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif
3.	Dokumen data dukung usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri tidak lengkap	Sub Koordinator Kelompok rencana	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif
4.	Rapat finalisasi usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri ditunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok rencana	Pimpinan rapat ada penugasan lain	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
5.	Laporan triwulanan kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh satker terkait	Sub Koordinator Kelompok rencana	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Rencana
- Kegiatan** : Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri
- Tujuan** : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Anggota tim belum memahami/kompeten dalam menyusun rencana pinjaman dalam dan luar negeri	Anggota tim belum mendapatkan sosialisasi/bimbingan teknis maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring pinjaman dalam dan luar negeri	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	7,48	1
2.	Dokumen data dukung usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri tidak lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	7,25	2
3.	Usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh direktorat teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	6,90	3
4.	Laporan triwulanan kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh satker terkait	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	5,98	4

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
5.	Rapat finalisasi usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	5,28	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Anggota tim belum memahami/ kompeten dalam menyusun rencana pinjaman dalam dan luar negeri	Anggota tim belum mendapatkan sosialisasi/bimbingan teknis maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring pinjaman dalam dan luar negeri	mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/bimtek maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring kegiatan pinjaman dalam dan luar negeri	2022	mengikutsertakan dalam bimtek, diklat maupun sosialisasi	update data pada g-drive	2022	-	-
2	Dokumen data dukung usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri tidak lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	melakukan pembahasan dokumen data dukung kegiatan untuk memastikan dokumen sudah siap, benar, dan lengkap	2022	koordinasi, rapat pembahasan data dukung usulan kegiatan	WA group	2022	-	-

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh direktorat teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	membuat group wa dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	2022	-	-
4	Laporan triwulanan kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh satker terkait	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	membuat group wa dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	2022	-	-
5	Rapat finalisasi usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	2022	Update agenda pimpinan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat	Google kalender agenda pimpinan dan WA Grup ajudan/sespri	2022	Mengecek agenda pimpinan melalui Google Kalender dan WA Grup informasi pimpinan	2022

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Rencana
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian
- Tujuan** :
1. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
 2. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
 3. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJP	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/ workshop terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu
2.	Rapat koordinasi/konsinyering ditunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Pimpinan rapat ada penugasan lain	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu
3.	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/ Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
				dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu
4.	Tim tidak dapat melakukan analisa data indikasi pembangunan	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu
5.	Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian ditunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi RPJP kurang memadai	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang Fajar S.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Rencana
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian
- Tujuan** :
1. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
 2. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
 3. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Tim tidak dapat melakukan analisa data indikasi pembangunan	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	6,40	1
2.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJP	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/worksh op terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	6,21	2
3.	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/ mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan	5,20	3

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
			program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu		
4.	Rapat koordinasi/konsinyering ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	5,13	4
5.	Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian ditunda pelaksanaannya	Jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi RPJP kurang memadai	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	4,80	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang Fajar S.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian

Tujuan :

1. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Tim tidak dapat melakukan analisa data indikasi pembangunan	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Bagian	membuat group WA dengan Direktorat/Balai/Bagian dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	2022	-	-
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJP	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor	mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/bimtek maupun diklat terkait penyusunan RPJP	2022	mengikutsertakan dalam bimtek, diklat maupun sosialisasi	update data pada g-drive	2022	Mengecek agenda pimpinan melalui Google Kalender dan WA Grup informasi pimpinan	2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
		Perkeretaapian							
3	Tim tidak dapat melakukan kompilasi /mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/ Bagian	membuat group WA dengan Direktorat/Balai/ Bagian dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	2022	-	-
4	Rapat koordinasi/ konsinyering ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	2022	Update agenda pimpinan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat	Google kalender agenda pimpinan dan WA Grup ajudan/sespri	2022	-	-
5	Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian ditunda pelaksanaannya	Jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi RPJP kurang memadai	Mengusulkan revisi dokumen anggaran	2022	usulan revisi dokumen anggaran	Surat usulan	2022	Inventaris sisa anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	-

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang Fajar S.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Kegiatan Monitoring Hibah Luar Negeri

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Penerimaan Hibah

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Anggota tim belum memahami/kompeten dalam menyusun rencana pinjaman hibah luar negeri	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai hibah	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif
2.	Surat Penyampaian usulan dan monitoring hibah belum sampai ke Setjen Kemenhub	Sub Koordinator Kelompok rencana	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif
3.	Rapat koordinasi pembahasan konsep hibah ditunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok rencana	Sesditjen/Koordinator/Sub Koordinator sibuk/ada penugasan lain yang lebih penting	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif
4.	Pelaporan hasil rapat belum disusun	Sub Koordinator Kelompok rencana	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif
5.	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Sub Koordinator Kelompok rencana	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
6.	Dokumen perjanjian pinjaman atau hibah belum dibuat	Sub Koordinator Kelompok rencana	Data pendukung untuk penyusunan rencana Hibah yang dikumpulkan belum lengkap	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif
7.	Pengiriman Laporan Triwulanan melewati deadline	Sub Koordinator Kelompok rencana	Terdapat kesalahan pengetikan dari Direktorat/Balai/Kelompok (yang mempengaruhi maksud) dan Kendala jaringan tanda tangan elektronik	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif
8.	Pembahasan dalam penyusunan usulan kegiatan yang didanai Hibah belum menampung semua pendapat	Sub Koordinator Kelompok rencana	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan dan risiko usulan yang mungkin muncul di kemudian hari	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif

Jakarta, Februari 2022

Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Pinjaman Hibah Luar Negeri

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Anggota tim belum memahami/kompeten dalam menyusun rencana pinjaman hibah luar negeri	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai hibah	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	5,16	1
2.	Surat Penyampaian usulan dan monitoring hibah belum sampai ke Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	4,41	3
3.	Rapat koordinasi pembahasan usulan dan monitoring hibah ditunda pelaksanaannya	Sesditjen/Koordinator/Sub Koordinator sibuk/ada penugasan lain yang lebih penting	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	4,44	2
4.	Pelaporan hasil rapat belum disusun	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	2,73	8
5.	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	3,52	6
6.	Dokumen perjanjian pinjaman atau hibah belum dibuat	Data pendukung untuk penyusunan rencana PHLN yang dikumpulkan belum lengkap	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	4,20	4
7.	Pengiriman Laporan Triwulanan melewati deadline	Terdapat kesalahan pengetikan dari Direktorat/Balai/Kelompok (yang mempengaruhi	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	3,33	7

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
		maksud) dan Kendala jaringan tanda tangan elektronik			
8.	Pembahasan dalam penyusunan usulan kegiatan yang didanai hibah belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan dan risiko usulan yang mungkin muncul di kemudian hari	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	3,95	5

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Pinjaman Hibah Luar Negeri

Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Penerimaan Hibah

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Anggota tim belum memahami/kompetensi dalam menyusun rencana pinjaman hibah luar negeri	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai hibah	Diskusi ringan untuk sharing pengetahuan, pengalaman dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	WA Group, tatap muka, dan zoom	2022	Memastikan kehadiran anggota dalam diskusi ringan	2022
2	Rapat koordinasi pembahasan kegiatan yang didanai hibah ditunda pelaksanaannya	Sesditjen/Koordinator/Sub Koordinator sibuk/ada penugasan lain yang lebih penting	Koordinasi yang baik dengan pimpinan maupun pihak terkait, untuk menentukan waktu yang tepat	2022	Melakukan pengecekan kegiatan kedinasan pimpinan	WA Group	2022	Koordinasi jadwal pihak terkait lebih awal	2022
3	Surat Penyampaian usulan dan monitoring hibah belum sampai ke Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Pengecekan posisi surat keluar	2022	Mengecek posisi surat keluar	WA Group	2022	Menanyakan langsung kepada pihak terkait mengenai posisi surat dan kendala	2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
4	Dokumen perjanjian pinjaman atau hibah belum dibuat	Data pendukung untuk penyusunan rencana hibah yang dikumpulkan belum lengkap	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai /Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group	2022	Koordinasi lebih awal terkait progres	2022
5	Pembahasan dalam penyusunan usulan kegiatan yang didanai hibah belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan dan risiko usulan yang mungkin muncul di kemudian hari	'Koordinasi langsung untuk hadir dan mengisi form pendapat & masukan	2022	Form online dan print out	WA Group dan mempersilahkan langsung	2022	Mengecek jumlah hadir & undangan serta absen ketika awal rapat	2022
6	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Kel ompok	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	2022	Penegasan pengumpulan data pendukung	Drive khusus dan WA	2022	Menanyakan langsung	2022
7	Pengiriman Laporan Triwulanan melewati deadline	Terdapat kesalahan pengetikan dari Direktorat/Balai/Kel ompok (yang mempengaruhi maksud) dan Kendala jaringan tanda tangan elektronik	'Lebih awal dalam menetapkan batas waktu pengumpulan	2022	Penegasan pada anggota untuk menyelesaikan laporan	Drive khusus dan WA Group	2022	Menanyakan langsung kepada pihak terkait kendala	2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
8	Pelaporan hasil rapat belum disusun	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group	2022	Menanyakan langsung	2022

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang F. S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

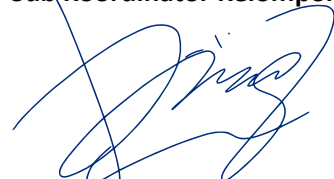
DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Rencana
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- Tujuan** :
1. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
 2. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
 3. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Saat Ini Dan Masa Depan

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan RPJM	RPJM tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/ workshop mengenai penyusunan RPJM	RPJM tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3.	Jumlah anggaran untuk kegiatan penyusunan RPJM kurang memadai	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Ada pemotongan/penghematan anggaran	RPJM tidak tepat waktu
4.	Dokumen RPJM belum dikirim Setjen Kemenhub	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	RPJM tidak tepat waktu
5.	Beberapa Data pendukung (Usulan RPJM dari Direktorat/Balai) belum ada	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan	RPJM tidak akuntabel dan tidak tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
			oleh Direktorat/Balai	
6.	Pelaksanaan rapat pembahasan RPJM ditunda	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Pimpinan ada penugasan lain yang lebih penting	RPJM tidak tepat waktu
7.	Pembahasan dalam penyusunan RPJM belum menampung semua pendapat	Sub Koordinator Kelompok Rencana	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan RPJM	RPJM kurang menyeluruh

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang Fajar S.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan :

1. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan RPJM	RPJM tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	5,70	4
2.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai penyusunan RPJM	RPJM tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6,22	2
3.	Jumlah anggaran untuk kegiatan penyusunan RPJM kurang memadai	Ada pemotongan/penghematan anggaran	RPJM tidak tepat waktu	5,16	6
4.	Dokumen RPJM belum dikirim Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	RPJM tidak tepat waktu	4,67	7
5.	Beberapa Data pendukung (Usulan RPJM dari Direktorat/Balai) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	RPJM tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6,53	1
6.	Pelaksanaan rapat pembahasan RPJM ditunda	Pimpinan ada penugasan lain yang lebih penting	RPJM tidak tepat waktu	5,98	3

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
7.	Pembahasan dalam penyusunan RPJM belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan RPJM	RPJM kurang menyeluruh	5,70	4

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang Fajar S.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan :

1. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Beberapa Data pendukung (Usulan RPJM dari Direktorat/Balai) belum ada/terlambat diserahkan	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	'mengoptimalkan penggunaan drive khusus dengan batas waktu upload	2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group	2022	Check List data dukung oleh pimpinan tim dan pengecekan drive berkala	2022
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai penyusunan RPJM	'Mengikuti Sosialisasi/diklat/workshop dan diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan	2022	Sosialisasi, Diklat, Workshop, Sharing pengetahuan secara mandiri	WA grup, tatap muka atau zoom	2022	Memastikan kehadiran anggota dalam diskusi ringan	2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
			pemahaman satu sama lain dan komunikasi antar anggota Tim						
3	Pelaksanaan rapat pembahasan RPJM ditunda	Pimpinan ada penugasan lain yang lebih penting	'koordinasi langsung	2022	Mengecek jadwal pimpinan	Koordinasi	2022	Koordinasi lebih awal	2022
4	Anggota tim sebagian besar belum memahami proses penyusunan RPJM	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/pedoman yang berhubungan dengan penyusunan RPJM	'Diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama lain dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Sosialisasi, Diklat, Workshop, Sharing pengetahuan secara mandiri	WA grup, tatap muka atau zoom	2022	Memastikan kehadiran anggota dalam diskusi ringan	2022
4	Pembahasan dalam penyusunan RPJM belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan RPJM	'menyediakan google form atau kolom penyampaian pendapat (sebelum diskusi dimulai atau bersamaan dengan absen)	2022	Koordinasi langsung dengan pihak terkait	Mempersilahkan langsung	2022	Menyediakan form penyampaian pendapat sebelum rapat	2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
6	Dokumen RPJM belum dikirim ke Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	'koordinasi langsung	2022	ND, Memo, Surat, Rapat, WA, Email, Tlp, Koordinasi langsung dengan pihak terkait	WA dan Tlp	2022	Memastikan partisipasi aktif tim penyusun RPJM dalam penyesuaian kegiatan dengan ketersediaan dana pada rapat awal	2022
7	Jumlah anggaran untuk kegiatan penyusunan RPJM kurang memadai	Ada pemotongan/penghematan anggaran	Menyesuaikan kegiatan penyusunan RPJM dengan ketersediaan dana namun tetap memperhatikan kualitas hasil	2022	ND, Memo, Surat, Rapat, WA, Email, Tlp, Drive	Mengkomunikasikan usulan kebutuhan secara aktif	2022	Memastikan partisipasi aktif tim penyusun RPJM dalam penyesuaian kegiatan dengan ketersediaan dana pada rapat awal	2022

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang Fajar S.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Kegiatan Monitoring Hibah Dalam/Luar Negeri

Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Penerimaan Hibah

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Pemantauan yg Dilaksanakan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Pemantauan
			Kemungkinan	Dampak								
1	Anggota tim belum memahami secara keseluruhan terkait pengusulan, pelaksanaan, dan hibah dalam/luar negeri	Kelompok Rencana	2,11	2,44	Diskusi ringan untuk sharing pengetahuan, pengalaman dan komunikasi antar anggota Tim	telah dilakukan	3	3	terlaksana	Koordinator Kelompok Perencanaan mengecek pembuatan drive khusus	Memastikan kehadiran anggota dalam diskusi ringan	2022
2	Surat Penyampaian usulan dan monitoring Hibah belum sampai ke Setjen Kemenhub	Kelompok Rencana	1,89	2,33	Pengecekan posisi surat keluar	telah dilakukan	3	3	terlaksana	Pemantauan proses administrasi persuratan	Menanyakan langsung kepada pihak terkait mengenai posisi surat dan kendala	2022
3	Rapat koordinasi pembahasan kegiatan yang didanai Hibah	Kelompok	2	2,22	Koordinasi yang baik dengan pimpinan maupun pihak	telah dilakukan	3	2	terlaksana	Koordinasi dan penjadwalan ulang	Koordinasi jadwal pihak	2022

	ditunda pelaksanaannya	Renca na			terkait, untuk menentukan waktu yang tepat						terkait lebih awal	
4	Pelaporan hasil rapat belum disusun	Kelompok Renca na	1,44	1,88	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	telah dilakukan koordinasi langsung	3	3	terlaksana	Check List data dukung oleh pimpinan tim & Pemantauan aktif progres via WA grup	Menanyakan langsung	2022
5	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Kelompok Renca na	1,67	2,11	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	telah dilakukan	2	3	terlaksana	Check List data dukung oleh pimpinan tim & Pemantauan aktif progres via WA grup	Menanyakan langsung	2022
6	Dokumen perjanjian hibah belum dibuat	Kelompok Renca na	1,89	2,22	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	telah dilakukan	3	3	terlaksana	Pemantauan aktif progres via WA grup	Koordinasi lebih awal terkait progres	2022
7	Pengiriman Laporan Triwulanan melewati deadline	Kelompok Renca na	1,67	2,00	Lebih awal dalam menetapkan batas waktu pengumpulan	telah dilakukan	2	2	terlaksana	Pemantauan proses administrasi persuratan	Menanyakan langsung kepada pihak terkait kendala	2022

8	Pembahasan dalam penyusunan usulan kegiatan yang didanai Hibah belum menampung semua pendapat	Kelompok Rencana	1,78	2,22	koordinasi langsung untuk hadir dan mengisi form pendapat & masukan	telah dilakukan koordinasi langsung	2	2	terlaksana	Absensi	Mengecek jumlah hadir & undangan serta absen ketika awal rapat	2022
---	---	------------------	------	------	---	-------------------------------------	---	---	------------	---------	--	------

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PEMANTAUAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Kegiatan Monitoring Hibah Dalam/Luar Negeri

Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Penerimaan Hibah

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
1.	Anggota tim belum memahami secara keseluruhan terkait pengusulan, pelaksanaan, dan hibah dalam/luar negeri	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai Hibah	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Diskusi ringan untuk sharing pengetahuan, pengalaman dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Diskusi ringan melalui tatap muka atau zoom
2.	Surat Penyampaian usulan dan monitoring Hibah belum sampai ke Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Pengecekan posisi surat keluar	2022	Pengecekan posisi surat keluar

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
3.	Rapat koordinasi pembahasan kegiatan yang didanai Hibah ditunda pelaksanaannya	Sesditjen/Koordinator/Sub Koordinator sibuk/ada penugasan lain yang lebih penting	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Koordinasi yang baik dengan pimpinan maupun pihak terkait, untuk menentukan waktu yang tepat	2022	Koordinasi yang baik dengan pimpinan maupun pihak terkait, untuk menentukan waktu yang tepat
4.	Pelaporan hasil rapat belum disusun	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	2022	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan
5.	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	2022	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim
6.	Dokumen perjanjian hibah belum dibuat	Data pendukung untuk penyusunan rencana PHLN yang dikumpulkan belum lengkap	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	2022	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
7.	Pengiriman Laporan Triwulanan melewati deadline	Terdapat kesalahan pengetikan dari Direktorat/Balai/Kelompok (yang mempengaruhi maksud) dan Kendala jaringan tanda tangan elektronik	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Lebih awal dalam menetapkan batas waktu pengumpulan	2022	'Lebih awal dalam menetapkan batas waktu pengumpulan
8.	Pembahasan dalam penyusunan usulan kegiatan yang didanai Hibah belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan dan risiko usulan yang mungkin muncul di kemudian hari	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Koordinasi langsung untuk hadir dan mengisi form pendapat & masukan	2022	'Koordinasi langsung untuk hadir dan mengisi form pendapat & masukan

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

REALISASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP RTP

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Kegiatan Monitoring Hibah Dalam/Luar Negeri

Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Penerimaan Hibah

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
1.	Anggota tim belum memahami secara keseluruhan terkait pengusulan, pelaksanaan, dan hibah dalam/luar negeri	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diskusi/workshop mengenai Hibah	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Diskusi ringan untuk sharing pengetahuan, pengalaman dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	WA Group, tatap muka, dan zoom	Sharing pengetahuan secara mandiri	WA Group, tatap muka
2.	Surat Penyampaian usulan dan monitoring Hibah belum sampai ke Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Pengecekan posisi surat keluar	2022	Mengecek posisi surat keluar	WA Group	Mengecek posisi surat keluar	WA Group

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
3.	Rapat koordinasi pembahasan kegiatan yang didanai Hibah ditunda pelaksanaannya	Sesditjen/Koordinator/Su b Koordinator sibuk/ada penugasan lain yang lebih penting	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Koordinasi yang baik dengan pimpinan maupun pihak terkait, untuk menentukan waktu yang tepat	2022	Melakukan pengecekan kegiatan kedinasan pimpinan	WA Group	Melakukan pengecekan kegiatan kedinasan pimpinan	WA Group
4.	Pelaporan hasil rapat belum disusun	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA
5.	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Kelompok	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	2022	Penegasan pengumpulan data pendukung	Drive khusus dan WA	Penegasan pengumpulan data pendukung	WA

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
6.	Dokumen perjanjian hibah belum dibuat	Data pendukung untuk penyusunan rencana hibah yang dikumpulkan belum lengkap	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group
7.	Pengiriman Laporan Triwulanan melewati deadline	Terdapat kesalahan pengetikan dari Direktorat/Balai/Kelompok (yang mempengaruhi maksud) dan Kendala jaringan tanda tangan elektronik	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Lebih awal dalam menetapkan batas waktu pengumpulan	2022	Penegasan pada anggota untuk menyelesaikan laporan	Drive khusus dan WA Group	Penegasan pada anggota untuk menyelesaikan laporan	Drive khusus dan WA Group

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
8.	Pembahasan dalam penyusunan usulan kegiatan yang didanai Hibah belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan dan risiko usulan yang mungkin muncul di kemudian hari	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Koordinasi langsung untuk hadir dan mengisi form pendapat & masukan	2022	Form online dan print out	WA Group dan mempersilahkan langsung	Mempersilahkan langsung	WA Group dan mempersilahkan langsung

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

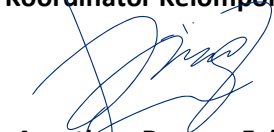
PEMANTAUAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana
Kegiatan : Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
1.	Anggota tim belum memahami/kompeten dalam menyusun rencana pinjaman dalam dan luar negeri	Anggota tim belum mendapatkan sosialisasi/bimbingan teknis maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring pinjaman dalam dan luar negeri	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/bimtek maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring kegiatan pinjaman dalam dan luar negeri	2022	Pengusulan pengikutsertaan anggota pada sosialisasi/bimbingan teknis maupun diklat mendatang terkait penyusunan dan monitoring pinjaman dalam dan luar negeri
2.	Usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh direktorat teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	membuat group WA dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	2022	Surat permintaan data serta reminder berkala pada PIC untuk pengumpulan data pendukung

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
3.	Dokumen data dukung usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri tidak lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	melakukan pembahasan dokumen data dukung kegiatan untuk memastikan dokumen sudah siap, benar, dan lengkap	2022	Pelaksanaan pembahasan dokumen data dukung kegiatan
4.	Rapat finalisasi usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	2022	Koordinasi dengan ajudan/sespri pimpinan terkait jadwal pimpinan serta mengingatkan ajudan/sespri H-1 acara
5.	Laporan triwulanan kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh satker terkait	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	membuat group wa dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	2022	Surat permintaan serta reminder berkala pada PIC untuk penyampaian laporan triwulanan

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang Fajar S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

REALISASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP RTP

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana
Kegiatan : Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
1.	Anggota tim belum memahami/kompeten dalam menyusun rencana pinjaman dalam dan luar negeri	Anggota tim belum mendapatkan sosialisasi/bimbingan teknis maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring pinjaman dalam dan luar negeri	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/bimtek maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring kegiatan pinjaman dalam dan luar negeri	2022	mengikutsertakan dalam bimtek, diklat maupun sosialisasi	update data pada g-drive	Pengikutsertaan anggota dalam sosialisasi dan bimtek	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp
2.	Usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh direktorat teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	membuat group WA dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	Telah dilakukan Koordinasi dengan satker dan PIC	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
3.	Dokumen data dukung usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri tidak lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	melakukan pembahasan dokumen data dukung kegiatan untuk memastikan dokumen sudah siap, benar, dan lengkap	2022	koordinasi, rapat pembahahasan data dukung usulan kegiatan	WA group	Telah dilakukan Koordinasi denan satker dan PIC	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp
4.	Rapat finalisasi usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	2022	Update agenda pimpinan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat	Google kalender agenda pimpinan dan WA Grup ajudan/sespri	Daftar jadwal pimpinan telah disampaikan oleh ajudan/sespri secara rutin	Komunikasi dengan ajudan/sespri

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
5.	Laporan triwulanan kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh satker terkait	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan pinjaman dalam dan luar negeri kurang efektif	membuat group wa dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	Telah dilakukan Koordinasi denan satker dan PIC	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang Fajar S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana
Kegiatan : Pelaksanaan dan Monitoring Kerja Sama Pinjaman Dalam dan Luar Negeri
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Pemantauan
			Kemungkinan	Dampak								
1.	Anggota tim belum memahami /kompeten dalam menyusun rencana pinjaman dalam dan luar negeri	Kelompok Rencana	2,20	3,40	Mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/bimtek maupun diklat terkait penyusunan dan monitoring kegiatan pinjaman dalam dan luar negeri	Komunikasi dengan anggota tim	Telah terdapat dropbox berisi informasimengenalai pinjaman dan dapat diakses oleh seluruh tim	3	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat meningkatkan pemahan anggota tim terkait pinjaman dalam dan luar negeri sehingga rencana pemanfaatan pinjaman efektif	-	-

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Pemantauan
			Kemungkinan	Dampak								
2.	Usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh direktorat teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kelompok Rencana	3,00	2,30	Membuat group wa dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	Menghubungi PIC Dit. Teknis terkait	Telah disampaikan reminder secara rutin	2	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses pengusulan dan pelaksanaan pinjaman sehingga rencana pemanfaatan pinjaman efektif	-	-
3.	Dokumen data dukung usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri tidak lengkap	Kelompok Rencana	2,50	2,90	Melakukan pembahasan dokumen data dukung kegiatan untuk memastikan dokumen sudah siap, benar, dan lengkap	Menghubungi PIC Dit. Teknis terkait	Telah disampaikan reminder secara rutin	2	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses pengusulan dan pelaksanaan pinjaman sehingga rencana pemanfaatan pinjaman efektif	-	-

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Pemantauan
			Kemungkinan	Dampak								
4.	Rapat finalisasi usulan kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri ditunda pelaksanaannya	Kelompok Rencana	2,20	2,40	Pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	menghubungi sespri/ajudan pimpinan	telah dilakukan koordinasi dengan ajudan/sespri mengenai jadwal pimpinan	2	1	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses pengusulan dan pelaksanaan pinjaman sehingga rencana pemanfaatan pinjaman efektif	Mengecek agenda pimpinan melalui Google Kalender dan WA Grup informasi pimpinan	2022
5.	Laporan triwulanan kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam dan luar negeri terlambat disampaikan oleh satker terkait	Kelompok Rencana	2,60	2,30	Membuat group wa dengan direktorat teknis pengusul dan melakukan reminder secara berkala	Menghubungi PIC Dit. Teknis terkait	Telah disampaikan reminder secara rutin	2	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses monitoring dan evaluasi pinjaman sehingga rencana pemanfaatan pinjaman efektif	-	-

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang Fajar S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan : 1. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Saat Ini Dan Masa Depan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko awal		Pengendalian Kunci	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Pemantauan yg Dilaksanakan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Pemantauan
			Kemungkinan	Dampak								
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami proses penyusunan RPJM	Kelompok Rencana	2,33	2,44	Diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama lain dan komunikasi antar anggota Tim	Telah dilakukan	3	3	Terlaksana	Rapat Triwulanan	Memastikan kehadiran anggota dalam diskusi ringan	2022
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Kelompok Rencana	2,33	2,67	Mengikuti sosialisasi/diklat/workshop dan diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama	Telah dilakukan	3	3	terlaksana	Rapat Triwulanan	Memastikan kehadiran anggota dalam diskusi ringan	2022

					lain dan komunikasi antar anggota Tim							
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan penyusunan RPJM kurang memadai	Kelompok Rencana	2,11	2,44	Menyesuaikan kegiatan penyusunan RPJM dengan ketersediaan dana namun tetap memperhatikan kualitas hasil	Telah dilakukan	2	2	terlaksana	Rapat awal Tim Penyusun RPJM	Memastikan partisipasi aktif tim penyusun RPJM dalam penyesuaian kegiatan dengan ketersediaan dana pada rapat awal	2022
4	Dokumen RPJM belum dikirim Setjen Kemenhub	Kelompok Rencana	2,00	2,33	koordinasi langsung	telah dilakukan koordinasi langsung	3	3	terlaksana	Rapat awal Tim Penyusun RPJM	Memastikan partisipasi aktif tim penyusun RPJM dalam penyesuaian kegiatan dengan ketersediaan dana	2022

											pada rapat awal	
5	Beberapa Data pendukung (Usulan RPJM dari Direktorat/Balai) belum ada	Kelompok Rencana	2,56	2,56	mengoptimalkan penggunaan drive khusus dengan batas waktu upload	telah dilakukan penggunaan drive khusus	2	3	terlaksana	Check List data dukung oleh pimpinan tim	Check List data dukung oleh pimpinan tim dan pengecekan drive berkala	2022
6	Pelaksanaan rapat pembahasan RPJM ditunda	Kelompok Rencana	2,44	2,44	koordinasi langsung	telah dilakukan koordinasi langsung	3	3	terlaksana	Menghubungi pihak terkait	Koordinasi lebih awal	2022
7	Pembahasan dalam penyusunan RPJM belum menampung semua pendapat	Kelompok Rencana	2,33	2,44	menyediakan google form atau kolom penyampaian pendapat (sebelum diskusi dimulai atau bersamaan dengan absen)	Telah dilakukan google form untuk absensi	2	2	Terlaksana untuk memantau kehadiran	mempersilahkan peserta rapat	Menyediakan form penyampaian pendapat sebelum rapat	2022

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danang', with a stylized flourish at the end.

Agustinus Danang F. S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PEMANTAUAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan : 1. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJM yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Saat Ini Dan Masa Depan

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
1.	Anggota tim sebagian besar belum memahami proses penyusunan RPJM	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan RPJM	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama lain dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Diskusi ringan melalui tatap muka atau zoom
2.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai penyusunan RPJM	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Mengikuti Sosialisasi/diklat/workshop dan diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama lain dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Diskusi ringan melalui tatap muka atau zoom

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
3.	Jumlah anggaran untuk kegiatan penyusunan RPJM kurang memadai	Ada pemotongan/penghematan anggaran	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Menyesuaikan kegiatan penyusunan RPJM dengan ketersediaan dana namun tetap memperhatikan kualitas hasil	2022	-
4.	Dokumen RPJM belum dikirim Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'koordinasi langsung	2022	Koordinasi langsung
5.	Beberapa Data pendukung (Usulan RPJM dari Direktorat/Balai) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'mengoptimalkan penggunaan drive khusus dengan batas waktu upload	2022	Menggunakan drive
6.	Pelaksanaan rapat pembahasan RPJM ditunda	Pimpinan ada penugasan lain yang lebih penting	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'koordinasi langsung	2022	'koordinasi langsung

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
7.	Pembahasan dalam penyusunan RPJM belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan RPJM	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'menyediakan google form atau kolom penyampaian pendapat (sebelum diskusi dimulai atau bersamaan dengan absen)	2022	-

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

REALISASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP RTP

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Kegiatan Monitoring Hibah Luar Negeri

Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Penerimaan Hibah

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
1.	Anggota tim sebagian besar belum memahami proses penyusunan RPJM	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan RPJM	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama lain dan komunikasi antar anggota Tim	2022	Sosialisasi, Diklat, Workshop, Sharing pengetahuan secara mandiri	WA grup, tatap muka atau zoom	Sharing pengetahuan secara mandiri	WA Group, tatap muka
2.	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJM	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop mengenai penyusunan RPJM	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'Mengikuti Sosialisasi/diklat/workshop dan diskusi ringan (tatap muka atau via zoom) untuk memastikan pemahaman satu sama lain dan	2022	Sosialisasi, Diklat, Workshop, Sharing pengetahuan secara mandiri	WA grup, tatap muka atau zoom	Sharing pengetahuan secara mandiri	WA Group, tatap muka

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
				komunikasi antar anggota Tim					
3.	Jumlah anggaran untuk kegiatan penyusunan RPJM kurang memadai	Ada pemotongan /penghematan anggaran	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	Menyesuaikan kegiatan penyusunan RPJM dengan ketersediaan dana namun tetap memperhatikan kualitas hasil	2022	ND, Surat, Rapat, WA, Email, Tlp, Drive	Mengkomunikasikan usulan kebutuhan secara aktif	-	-
4.	Dokumen RPJM belum dikirim Setjen Kemenhub	Anggota tim sibuk/lupa membuat surat penyampaian rapat monitoring	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'koordinasi langsung	2022	ND, Surat, Rapat, WA, Email, Tlp, Koordinasi langsung dengan pihak terkait	WA dan Tlp	WA, Email, Tlp, Koordinasi langsung dengan pihak terkait	WA

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
5.	Beberapa Data pendukung (Usulan RPJM dari Direktorat/Balai) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'mengoptimalkan penggunaan drive khusus dengan batas waktu upload	2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA Group	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	WA
6.	Pelaksanaan rapat pembahasan RPJM ditunda	Pimpinan ada penugasan lain yang lebih penting	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'koordinasi langsung	2022	Mengecek jadwal pimpinan	Koordinasi	Mengecek jadwal pimpinan	koordinasi

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
7.	Pembahasan dalam penyusunan RPJM belum menampung semua pendapat	Beberapa anggota tim tidak hadir atau tidak memberikan masukan terhadap kekurangan RPJM	Rencana pemanfaatan penerimaan hibah kurang efektif	'menyediakan google form atau kolom penyampaian pendapat (sebelum diskusi dimulai atau bersamaan dengan absen)	2022	Koordinasi langsung dengan pihak terkait	Mempersilahkan langsung	Koordinasi langsung dengan pihak terkait	Mempersilahkan langsung

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana



Agustinus Danang F. S.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PEMANTAUAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian

Tujuan :

1. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJP	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/bimtek maupun diklat terkait penyusunan RPJP	2022	Pengusulan pengikutsertaan anggota pada sosialisasi/bimbingan teknis maupun diklat mendatang terkait penyusunan rencana pembangunan jangka panjang

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
2	Rapat koordinasi/konsinyering ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	2022	Koordinasi dengan ajudan/sespri pimpinan terkait jadwal pimpinan serta mengingatkan ajudan/sespri H-1 acara
3	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota	Membuat group WA dengan Direktorat/Balai/Bagian dan melakukan reminder secara berkala	2022	Surat permintaan data serta reminder berkala pada PIC unntuk pengumpulan data pendukung

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
			pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu			
4	Tim tidak dapat melakukan analisa data indikasi pembangunan	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Membuat group WA dengan Direktorat/Balai/Bagian dan melakukan reminder secara berkala	2022	Surat permintaan data serta reminder berkala pada PIC unntuk pengumpulan data pendukung

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Realisasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
5	Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian ditunda pelaksanaannya	Jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi RPJP kurang memadai	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Mengusulkan revisi dokumen anggaran	2022	Revisi dokumen anggaran

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang Fajar S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

REALISASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP RTP

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian

Tujuan :

1. Menghasilkan *Rolling Plan* yang Menjadi Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan *Rolling Plan* yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan *Rolling Plan* yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam penyusunan RPJP	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi /bimtek maupun diklat terkait penyusunan RPJP	2022	mengikutsertakan dalam bimtek, diklat maupun sosialisasi	update data pada g-drive	Pengikutsertaan anggota dalam sosialisasi dan bimtek	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp untuk sharing informasi

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
2	Rapat koordinasi/konsinyering ditunda pelaksanaannya	Pimpinan rapat ada penugasan lain	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	2022	Update agenda pimpinan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat	Google kalender agenda pimpinan dan WA Grup ajudan/sespri	Daftar jadwal pimpinan telah disampaikan oleh ajudan/sespri secara rutin	Komunikasi dengan ajudan/sespri
3	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data kinerja	Data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota	Membuat group WA dengan Direktorat/Balai/Bagian dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	Telah dilakukan Koordinasi dengan satker dan PIC	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
			pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu						
4	Tim tidak dapat melakukan analisa data indikasi pembangunan	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai/Bagian	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu	Membuat group WA dengan Direktorat/Balai/Bagian dan melakukan reminder secara berkala	2022	reminder secara berkala	WA group, google kalender	Telah dilakukan Koordinasi dengan satker dan PIC	Komunikasi dan koordinasi melalui whatsapp
5	Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian ditunda pelaksanaannya	Jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi RPJP kurang memadai	RPJP tidak dapat dijadikan landasan hukum atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan perkeretaapian nasional, menjadi rujukan dalam pengembangan	Mengusulkan revisi dokumen anggaran	2022	usulan revisi dokumen anggaran	Surat usulan	Revisi dokumen anggaran kegiatan	Surat usulan revisi dokumen anggaran

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Rencana Waktu	Rencana Perbaikan		Realisasi Perbaikan	
						Informasi	Komunikasi	Informasi	Komunikasi
			perkeretaapian provinsi dan kabupaten/kota pada saat ini dan masa depan dan tidak tepat waktu						

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Darang Fajar S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Rencana

Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian

Tujuan :

1. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Landasan Hukum atau Dasar Dalam Pelaksanaan Kebijakan
2. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Strategi dan Program Pembangunan Perkeretaapian Nasional
3. Menghasilkan RPJP yang Menjadi Rujukan Dalam Pengembangan Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat ini dan masa depan

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Pemantauan
			Kemungkinan	Dampak								
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/kompeten dalam penyusunan RPJP	Kelompok Rencana	2,30	2,70	Mengikutkan anggota tim dalam sosialisasi/ bimtek maupun diklat terkait penyusunan RPJP	Komunikasi dengan anggota tim	Telah terdapat dropbox berisi informasimengenai RPJP dan dapat diakses oleh seluruh tim	3	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses penyusuna RPJP sehingga rencana pemanfaatan RPJP efektif	-	-
2	Rapat koordinasi/konsinyering ditunda pelaksanaannya	Kelompok Rencana	1,90	2,70	Pemberitahuan awal dan pengecekan jadwal pimpinan	menghubungi sespri/ajudan pimpinan	Telah dilakukan koordinasi dengan ajudan/sespri mengenai jadwal pimpinan	2	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses penyusuna RPJP sehingga rencana	Mengecek agenda pimpinan melalui Google Kalender dan WA Grup informasi	2022

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Peman-tauan
			Kemungkinan	Dampak								
										pemanfaatan RPJP efektif	pimpinan	
3	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/ mengolah data kinerja	Kelompok Rencana	2,00	2,60	Membuat group WA dengan Direktorat/Balai/ Bagian dan melakukan reminder secara berkala	Menghubungi PIC Dit. Teknis terkait	Telah disampaikan reminder secara rutin	3	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses penyusuna RPJP sehingga rencana pemanfaatan RPJP efektif	-	-
4	Tim tidak dapat melakukan analisa data indikasi pembangunan	Kelompok Rencana	2,00	3,20	Membuat group WA dengan Direktorat/Balai/ Bagian dan melakukan reminder secara berkala	Menghubungi PIC Dit. Teknis terkait	Telah disampaikan reminder secara rutin	3	2	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses penyusuna RPJP sehingga rencana pemanfaatan RPJP efektif	-	-

No	Uraian Risiko Kunci	Pemilik Risiko	Risiko Awal		Pengendalian Kunci	Pemantauan yg dilaksanakan	Hasil Pemantauan	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Kesimpulan	Perbaikan Pemantauan	Waktu Peman-tauan
			Kemungkinan	Dampak								
5	Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sektor Perkeretaapian ditunda pelaksanaannya	Kelompok Rencana	2,00	2,40	Mengusulkan revisi dokumen anggaran	Koordinasi dengan satker	Koordinasi dengan satker	1	1	Kegiatan pemantauan dan pengendalian dapat memperlancar proses penyebaran informasi mengenai RPJP sehingga rencana pemanfaatan RPJP efektif	Inventaris sisa anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Rencana

Agustinus Danang Fajar S.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850509 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Alokasi Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Alokasi yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Alokasi yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Alokasi Anggaran belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Alokasi Anggaran	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran	Sub Koordinator Kelompok Program	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Sub Koordinator Kelompok Program	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu
6.	Penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran belum terdokumentasikan dengan baik	Sub Koordinator Kelompok Program	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Alokasi Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Alokasi yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Alokasi yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Alokasi Anggaran belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal	12,96	1
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Alokasi Anggaran	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	12,16	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	5,20	5
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu	5,28	4
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu	3,96	6
6.	Penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran belum terdokumentasikan dengan baik	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	7,28	3

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Alokasi Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
Tujuan Kegiatan :
1. Menghasilkan RKA Pagu Alokasi yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Alokasi yang tepat waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Alokasi Anggaran belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Nov 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Permintaan resmi	Nov 2022	Monitoring dan Koordinasi dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK Tim Penyusun RKA	Nov 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Alokasi Anggaran	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Nov 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Permintaan resmi	Nov 2022	Monitoring dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian untuk pemenuhan SDM dan kesempatan diklat peningkatan kualitas SDM	Nov 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Pembuatan sistem monitoring/pemantauan secara online dan realtime	Nov 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Permintaan resmi	Nov 2022	Mengecek dokumen pendukung dan berkoordinasi intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai terkait data yang ada	Nov 2022
4	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Nov 2022	Pengusulan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Permintaan resmi	Nov 2022	Kegiatan dilaksanakan efektif dan efisien	Nov 2022
6	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan	Nov 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pemenuhan data pendukung	Permintaan resmi dan informal	Nov 2022	Monitoring dan Koordinasi dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK Tim Penyusun RKA	Nov 2022
3	Penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran belum	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Penyampaian konsep SK TIM kepada	Nov 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai	Permintaan resmi	Nov 2022	Monitoring dan Koordinasi dengan Direktorat Teknis	Nov 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	terdokumentasikan dengan baik		Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian		di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun			dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK Tim Penyusun RKA	

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program



Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Anggaran yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Anggaran yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Anggaran belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Anggaran	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Anggaran	Sub Koordinator Kelompok Program	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Anggaran terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Sub Koordinator Kelompok Program	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu
6.	Penyusunan RKA Pagu Anggaran belum terdokumentasikan dengan baik	Sub Koordinator Kelompok Program	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Anggaran yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Anggaran yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Anggaran belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal	12,96	1
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Anggaran	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	12,16	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Anggaran	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	5,20	5
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Anggaran terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu	5,28	4
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu	3,96	6
6.	Penyusunan RKA Pagu Anggaran belum terdokumentasikan dengan baik	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	6,00	3

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
Tujuan Kegiatan :
1. Menghasilkan RKA Pagu Anggaran yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Anggaran yang tepat waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Anggaran belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Juni 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Permintaan resmi	Juni 2022	Monitoring dan Koordinasi dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK Tim Penyusun RKA	Juni 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Anggaran	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Juni 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Permintaan resmi	Juni 2022	Monitoring dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian untuk pemenuhan SDM dan kesempatan diklat peningkatan kualitas SDM	Juni 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Anggaran	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Pembuatan sistem monitoring/pe mantauan secara online dan realtime	Juni 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Permintaan resmi	Juni 2022	Mengecek dokumen pendukung dan berkoordinasi intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai terkait data yang ada	Juni 2022
4	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Anggaran terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Juni 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pemenuhan data pendukung	Permintaan resmi	Juni 2022	Kegiatan dilaksanakan efektif dan efisien	Juni 2022
6	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan	Juni 2022	Koordinasi dengan Pemda dan BPN terkait untuk upaya percepatan pengadaan lahan sehingga konstruksi dapat berjalan	Permintaan resmi dan informal	Juni 2022	Monitoring pemenuhan data dukung usulan kegiatan RKA sesuai Readness criteria	Juni 2022
3	Penyusunan RKA Pagu Anggaran belum	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Penyiapan data pendukung berupa	Juni 2022	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Pustikomhub	Permintaan resmi	Juni 2022	Monitoring pembuatan aplikasi dan pemenuhan	Juni 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	terdokumentasikan dengan baik		softcopy yang telah mendapat persetujuan		untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi			data pendukung berupa softcopy	

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Indikatif yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Indikatif yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Indikatif belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Indikatif	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Indikatif	Sub Koordinator Kelompok Program	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Indikatif terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Sub Koordinator Kelompok Program	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu
6.	Penyusunan RKA Pagu Indikatif belum terdokumentasikan dengan baik	Sub Koordinator Kelompok Program	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Indikatif yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Indikatif yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Indikatif belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal	12,96	1
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Indikatif	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	12,16	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Indikatif	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	5,20	5
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Indikatif terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu	5,28	3
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu	3,96	6
6.	Penyusunan RKA Pagu Indikatif belum terdokumentasikan dengan baik	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	5,28	3

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan RKA Pagu Indikatif yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Indikatif yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Indikatif belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Mei 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Konfirmasi Informal	Mei/ Juni 2022	Mengecek melalui E Planning	Mei/ Juni 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Indikatif	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Mei 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Konfirmasi Informal	Mei/ Juni 2022	Melakukan Bimtek terkait penyusunan RKA	Mei/ Juni 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Indikatif	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Pembuatan sistem monitoring/pemantauan secara online dan realtime	Mei 2022	Pengusulan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Bersurat	Mei/ Juni 2022	Mengecek melalui E Planning	Mei/ Juni 2022
3	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Indikatif terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Mei 2022	Koordinasi Intensif dengan Balai/satker diLingkungan Direktorta Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Konfirmasi Informal dan Bersurat	Mei/ Juni 2022	Mengusulkan kegiatan berdasarkan prioritas	Mei/ Juni 2022
6	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan	Mei 2022	Koordinasi dengan Pemda dan BPN terkait untuk upaya percepatan pengadaan lahan sehingga konstruksi dapat berjalan	Bersurat	Mei/ Juni 2022	Pemenuhan data dukung usulan kegiatan RKA sesuai Readness criteria	Mei/ Juni 2022
3	Penyusunan RKA Pagu Indikatif belum terdokumentasikan dengan baik	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Penyiapan data pendukung berupa softcopy yang	Mei 2022	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Pustikomhub untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi	Permintaan resmi	Mei/ Juni 2022	Monitoring pembuatan aplikasi dan pemenuhan data	Mei/ Juni 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
			telah mendapat persetujuan					pendukung berupa softcopy	

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program



Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Kebutuhan yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Kebutuhan yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Kebutuhan belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Kebutuhan	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Kebutuhan	Sub Koordinator Kelompok Program	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Kebutuhan terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Sub Koordinator Kelompok Program	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu
6.	Penyusunan RKA Pagu Kebutuhan belum terdokumentasikan dengan baik	Sub Koordinator Kelompok Program	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKA Pagu Kebutuhan yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKA Pagu Kebutuhan yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Kebutuhan belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal	12,96	1
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Kebutuhan	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	12,16	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Kebutuhan	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	5,20	5
4.	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Kebutuhan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKA-KL tidak tepat waktu	5,28	4
5.	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	RKA-KL tidak tepat waktu	3,96	6
6.	Penyusunan RKA Pagu Kebutuhan belum terdokumentasikan dengan baik	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	5,60	3

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pagu Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** :
1. Menghasilkan RKA Pagu Kebutuhan yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Menghasilkan RKA Pagu Kebutuhan yang tepat waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pelaksanaan tugas penyusunan RKA pagu Kebutuhan belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKA belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Januari 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Permintaan resmi	Januari 2022	Mengecek melalui E-Planning	Januari 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKA pagu Kebutuhan	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan / teknis	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Januari 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Permintaan resmi	Januari 2022	Melakukan Bimtek terkait penyusunan RKA	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKA Pagu Kebutuhan	Belum tersusunnya / update nya Standard Biaya dan referensi terkait lainnya	Pembuatan sistem monitoring/pemantauan secara online dan realtime	Januari 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Permintaan resmi	Januari 2022	Mengecek melalui E-Planning	Januari 2022
4	Alokasi anggaran penyusunan RKA Pagu Kebutuhan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Januari 2022	Pengusulan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Permintaan resmi	Januari 2022	Mengusulkan kegiatan berdasarkan prioritas	Januari 2022
6	Blokir atau Catatan Halaman IV DIPA	Keterlambatan/kekurangan penyampaian data dukung	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan	Januari 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pemenuhan data pendukung	Permintaan resmi dan informal	Januari 2022	Pemenuhan data dukung usulan kegiatan RKA sesuai Readness criteria	Januari 2022
3	Penyusunan RKA Pagu Kebutuhan belum terdokumentasikan dengan baik	Penyusunan RKA Pagu kebutuhan belum melalui aplikasi e-planning	Penyiapan data pendukung berupa softcopy yang telah mendapat persetujuan	Januari 2022	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Pustikomhub untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi	Permintaan resmi	Januari 2022	Monitoring pembuatan aplikasi dan pemenuhan data pendukung	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
								berupa softcopy	

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RENJA yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RENJA yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RENJA belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RENJA belum dibuat	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RENJA	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RENJA	Sub Koordinator Kelompok Program	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	RENJA tidak tepat waktu
4.	Alokasi anggaran RENJA kegiatan terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RENJA tidak tepat waktu
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat/konferensi pengumpulan atau penyusunan RENJA	Sub Koordinator Kelompok Program	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	RENJA tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RENJA yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RENJA yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RENJA belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RENJA belum dibuat	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	12,96	1
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RENJA	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Efisiensi dan efektifitas penyusunan belum optimal	12,92	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RENJA	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	RENJA tidak tepat waktu	6,16	4
4.	Alokasi anggaran RENJA kegiatan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RENJA tidak tepat waktu	6,24	3
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat/konferensi pengumpulan atau penyusunan RENJA	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	RENJA tidak tepat waktu	5,72	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Kelompok Program

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan RENJA yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RENJA yang tepat waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pelaksanaan tugas penyusunan RENJA belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RENJA belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Mei 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Permintaan resmi untuk penugasan personil Direktorat Teknis dan Balai	Mei 2022	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Mei 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RENJA	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kebutuhan diklat peningkatan kualitas SDM	Mei 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Permintaan resmi	Mei 2022	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kebutuhan diklat peningkatan kualitas SDM	Mei 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
4	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RENJA	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Pengumpulan dokumen terkait untuk penyusunan RENJA Ditjen Perkeretaapian	Mei 2022	Koordinasi dengan para Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Permintaan resmi	Mei 2022	Pengumpulan dokumen terkait untuk penyusunan RENJA Ditjen Perkeretaapian	Mei 2022
3	Alokasi anggaran RENJA kegiatan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Mei 2022	Pengusulan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Permintaan resmi	Mei 2022	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Mei 2022
5	Tertundanya pelaksanaan rapat/konisyering pengumpulan atau penyusunan RENJA	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan	Mei 2022	Koordinasi dengan Direktorat serta Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait untuk upaya percepatan data dukung	Permintaan resmi dan informal	Mei 2022	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan	Mei 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** :
1. Menghasilkan RKT Ditjen yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKT Ditjen yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKT Ditjen belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKT Ditjen belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKT Ditjen	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Standarisasi kualitas dokumen belum maksimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKT Ditjen	Sub Koordinator Kelompok Program	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Dokumen yang dihasilkan belum maksimal dalam mendukung kinerja Tupoksi
4.	Alokasi anggaran RKT Ditjen kegiatan terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKT Ditjen tidak tepat waktu
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat/konferensi pengumpulan atau penyusunan RKT Ditjen	Sub Koordinator Kelompok Program	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	RKT Ditjen tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKT Ditjen yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKT Ditjen yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKT Ditjen belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKT Ditjen belum dibuat	Target kinerja per masing-masing Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian belum optimal	6,75	4
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKT Ditjen	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Standarisasi kualitas dokumen belum maksimal	8,13	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKT Ditjen	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Dokumen yang dihasilkan belum maksimal dalam mendukung kinerja Tupoksi	7,50	3
4.	Alokasi anggaran RKT Ditjen kegiatan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKT Ditjen tidak tepat waktu	8,25	1
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat/konferensi pengumpulan atau penyusunan RKT Ditjen	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	RKT Ditjen tidak tepat waktu	6,00	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Kelompok Program

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2022

Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan RKT Ditjen yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKT Ditjen yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
4	Pelaksanaan tugas penyusunan RKT Ditjen belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyusunan RKT Ditjen belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Januari 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Konfirmasi Informal	Januari 2022	Koordinasi dengan Bagian di Lingkungan Sekditjen Perkeretaapian dalam pembuatan SK Tim Penyusun RKT	Januari 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKT Ditjen	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kebutuhan diklat	Januari 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian	Konfirmasi Informal	Januari 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai dan berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
			peningkatan kualitas SDM		terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan			penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	
3	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKT Ditjen	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Pengumpulan dokumen terkait untuk penyusunan RKT Ditjen Perkeretaapian	Januari 2022	Pengusulan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Konfirmasi Informal	Januari 2022	Mengecek melalui RENSTRA dan berkoordinasi intensif dengan bagian di Lingkungan Sekditjen Perkeretaapian terkait data yang ada	Januari 2022
1	Alokasi anggaran RKT Ditjen kegiatan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Januari 2022	Koordinasi dengan Direktorat serta Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait untuk upaya percepatan data dukung	Konfirmasi Informal dan Bersurat	Januari 2022	Mengusulkan kegiatan berdasarkan prioritas	Januari 2022
5	Tertundanya pelaksanaan rapat/konsiyering pengumpulan atau	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif	Januari 2022	Koordinasi dengan Direktorat serta Balai di	Bersurat	Januari 2022	Pemenuhan data dukung usulan kegiatan RKA	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	penyusunan RKT Ditjen		dengan pihak terkait dalam percepatan pembangunan		lingkungan Ditjen Perkeretaapian terkait untuk upaya percepatan data dukung			sesuai Readness criteria	

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setditjen Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** :
1. Menghasilkan RKT Setditjen yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKT Setditjen yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKT Setditjen belum optimal	Sub Koordinator Kelompok Program	SK TIM yang melibatkan antar Bagian untuk penyusunan RKT Setditjen belum dibuat	Target kinerja per masing-masing bagian belum optimal
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKT Setditjen	Sub Koordinator Kelompok Program	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Standarisasi kualitas dokumen belum maksimal
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKT Setditjen	Sub Koordinator Kelompok Program	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Dokumen yang dihasilkan belum maksimal dalam mendukung kinerja Tupoksi
4.	Alokasi anggaran RKT Setditjen kegiatan terbatas	Sub Koordinator Kelompok Program	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKT Setditjen tidak tepat waktu
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat/konsiyering pengumpulan atau penyusunan RKT Setditjen	Sub Koordinator Kelompok Program	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	RKT Setditjen tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Sub Koordinator Kelompok Program
- Kegiatan** : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setditjen Perkeretaapian Tahun 2022
- Tujuan Kegiatan** : 1. Menghasilkan RKT Setditjen yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKT Setditjen yang tepat waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pelaksanaan tugas penyusunan RKT Setditjen belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Bagian untuk penyusunan RKT Setditjen belum dibuat	Target kinerja per masing-masing bagian belum optimal	12,24	1
2.	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKT Setditjen	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Standarisasi kualitas dokumen belum maksimal	10,20	2
3.	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKT Setditjen	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Dokumen yang dihasilkan belum maksimal dalam mendukung kinerja Tupoksi	6,76	3
4.	Alokasi anggaran RKT Setditjen kegiatan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	RKT Setditjen tidak tepat waktu	6,72	4
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat/konisyering pengumpulan atau penyusunan RKT Setditjen	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	RKT Setditjen tidak tepat waktu	5,28	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Kelompok Program

Kegiatan : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setditjen Perkeretaapian Tahun 2022

Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan RKT Setditjen yang Akuntabel/Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menghasilkan RKT Setditjen yang tepat waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pelaksanaan tugas penyusunan RKT Setditjen belum optimal	SK TIM yang melibatkan antar Bagian untuk penyusunan RKT Setditjen belum dibuat	Penyampaian konsep SK TIM kepada Direktorat Teknis serta Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Januari 2022	Koordinasi Intensif dengan Direktorat Teknis dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembuatan SK TIM Penyusun	Permintaan resmi untuk penugasan personil masing-masing Bagian	Januari 2022	Koordinasi dengan para Bagian di Lingkungan Setditjen Perkeretaapian untuk tanggapan	Januari 2022
2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyusunan RKT Setditjen	Moratorium pegawai dan keterbatasan Diklat Perencanaan	Penyampaian surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan kebutuhan diklat peningkatan kualitas SDM	Januari 2022	Penyampaian kebutuhan SDM dan kebutuhan diklat peningkatan kualitas SDM melalui koordinasi dengan Bagian Kepegawaian	Permintaan resmi	Januari 2022	Koordinasi dengan Bagian Kepegawaian untuk pemenuhan SDM dan kesempatan diklat peningkatan kualitas SDM	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Minimnya ketersediaan data dukung referensi dalam penyusunan RKT Setditjen	Acuan dokumen belum maksimal menggambarkan target kinerja	Pengumpulan dokumen terkait untuk penyusunan RKT Setditjen Perkeretaapian	Januari 2022	Koordinasi dengan para Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian	Permintaan resmi	Januari 2022	Mengecek melalui RENSTRA dan berkoordinasi intensif dengan para Bagian di Lingkungan Setditjen Perkeretaapian terkait data yang dibutuhkan	Januari 2022
4	Alokasi anggaran RKT Setditjen kegiatan terbatas	Penghematan/Pemotongan Anggaran	Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Januari 2022	Pengusulan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Permintaan resmi	Januari 2022	Kegiatan dilaksanakan efektif dan efisien	Januari 2022
5	Tertundanya pelaksanaan rapat/konferensi pengumpulan atau penyusunan RKT Setditjen	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Monitoring dan pemantauan secara online serta koordinasi Intensif dengan pihak terkait	Januari 2022	Koordinasi dengan para Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian terkait untuk upaya percepatan	Permintaan resmi dan informal	Januari 2022	Koordinasi dengan para Bagian di Lingkungan Setditjen Perkeretaapian untuk timeline penyusunan RKT	Januari 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Program

Heppy Eka Prasetya

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830224 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan** : Pengelolaan Administrasi Perkantoran/Persuratan pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Aplikasi dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dengan optimal
2. Mempermudah pendistribusian dokumen/persuratan dan terinventaris dengan baik

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Bimbingan teknis/ sosialisasi/workshop tidak dapat dilaksanakan atau tertunda	Sub Koordinator Kelompok EP	Terbatasnya ketersediaan anggaran karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal
2.	Beberapa pimpinan belum mewajibkan pegawai untuk menggunakan portal sebagai sarana pengelolaan administrasi perkantoran/persuratan	Sub Koordinator Kelompok EP	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menggunakan persuratan pada portal sehingga pendistribusian surat masih manual/print surat serta fitur persuratan Portal Aplikasi belum familiar	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik
3.	Dokumen surat tidak dapat dibuka/di download	Sub Koordinator Kelompok EP	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik
4.	Tidak dapat meng- <i>upload</i> atau mengirimkan dokumen surat	Sub Koordinator Kelompok EP	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
5.	Dokumen surat tidak sampai kepada tujuan surat	Sub Koordinator Kelompok EP	Kesalahan pegawai dalam penginputan surat / human error	Pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik
6.	Dokumen surat tidak sampai kepada tujuan surat	Sub Koordinator Kelompok EP	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik
7.	Dokumen surat hilang/tidak dapat diakses	Sub Koordinator Kelompok EP	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda

Selaku Sub Koordinator Kelompok

Evaluasi dan Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
- Kegiatan** : Pengelolaan Administrasi Perkantoran/Persuratan pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Aplikasi dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dengan optimal
2. Mempermudah pendistribusian dokumen/persuratan dan terinventaris dengan baik

	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANK
1.	Dokumen surat tidak dapat dibuka/di download	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik	6,76	1
2.	Dokumen surat tidak sampai kepada tujuan surat	Kesalahan pegawai dalam penginputan surat / human error	Pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik	6,24	2
3.	Dokumen surat tidak sampai kepada tujuan surat	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik	5,76	3
4.	Beberapa pimpinan belum mewajibkan pegawai untuk menggunakan portal sebagai sarana pengelolaan administrasi perkantoran/persuratan	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menggunakan persuratan pada portal sehingga pendistribusian surat masih manual/print surat serta fitur persuratan Portal Aplikasi belum familiar	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik	5,28	4

	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANK
5.	Tidak dapat meng- <i>upload</i> atau mengirimkan dokumen surat	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik	4,40	5
6.	Dokumen surat hilang/tidak dapat diakses	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal, pendistribusian surat terhambat serta surat tidak terinventaris dengan baik	1,96	6
7.	Bimbingan teknis/ sosialisasi/workshop tidak dapat dilaksanakan atau tertunda	Terbatasnya ketersediaan anggaran karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal	1,20	7

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Perkantoran/Persuratan pada Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian

Tujuan : 1. Aplikasi dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dengan optimal
2. Mempermudah pendistribusian dokumen/persuratan dan terinventaris dengan baik

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Dokumen surat tidak dapat dibuka/di download	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Koordinasi dengan programmer untuk maintenance program secara berkala untuk menghilangkan <i>error / bugs</i>	Januari-Desember 2022	Melaksanakan reviu secara periodik antara tim portal dengan programmer setiap bulan	Whats App Group, Helpdesk Portal	Januari-Desember 2022	Mengecek dan menguji progres perbaikan error/bugs program portal yang dikerjakan oleh programmer	Januari-Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
2	Dokumen surat tidak sampai kepada tujuan surat	Kesalahan pegawai dalam penginputan surat / human error	Koordinasi dengan programmer terkait perbaikan fitur Portal agar pegawai yang input dapat edit hasil inputan surat	Maret - Desember 2022	Panduan tata cara penggunaan fitur persuratan Portal secara informatif serta koordinasi secara intensif dengan PIC portal	Video Tutorial, Whats App Group, Helpdesk Portal DJKA	Maret - Desember 2022	Mengecek dan menguji progres perbaikan fitur Portal yang dikerjakan oleh programmer	Januari-Desember 2022
3	Dokumen surat tidak sampai kepada tujuan surat	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Koordinasi dengan programmer untuk <i>maintenance</i> program secara berkala untuk menghilangkan <i>error / bugs</i>	Maret - Desember 2022	Melaksanakan reviu secara periodik antara tim portal dengan programmer setiap bulan	Whats App Group, Helpdesk Portal	Maret - Desember 2022	Mengecek dan menguji progres perbaikan error/bugs program portal yang dikerjakan oleh programmer	Januari-Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
4	Beberapa pimpinan belum mewajibkan pegawai untuk menggunakan portal sebagai sarana pengelolaan administrasi perkantoran/persuratan	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menggunakan persuratan pada portal sehingga pendistribusian surat masih manual/print surat serta fitur persuratan Portal Aplikasi belum familiar	Surat himbauan agar seluruh pegawai menggunakan portal sebagai sarana administrasi perkantoran/persuratan	Juli, Desember 2022	Himbauan aktif penggunaan portal sebagai sarana administrasi perkantoran/persuratan	Nota Dinas, Surat kewajiban pegawai untuk memanfaatkan Portal untuk memproses administrasi persuratan yang ditandatangani oleh pimpinan	Juli, Desember 2022	Mengecek pemanfaatan menu persuratan Portal aplikasi pada menu reporting dan melaporkan kepada pimpinan serta mengadakan reward terkait dengan keaktifan penggunaan Portal Aplikasi	Desember 2022
5	Tidak dapat meng- <i>upload</i> atau mengirimkan dokumen surat	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Pengadaan server Ditjen Perkeretaapian dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan	Januari-Juli 2022	Melaksanakan koordinasi tim portal dengan Pustikom	Whats App Group, Helpdesk Portal	Januari-Juli 2022	Koordinasi secara intensif dengan PIC Pustikom	Januari-Agustus 2022
6	Dokumen surat hilang/tidak dapat diakses	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Melakukan <i>backup</i> data secara periodik ke tempat penyimpanan lain	Juli, Desember 2022	Koordinasi teknis antara tim portal dengan programmer secara berkala	Whats App Group, Helpdesk Portal	Juli, Desember 2022	Koordinasi programmer dengan tim teknis untuk back up data secara otomatis	Agustus, Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
7.	Bimbingan teknis/sosialisasi/workshop tidak dapat dilaksanakan atau tertunda	Terbatasnya ketersediaan anggaran karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19	Pelaksanaan bimbingan teknis secara online (melalui aplikasi zoom meeting dll)	Maret - April 2022	Koordinasi intensif dengan PIC Portal Aplikasi di setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Whats App Group, Bimbingan Teknis online	Januari-Desember 2022	Koordinasi dengan PIC Portal masing-masing unit kerja terkait jadwal pelaksanaan bimtek	Maret - April 2022

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tujuan : 1. Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan aktual

N O	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Evaluasi dan persetujuan konsep artikel/data/informasi tertunda	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sebagai Redaktur	Pimpinan/Redaktur ada kepentingan yang mendesak	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual
2.	Konten belum terpublikasi di website	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sebagai Redaktur	Sebagian besar Pranata Komputer baru belum memahami cara untuk mempublikasikan konten website	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual
3.	Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak dapat diakses	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sebagai Redaktur	Server Ditjen Perkeretaapian down	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual
4.	Rapat koordinasi pengelolaan website tertunda	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sebagai Redaktur	Terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19	Publikasi konten website tidak dapat dipertanggungjawabkan
5.	Konsep SK Tim Pengelola Website terlambat disetujui Pimpinan	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sebagai Redaktur	Pimpinan tidak selalu berada ditempat	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual serta tidak dapat dipertanggungjawabkan

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : 1. Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan aktual

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Evaluasi dan persetujuan konsep artikel/data/informasi tertunda	Pimpinan/Redaktur ada kepentingan yang mendesak	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual	6,70	1
2.	Konten belum terpublikasi di website	Sebagian besar Pranata Komputer baru belum memahami cara untuk mempublikasikan konten website	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual	6,29	2
3.	Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak dapat diakses	Server Ditjen Perkeretaapian <i>down</i>	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual	4,50	3
4.	Rapat koordinasi pengelolaan website tertunda	Terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19	Publikasi konten website tidak dapat dipertanggung jawabkan	1,79	4
5.	Konsep SK Tim Pengelola Website terlambat disetujui Pimpinan	Pimpinan tidak selalu berada ditempat	Publikasi konten website tidak dilaksanakan secara cepat dan aktual serta tidak dapat dipertanggungjawabkan	1,93	5

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : 1. Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan aktual

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Evaluasi dan persetujuan konsep artikel/data/informasi tertunda	Pimpinan/Redaktur ada kepentingan yang mendesak	Memberikan notifikasi kepada Tim Redaktur lainnya agar menyetujui konsep artikel/data/informasi pada <i>backend</i> website DJKA	Januari s.d Desember 2022	Rekap jumlah konsep artikel/data/informasi yang belum disetujui	Whats App	Januari s.d Desember 2022	Mengkoordinasikan secara intensif dengan Tim Redaktur terkait hasil rekap konsep artikel/data/informasi yang belum disetujui	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
2	Konten belum terpublikasi di website	Sebagian besar Pranata Komputer baru belum memahami cara untuk mempublikasikan konten website	Melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan <i>backend</i> website untuk mempublikasikan konten pada website DJKA	Maret 2022	Panduan tata cara penggunaan <i>backend</i> website DJKA secara informatif dan koordinasi dengan PIC website di masing-masing unit kerja	Buku panduan, Whats App Group	Januari s.d Desember 2022	Mengkoordinasikan secara intensif dengan PIC masing-masing unit kerja terkait kesulitan yang dialami	Januari s.d Desember 2022
3	Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak dapat diakses	Server Ditjen Perkeretaapian <i>down</i>	Melakukan kajian singkat dan justifikasi kebutuhan pengadaan server dan bersurat ke Pustikom	Februari 2022	Kajian singkat dan justifikasi kebutuhan pengadaan server	Portal djka (portal.djka.dephub.go.id), Whats App	Januari 2022	Mengkoordinasikan dan konsultasi terkait kajian singkat dan justifikasi dengan Programmer, Pustikomhub, DJA dan Menpan	Januari 2022
4	Rapat koordinasi pengelolaan website tertunda	Terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19	Melakukan rapat secara daring melalui aplikasi Zoom	Maret 2022	Notifikasi pada portal .djka.dephub.go.id terkait agenda rapat	Nota Dinas, Surat, Rapat koordinasi	Februari 2022	Membuat notifikasi pada portal.djka.dephub.go.id 3 hari sebelum rapat dimulai	Februari 2022
5.	Konsep SK Tim Pengelola	Pimpinan tidak selalu berada	Mengajukan konsep SK	Januari 2022	Notifikasi pada tte.djka.dephub.	Tandatangan elektronik	Maret 2022	Membuat notifikasi pada	Maret 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	Website terlambat disetujui Pimpinan	ditempat	melalui portal.djka.dephub.go.id agar dapat ditandatangani secara elektornik (TTE)		go.id terkait dokumen yang perlu disetujui	pada tte.djka.dephub.go.id		tte.djka.dephub.go.id terkait dokumen yang perlu disetujui dan melakukan komunikasi melalui Whats App	

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan : Pengelolaan Media Penyimpanan Dokumen Melalui Menu D-Drive pada Portal Aplikasi

Tujuan : 1. Menu D-Drive mudah diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai secara optimal
2. Menu D-Drive menyimpan dokumen kantor secara terpusat dan aman

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Bimbingan teknis/sosialisasi/workshop tidak dapat dilaksanakan atau tertunda	Sub Koordinator Kelompok EP	Terbatasnya ketersediaan anggaran karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal dan pegawai tidak memahami tata cara penggunaan menu D-Drive
2.	Menu D-Drive tidak <i>user friendly</i>	Sub Koordinator Kelompok EP	Fitur menu D-Drive pada Portal Aplikasi tidak se-fleksibel google drive	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal
3.	Pimpinan belum mewajibkan pegawai untuk penyimpanan secara digital/ <i>cloud</i>	Sub Koordinator Kelompok EP	Kurangnya kesadaran pegawai untuk manajemen/inventarisasi dokumen kantor pada menu D-Drive sehingga Pegawai masih menyimpan dokumen pada perangkat kerja/PC/Laptop kantor masing-masing	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal dan dokumen kantor tidak tersimpan terpusat secara aman
4.	Menu D-Drive tidak dapat diakses	Sub Koordinator Kelompok EP	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal
5.	Menu D-Drive tidak dapat diakses	Sub Koordinator Kelompok EP	Beberapa pegawai belum memahami fungsi menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
6.	Tidak dapat <i>upload</i> dokumen kantor di menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Sub Koordinator Kelompok EP	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal dan dokumen kantor tidak tersimpan terpusat secara aman
7.	Dokumen pada D-Drive hilang/tidak dapat dikases	Sub Koordinator Kelompok EP	<i>Human error</i> /kesalahan pengguna karena menghapus dokumen	Dokumen kantor tidak tersimpan terpusat secara aman

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda

Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan : Pengelolaan Media Penyimpanan Dokumen Melalui Menu D-Drive pada Portal Aplikasi

Tujuan : 1. Menu D-Drive mudah diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai secara optimal
2. Menu D-Drive menyimpan dokumen kantor secara terpusat dan aman

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANK
1.	Menu D-Drive tidak dapat diakses	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal	6,72	1
2.	Menu D-Drive tidak <i>user friendly</i>	Fitur menu D-Drive pada Portal Aplikasi tidak se-fleksibel google drive	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal	4,68	2
3.	Tidak dapat upload dokumen kantor di menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal dan dokumen kantor tidak tersimpan terpusat secara aman	4,40	3
4.	Pimpinan belum mewajibkan pegawai untuk penyimpanan secara digital/ <i>cloud</i>	Kurangnya kesadaran pegawai untuk manajemen/inventarisasi dokumen kantor pada menu D-Drive sehingga Pegawai masih menyimpan dokumen pada perangkat kerja/PC/Laptop kantor masing-masing	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal dan dokumen kantor tidak tersimpan terpusat secara aman	3,60	4
5.	Dokumen pada D-Drive hilang/tidak dapat diakses	<i>Human error</i> /kesalahan pengguna karena menghapus dokumen	Dokumen kantor tidak tersimpan terpusat secara aman	2,88	5
6.	Menu D-Drive tidak dapat diakses	Beberapa pegawai belum memahami fungsi menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal	1,96	6

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANK
7.	Bimbingan teknis/sosialisasi/work shop tidak dapat dilaksanakan atau tertunda	Terbatasnya ketersediaan anggaran karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19	Aplikasi tidak dimanfaatkan dengan optimal dan pegawai tidak memahami tata cara penggunaan menu D-Drive	1,44	7

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan



Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan : Pengelolaan Media Penyimpanan Dokumen Melalui Menu D-Drive pada Portal Aplikasi

Tujuan : 1. Menu D-Drive mudah diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai secara optimal
2. Menu D-Drive menyimpan dokumen kantor secara terpusat dan aman

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Menu D-Drive tidak dapat diakses	Adanya kesalahan (error/bugs) pada sistem/program aplikasi	Koordinasi dengan programmer untuk <i>maintenance</i> program secara berkala untuk menghilangkan <i>error / bugs</i>	Maret, Juni, September Desember 2022	Melaksanakan reviu secara periodik antara tim portal dengan programmer setiap bulan	Whats App Group, Helpdesk Portal	Maret, Juni, September, Desember 2022	Mengecek dan menguji progres perbaikan <i>error/bugs</i> program portal yang dikerjakan oleh programmer	Januari - Desember 2022
2.	Menu D-Drive tidak <i>user friendly</i>	Fitur menu D-Drive pada Portal Aplikasi tidak se-fleksibel google drive	Koordinasi dengan programmer agar menu D-Drive dibuat <i>user friendly</i> sehingga mudah digunakan pegawai	Maret-Juli 2022	Menyusun daftar perbaikan dan reviu terkait penyesuaian kebutuhan pegawai kepada tim Portal	Whats App Group, Helpdesk Portal	Maret, Juni, September, Desember 2022	Mengecek dan menguji progres perbaikan tampilan yang dikerjakan oleh programmer	Januari - Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Tidak dapat upload dokumen kantor di menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Server/media penyimpanan Portal Aplikasi penuh	Pengadaan server Ditjen Perkeretaapian dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan	Januari-Juli 2022	Melaksanakan koordinasi antara tim portal dengan Pustikom terkait kebutuhan penyimpanan server	Whats App Group	Januari-Juli 2022	Koordinasi secara intensif dengan PIC Pustikom	Januari-Agustus 2022
4	Pimpinan belum mewajibkan pegawai untuk penyimpanan secara digital/ <i>cloud</i>	Kurangnya kesadaran pegawai untuk manajemen/inventarisasi dokumen kantor pada menu D-Drive sehingga Pegawai masih menyimpan dokumen pada perangkat kerja/PC/Laptop kantor masing-masing	Surat himbauan agar seluruh dokumentasi perkantoran disimpan pada Portal dalam rangka pengamanan aset digital	Desember 2022	Himbau penggunaan D-Drive/penyimpanan dokumen secara digital	Nota Dinas, Surat kewajiban pegawai untuk inventaris/penyimpanan dokumen secara digital dengan memanfaatkan Portal yang ditandatangani oleh pimpinan	Desember 2022	Mengecek pemanfaatan menu D-Drive portal aplikasi setiap pegawai dan melaporkan kepada pimpinan	Januari - Desember 2022
5	Dokumen pada D-Drive hilang/tidak dapat dikases	<i>Human error</i> /kesalahan pengguna karena menghapus dokumen	Melakukan <i>back up</i> data server secara berkala	Juli, Desember 2022	Koordinasi dengan programmer dan tim teknis terkait dengan <i>back up</i> data portal pada server	Whats App Group, Rapat Koordinasi	Juli, Desember 2022	Koordinasi programmer dengan tim teknis untuk <i>back up</i> data secara otomatis	Agustus, Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
6	Menu D-Drive tidak dapat diakses	Beberapa pegawai belum memahami fungsi menu D-Drive pada Portal Aplikasi	Rapat koordinasi dengan tim teknis terkait penggunaan D-Drive portal	Maret - April 2022	Menyusun jadwal pelaksanaan bimtek/ sosialisasi ke setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Whats App Group, Helpdesk Portal	Maret - April 2022	Koordinasi secara intensif dengan PIC Portal masing-masing unit kerja	Januari - Desember 2022
7	Bimbingan teknis/sosialisasi/workshop tidak dapat dilaksanakan atau tertunda	Terbatasnya ketersediaan anggaran karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19	Pelaksanaan bimbingan teknis secara <i>online</i> (melalui aplikasi zoom meeting dll)	Maret - April 2022	Koordinasi intensif dengan PIC Portal Aplikasi di setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Whats App Group, Bimbingan Teknis <i>online</i>	Maret - April 2022	Koordinasi dengan PIC Portal masing-masing unit kerja terkait jadwal pelaksanaan bimtek	Maret - Juni 2022

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Pengelolaan Aplikasi SILAKI Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Melaporkan Capaian Kinerja yang Akuntabel pada Aplikasi SILAKI
2. Pengisian Aplikasi SILAKI Secara Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Direktorat/ Balai terlambat menyampaikan data capaian untuk pengisian SILAKI Ditjen KA	Subbag EP	Data capaian belum diperoleh oleh PIC Direktorat/Balai	Pelaporan SILAKI tidak tepat waktu
2.	Pengisian aplikasi SILAKI tidak bisa dilaksanakan	Subbag EP	Aplikasi error tidak dapat diakses	Pelaporan SILAKI tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3.	Direktorat/ Balai terlambat mengisi data capaian di aplikasi SILAKI	Subbag EP	PIC Direktorat/UPT belum mengisi data capaian SILAKI	Pelaporan SILAKI tidak tepat waktu
4.	Pengisian aplikasi SILAKI tidak bisa dilaksanakan	Subbag EP	Staf yang ditunjuk sebagai PIC SILAKI sedang sakit/bertugas	Pelaporan SILAKI tidak tepat waktu
5.	Data capaian yang disampaikan tidak lengkap	Subbag EP	Direktorat/ Balai tidak menyampaikan data semua capaian	Pelaporan SILAKI tidak akuntabel

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan


Andi Guntur Asapa

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Pengelolaan Aplikasi SILAKI Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Melaporkan Capaian Kinerja yang Akuntabel pada Aplikasi SILAKI
2. Pengisian Aplikasi SILAKI Secara Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Direktorat/Balai terlambat menyampaikan data capaian untuk pengisian SILAKI Ditjen KA	Data capaian belum diperoleh oleh PIC Direktorat/Balai	Pelaporan SILAKI tidak tepat waktu	9.00	1
2.	Pengisian aplikasi SILAKI tidak bisa dilaksanakan	Aplikasi error tidak dapat diakses	Pelaporan SILAKI tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.50	4
3.	Direktorat/ Balai terlambat mengisi data capaian di aplikasi SILAKI	PIC Direktorat/UPT belum mengisi data capaian SILAKI	Pelaporan SILAKI tidak tepat waktu	7.50	3
4.	Pengisian aplikasi SILAKI tidak bisa dilaksanakan	Staf yang ditunjuk sebagai PIC SILAKI sedang sakit/bertugas	Pelaporan SILAKI tidak tepat waktu	3.00	5
5.	Data capaian yang disampaikan tidak lengkap	Direktorat/ Balai tidak menyampaikan data semua capaian	Pelaporan SILAKI tidak akuntabel	8.25	2

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Pengelolaan Aplikasi SILAKI Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Melaporkan Capaian Kinerja yang Akuntabel pada Aplikasi SILAKI
2. Pengisian Aplikasi SILAKI Secara Tepat Waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Direktorat/Balai terlambat menyampaikan data capaian untuk pengisian SILAKI ditjen ka	Data capaian belum diperoleh oleh pic Direktorat/Balai	Mengkosepkan nota dinas Sesditjen kepada Direktorat daan Balai untuk menyampaikan data dukung capaian sebelum batas akhir penyampaian	tanggal 1 s.d 5 tiap bulan tahun 2021	Menyampaikan n batas akhir waktu penyampaian agar dipercepat	Membuat surat kepada Direktorat/Balai	tanggal 25-30/31 tiap bulan	Komunikasi melalui telp/WA dengan Direktorat/Balai	tanggal 25 sampai 30/31 dan tanggal 1 sampai 4 bulan selanjutnya
2	Pengisian aplikasi SILAKI tidak bisa dilaksanakan	Aplikasi error tidak dapat diakses	Melakukan capture error perihal perbaikan kestabilan aplikasi SILAKI untuk dapat diakses	tanggal 1 s.d 5 bulan januari tahun	Mengusulkan untuk Pemantauan aplikasi SILAKI tiap awal bulan	Undangan rapat pemantauan tiap bulan	tanggal 6 s.d 10 bulan januari tahun 2022	Melaksanakan rapat pemantauan dengan mengundang pihak Programmer	tanggal 2 - 6 bulan Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
				2021					
3	Direktorat/ Balai terlambat mengisi data capaian di aplikasi SILAKI	PIC Direktorat/UPT belum mengisi data capaian SILAKI	Mengkonsepkan Nota dinas Sesditjen kepada Direktur/Kepala Balai di lingkungan ditjen perkeretaapian untuk segera mengisi aplikasi SILAKI sebelum batas akhir yang ditentukan	tanggal 1 s.d 5 tiap bulan tahun 2021	Menyampaikan untuk mengisi sebelum batas akhir pengisian	Membuat nota dinas kepada Direktorat/Balai	tanggal 1 s.d 5 tiap bulan tahun 2022	Koordinasi Intensif dengan tiap-tiap Unit Kerja	tanggal 25 sampai 30/31 dan tanggal 1 sampai 4 di bulan selanjutnya
4	Pengisian aplikasi SILAKI tidak bisa dilaksanakan	Staf yang ditunjuk sebagai PIC SILAKI sedang sakit/bertugas	Mengusulkan kegiatan Bimtek tentang aplikasi SILAKI kepada seluruh staf untuk dapat melakukan kegiatan sesuai aturan yang ada	tanggal 25 -30 bulan Januari 2021	Menyampaikan untuk tiap unit kerja mengutus staf untuk mengikuti diklat	Membuat undangan bimtek	tanggal 25 - 30 bulan Januari 2022	Melakukan evaluasi terhadap peserta pada akhir diklat	tanggal 30 Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Data capaian yang disampaikan tidak lengkap	Direktorat/ Balai tidak menyampaikan data semua capaian	Mengkonsepkan nota dinas Sesditjen perihal penyampaian daftar indikator data capaian yang menjadi kewajiban pengisian	tanggal 25 s.d 30 pada tiap bulan tahun 2021	Menyampaikan daftar minimal data capaian yang dibutuhkan	Membuat surat pemberitahuan kepada Direktorat/Balai	tanggal 25 - 30 bulan Januari 2022	Setditjen membuat nota dinas untuk segera menyampaikan data capaian sesuai daftar item/indikator data capaian kepada PIC dari masing-masing unit kerja	tanggal 25 sampai 30/31 dan tanggal 1 sampai 4 di bulan selanjutnya

Jakarta, Februari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Menghasilkan Pelaporan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) Yang Akuntabel
2. Menghasilkan Pelaporan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) secara tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Staf tidak bisa melakukan kompilasi data capaian dari Direktorat/UPT	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data capaian belum di isi oleh Direktorat/Balai	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak tepat waktu dan tidak akuntabel
2.	Staf tidak dapat memantau progres pengisian capaian di aplikasi e-monev bappenas	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Aplikasi <i>down</i> /tidak bisa diakses	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak tepat waktu
3.	Tim tidak dapat melakukan analisa data capaian kinerja	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data yang diisi kurang valid	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak akuntabel
4.	Tim tidak dapat melakukan pengisian aplikasi e-monev bappenas	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen anggaran berbeda dengan aplikasi	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak akuntabel

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Menghasilkan Pelaporan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) Yang Akuntabel
2. Menghasilkan Pelaporan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) secara tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Staf tidak bisa melakukan kompilasi data capaian dari Direktorat/UPT	Data capaian belum di isi oleh Direktorat/Balai	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak tepat waktu dan tidak akuntabel	6,19	3
2.	Staf tidak dapat memantau progres pengisian capaian di aplikasi e-monev bappenas	Aplikasi <i>down</i> /tidak bisa diakses	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak tepat waktu	7,56	1
3.	Tim tidak dapat melakukan analisa data capaian kinerja	Data yang diisi kurang valid	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak akuntabel	6,25	2
4.	Tim tidak dapat melakukan pengisian aplikasi e-monev bappenas	Dokumen anggaran berbeda dengan aplikasi	Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) tidak akuntabel	5,06	4

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

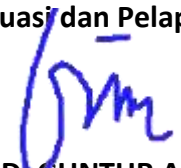
RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Menghasilkan Pelaporan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) Yang Akuntabel
2. Menghasilkan Pelaporan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39) secara tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Staf tidak bisa melakukan kompilasi data capaian dari Direktorat/UPT	Data capaian belum di isi oleh Direktorat/Balai	Kasubbag Evaluasi Menyampaikan Konsep Surat Percepatan Penyampaian Mengisi Data Laporan Di Aplikasi E-Monev Bappenas	5 hari kerja di akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022	Menyampaikan bahwa akan diberikan sanksi jika terlambat menyampaikan dari waktu yang ditetapkan	Memberikan surat teguran jika melewati batas waktu	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023	Memberikan reward dan punishment terkait pengisian laporan di e-monev bappenas	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023
2	Staf tidak dapat memantau progres pengisian capaian di aplikasi e-monev bappenas	Aplikasi down/tidak bisa diakses	Menyampaikan Surat Penyampaian Informasi Tidak Bisa Mengakses Aplikasi Monev Bappenas Ke Biro Perencanaan Untuk Diteruskan Ke Bappenas	5 hari kerja di akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022	Memberikan Bimtek dengan narasumber Bappenas	Membuat group WA dengan PIC dan penanggung jawab aplikasi dari Tim Bappenas	Maret 2022	Koordinasi Intensif dengan tiap-tiap Unit Kerja	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023

3	Tim tidak dapat melakukan analisa data capaian kinerja	Data yang diisi kurang valid	Kasubbag Evaluasi Menyampaikan Konsep Surat Penyampaian Untuk Mengisi Data Laporan Secara Valid Di Aplikasi E-Monev Bappenas	5 hari kerja di akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022	Menyampaikan bahwa akan diberikan sanksi jika kurang valid menyampaikan data	Memberikan surat teguran jika memberikan data tidak valid	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023	Memberikan reward dan punishment terkait pengisian laporan di e-monev bappenas	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023
4	Tim tidak dapat melakukan pengisian aplikasi e-monev bappenas	Dokumen anggaran berbeda dengan aplikasi	Menyampaikan Surat Kepada Biro Perencanaan Untuk Melakukan Sinkronisasi Data Dengan Bappenas	5 hari kerja di akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022	Menyampaikan keterangan bahwa penginputan tidak bisa lengkap karena perbedaan data anggaran dengan data aplikasi	Membuat surat kepada Biro Perencanaan untuk menyampaikan kendala perbedaan data	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023	Pemantauan terhadap pelaporan aplikasi tiap unit kerja	Tanggal 1-5 tiap bulan april, juli, oktober 2022 dan januari 2023

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan



ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Pengisian Aplikasi E-Performance Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Melaporkan Capaian Kinerja yang Akuntabel pada Aplikasi E-Performance
2. Pengisian Aplikasi E-Performance Secara Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Direktorat/ Balai terlambat menyampaikan data capaian untuk pengisian e-performance ditjen ka	Subbag EP	Data capaian belum diperoleh oleh pic Direktorat/Balai	Pelaporan E-Performance tidak tepat waktu
2.	pengisian aplikasi e-performance tidak bisa dilaksanakan	Subbag EP	Aplikasi eror tidak dapat diakses	Pelaporan E-Performance tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3.	Direktorat/ Balai terlambat mengisi data capaian di aplikasi e-performance	Subbag EP	Pic Direktorat/UPT belum mengisi data capaian e-performance	Pelaporan E-Performance tidak tepat waktu
4.	pengisian aplikasi e-performance tidak bisa dilaksanakan	Subbag EP	Staf yang ditunjuk sebagai PIC E-Performance sedang sakit/bertugas	Pelaporan E-Performance tidak tepat waktu
5.	data capaian yang disampaikan tidak lengkap	Subbag EP	Direktorat/ Balai tidak menyampaikan data semua capaian	Pelaporan E-Performance tidak akuntabel

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Pengisian Aplikasi E-Performance Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Melaporkan Capaian Kinerja yang Akuntabel pada Aplikasi E-Performance
2. Pengisian Aplikasi E-Performance Secara Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Direktorat/ Balai terlambat menyampaikan data capaian untuk pengisian e-performance ditjen ka	Data capaian belum diperoleh oleh pic Direktorat/Balai	Pelaporan E-Performance tidak tepat waktu	9.00	1
2.	pengisian aplikasi e-performance tidak bisa dilaksanakan	Aplikasi eror tidak dapat diakses	Pelaporan E-Performance tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.50	4
3.	Direktorat/ Balai terlambat mengisi data capaian di aplikasi e-performance	Pic Direktorat/UPT belum mengisi data capaian e-performance	Pelaporan E-Performance tidak tepat waktu	7.50	3
4.	pengisian aplikasi e-performance tidak bisa dilaksanakan	Staf yang ditunjuk sebagai PIC E-Performance sedang sakit/bertugas	Pelaporan E-Performance tidak tepat waktu	3.00	5
5.	data capaian yang disampaikan tidak lengkap	Direktorat/ Balai tidak menyampaikan data semua capaian	Pelaporan E-Performance tidak akuntabel	8.25	2

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Pengisian Aplikasi E-Performance Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Melaporkan Capaian Kinerja yang Akuntabel pada Aplikasi E-Performance
2. Pengisian Aplikasi E-Performance Secara Tepat Waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Direktorat/ Balai terlambat menyampaikan data capaian untuk pengisian e-performance ditjen ka	Data capaian belum diperoleh oleh pic Direktorat/Balai	mengkosepkan nota dinas Sesditjen kepada Direktorat daan Balai untuk menyampaikan data dukung capaian sebelum batas akhir penyampaian	tanggal 1 s.d 5 tiap bulan tahun 2020	menyampaika n batas akhir waktu penyampaian agar dipercepat	membuat surat kepada Direktorat/Balai	tanggal 25-30/31 tiap bulan	Komunikasi melalui telp/WA dengan Biro Perencanaan	tanggal 25 sampai 30/31 dan tanggal 1 sampai 4 bulan selanjutnya
2	pengisian aplikasi e-performance tidak bisa dilaksanakan	Aplikasi eror tidak dapat diakses	mengkonsepkan surat Sesditjen kepada Pustikom perihal perbaikan keastabilan aplikasi e-performance untuk dapat diakses	tanggal 1 s.d 5 bulan januari tahun 2020	mengusulkan untuk Pemantauan aplikasi eperformance tiap awal bulan	undangan rapat pemantauan tiap bulan	tanggal 6 s.d 10 bulan januari tahun 2022	melaksanakan rapat pemantauan dengan mengundang pihak pustikom	tanggal 2 - 6 bulan Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Direktorat/ Balai terlambat mengisi data capaian di aplikasi e-performance	Pic Direktorat/UPT belum mengisi data capaian e-performance	mengkonsepkan Nota dinas Sesditjen kepada Direktur/Kepala Balai di lingkungan ditjen perkeretaapian untuk segera mengisi aplikasi e-performance sebelum batas akhir yang ditentukan	tanggal 1 s.d 5 tiap bulan tahun 2020	menyampaikan untuk mengisi sebelum batas akhir pengisian	membuat nota dinas kepada Direktorat/Balai	tanggal 1 s.d 5 tiap bulan tahun 2022	Koordinasi Intensif dengan tiap-tiap Unit Kerja	tanggal 25 sampai 30/31 dan tanggal 1 sampai 4 di bulan selanjutnya
4	pengisian aplikasi e-performance tidak bisa dilaksanakan	Staf yang ditunjuk sebagai PIC E-Performance sedang sakit/bertugas	Mengusulkan kegiatan Bimtek tentang aplikasi e-performnace kepada seluruh staf untuk dapat melakukan kegiatan sesuai aturan yang ada	tanggal 25 -30 bulan Januari 2020	menyampaikan untuk tiap unit kerja mengutus staf untuk mengikuti diklat	membuat undangan bimtek	tanggal 25 - 30 bulan Januari 2022	melakukan evaluasi terhadap peserta pada akhir diklat	tanggal 30 Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	data capaian yang disampaikan tidak lengkap	Direktorat/ Balai tidak menyampaikan data semua capaian	mengkonsepkan nota dinas Seditjen perihal penyampaian daftar indikator data capaian yang menjadi kewajiban pengisian	tanggal 25 s.d 30 pada tiap bulan tahun 2020	menyampaikan daftar minimal data capaian yang dibutuhkan	membuat surat pemberitahuan kepada Direktorat/Balai	tanggal 25 - 30 bulan Januari 2022	setditjen membuat nota dinas untuk segera menyampaikan data capaian sesuai daftar item/indikator data capaian kepada PIC dari masing-masing unit kerja	tanggal 25 sampai 30/31 dan tanggal 1 sampai 4 di bulan selanjutnya

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Penyusunan Bahan Rapim Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Menghasilkan Bahan Rapim yang Valid dan Informatif
2. Menghasilkan Bahan Rapim dengan Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Undangan atau pemberitahuan rapim terlambat atau mendadak	Sub Koordinator Kelompok EP	Undangan atau informasi rapim telat diterima	Bahan Rapim tidak selesai tepat waktu
2.	Pegawai yang berkompoten untuk menyusun konsep bahan rapim tidak dapat melakukan penyusunan bahan	Sub Koordinator Kelompok EP	Pegawai sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya	Bahan Rapim tidak valid, tidak informatif dan tidak selesai tepat waktu
3.	Sulit mendapatkan data/materi dari Direktorat/Balai atau stakeholder terkait	Sub Koordinator Kelompok EP	PIC data/materi di Balai/Direktorat sulit dihubungi	Bahan Rapim tidak valid, tidak informatif dan tidak selesai tepat waktu
4.	Rapat Pembahasan konsep bahan Rapim tidak dapat dilaksanakan	Sub Koordinator Kelompok EP	Pimpinan ada agenda lain sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan	Bahan Rapim tidak valid dan informatif
5.	Pendistribusian softcopy Bahan Rapim tidak diterima oleh Ajudan Pimpinan	Sub Koordinator Kelompok EP	Nomor HP Ajudan Pimpinan berganti	Bahan Rapim tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Penyusunan Bahan Rapim Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Menghasilkan Bahan Rapim yang Valid dan Informatif
2. Menghasilkan Bahan Rapim dengan Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Undangan atau pemberitahuan rapim terlambat atau mendadak	Undangan atau informasi rapim telat diterima	Bahan Rapim tidak selesai tepat waktu	9,60	2
2.	Pegawai yang berkompeten untuk menyusun konsep bahan rapim tidak dapat melakukan penyusunan bahan	Pegawai sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya	Bahan Rapim tidak valid, tidak informatif dan tidak selesai tepat waktu	2,24	4
3.	Sulit mendapatkan data/materi dari Direktorat/Balai atau stakeholder terkait	PIC data/materi di Balai/Direktorat sulit dihubungi	Bahan Rapim tidak valid, tidak informatif dan tidak selesai tepat waktu	10,88	1
4.	Rapat Pembahasan konsep bahan Rapim tidak dapat dilaksanakan	Pimpinan ada agenda lain sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan	Bahan Rapim tidak valid dan informatif	3,60	3
5.	Pendistribusian softcopy Bahan Rapim tidak diterima oleh Ajudan Pimpinan	Nomor HP Ajudan Pimpinan berganti	Bahan Rapim tidak selesai tepat waktu	1,96	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan
- Kegiatan** : Penyusunan Bahan Rapim Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Menghasilkan Bahan Rapim yang Valid dan Informatif
2. Menghasilkan Bahan Rapim dengan Tepat Waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
2	Undangan atau pemberitahuan rapim terlambat atau mendadak	Undangan atau informasi rapim telat diterima	Koordinasi intensif dengan Sespri/Protokol Menteri agar agenda Menteri untuk dapat di share pada H-1	Januari-Desember 2022 (setiap hari)	Update agenda Menteri Perhubungan dari protokol setiap H-1	WA Grup ajudan/sespri/protokol	Januari-Desember 2022 (setiap hari)	Staf EP berkoordinasi dengan Ajudan/Sespri Dirjen untuk memperoleh agenda Menteri melalui Protokol/Sespri Menteri	Januari-Desember 2022 (setiap hari)
4	Pegawai yang berkompeten	Pegawai sedang melaksanakan	Penambahan jumlah SDM PIC	Januari 2022	Penyampaian jadwal	WA grup kerja	Januari-Desember	Pengoptimalan penambahan	Januari-Desember

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	untuk menyusun konsep bahan rapim tidak dapat melakukan penyusunan bahan	tugas kedinasan lainnya	penyusunan bahan rapim (mengoptimalkan penambahan CPNS)		perjalanan dinas pegawai secara bergantian		2022 (setiap hari)	pegawai dengan pembagian penugasan kepada pegawai setiap harinya	2022 (sebelum pelaksanaan Rapim)
1	Sulit mendapatkan data/materi dari Direktorat/Balai atau stakeholder terkait	PIC data/materi di Balai/Direktorat sulit dihubungi	Pengoptimalan penggunaan D-Drive pada portal aplikasi dengan selalu mengupload bahan rapat ke D-Drive setiap pelaksanaan rapat yang melibatkan Balai/Satker	Januari-Desember 2022 (setiap pelaksanaan rapat terkait progres program pembangunan KA)	Koordinasi dengan Balai/Satker terkait pengoptimalan D-Drive pada portal aplikasi	D-Drive pada portal aplikasi	Januari-Desember 2022 (sebelum pelaksanaan Rapim)	Mengingatkan setiap pegawai yang melaksanakan rapat terkait pembangunan perkeretaapian untuk dapat upload bahan rapat/laporan rapat pada D-Drive portal aplikasi	Januari-Desember 2022 (setiap pelaksanaan rapat)
3	Rapat Pembahasan konsep bahan Rapim tidak dapat dilaksanakan	Pimpinan ada agenda lain sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan	Koordinasi intensif dengan TU Dirjen dan TU Seditjen agar agenda Dirjen/Seditjen untuk dapat di share pada H-1	Januari-Desember 2022 (setiap hari)	Update agenda Dirjen dan Seditjen dari Ajudan/Sespri setiap H-1	Google kalender agenda Dirjen dan Seditjen dan WA Grup ajudan/sespri	Januari-Desember 2022 (sebelum pelaksanaan Rapim)	Mengecek agenda Dirjen dan Seditjen setiap H-1 melalui Google Kalender dan WA Grup	Januari-Desember 2022 (sebelum pelaksanaan Rapim)

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
								informasi pimpinan	
5	Pendistribusian softcopy Bahan Rapim tidak diterima oleh Ajudan Pimpinan	Nomor HP Ajudan Pimpinan berganti	Membuat grup khusus terkait informasi agenda Pimpinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang berisikan para Ajudan, TU dan PIC penyusunan bahan rapim	Januari 2022	Penyampaian bahan rapim melalui D-Drive di portal aplikasi dan grup WA informasi pimpinan	D-Drive portal aplikasi dan WA Grup ajudan/sespri	Januari-Desember 2022 (sebelum pelaksanaan Rapim)	Selalu konfirmasi kepada Ajudan/Sespri/TU Dirjen dan Sesditjen terkait penyampaian bahan rapim oleh PIC penyusunan bahan rapim	Januari-Desember 2022 (sebelum pelaksanaan Rapim)

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tujuan : 1. Tersusunnya Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akuntabel
2. Tersusunnya Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Kompilasi data dan penyusunan draft Laporan Tahunan tidak sesuai dengan <i>outline</i> /ketentuan	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Pegawai belum mengetahui <i>outline</i> penyusunan Laporan Tahunan DJKA	Laporan Tahunan DJKA tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
2.	Konsep Laporan Tahunan tidak dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Beberapa data pendukung belum disampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Bagian lain	Laporan Tahunan DJKA tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
3.	Konsep/Draft Laporan Tahunan Ditjen Perkeretaapian belum dikoreksi dan ditandatangani pimpinan dan persetujuan artikel/data/informasi tertunda	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Pimpinan sibuk/dinas luarkota/ada keadaan lain yang lebih mendesak	Laporan Tahunan DJKA tidak selesai tepat waktu
4.	Rapat koordinasi penyusunan Laporan Tahunan DJKA belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19	Laporan Tahunan DJKA tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : 1. Tersusunnya Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akuntabel
2. Tersusunnya Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Kompilasi data dan penyusunan draft Laporan Tahunan tidak sesuai dengan <i>outline</i> /ketentuan	Pegawai belum mengetahui <i>outline</i> penyusunan Laporan Tahunan DJKA	Laporan Tahunan DJKA tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	12,05	1
2.	Konsep Laporan Tahunan tidak dapat difinalisasi	Beberapa data pendukung belum disampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Bagian lain	Laporan Tahunan DJKA tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	7,88	2
3.	Konsep/Draft Laporan Tahunan Ditjen Perkeretaapian belum dikoreksi dan ditandatangani pimpinan dan persetujuan artikel/data/informasi tertunda	Pimpinan sibuk/dinas luarkota/ada keadaan lain yang lebih mendesak	Laporan Tahunan DJKA tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	2,57	3
4.	Rapat koordinasi penyusunan Laporan Tahunan DJKA belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19	Laporan Tahunan DJKA tidak selesai tepat waktu	2,14	4

Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : 1. Tersusunnya Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akuntabel
2. Tersusunnya Konsep Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi data dan penyusunan draft Laporan Tahunan tidak sesuai dengan <i>outline/</i> ketentuan	Pegawai belum mengetahui <i>outline</i> penyusunan Laporan Tahunan DJKA	Penyampaian contoh/ <i>outline</i> Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui <i>google drive</i>	Maret 2022	Contoh/ <i>outline</i> draft Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Whats App, Google Drive	Maret 2022	Membuat folder pengumpulan draft Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk memantau unit kerja mana yang belum memberikan data	Februari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
2	Konsep Laporan Tahunan tidak dapat difinalisasi	Beberapa data pendukung belum disampaikan/ masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/ Bagian lain	Penyampaian permohonan data dukung melalui surat dengan batas waktu	Maret 2022	Kebutuhan kelengkapan data untuk penyusunan Laporan Tahunan	Whats App Group, Google Drive	Maret 2022	Membuat pengingat pada portal.djka.dephub.go.id terkait <i>deadline</i> pengumpulan dokumen data dukung	Maret 2022
3	Konsep/Draft Laporan Tahunan Ditjen Perkeretaapian belum dikoreksi dan ditandatangani pimpinan	Pimpinan sibuk/dinas luarkota/ada keadaan lain yang lebih mendesak	Mengajukan Konsep/Draft Laporan Tahunan melalui portal djka (portal.djka.dephub.go.id) agar dapat dikoreksi dan ditandatangani secara elektornik (TTE)	Maret 2022	Notifikasi pada portal djka (portal.djka.dephub.go.id) dan tte.djka.dephub.go.id terkait dokumen yang perlu disetujui	portal djka (portal.djka.dephub.go.id) dan tte.djka.dephub.go.id	Maret 2022	Membuat notifikasi pada portal djka (portal.djka.dephub.go.id) dan tte.djka.dephub.go.id terkait dokumen yang perlu persetujuan	Maret 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
4	Rapat koordinasi penyusunan Laporan Tahunan DJKA belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19	Melakukan rapat secara daring melalui aplikasi Zoom	Februari 2022	Notifikasi pada portal djka (portal.djka.dephub.go.id) terkait agenda rapat	portal djka (portal.djka.dephub.go.id)	Februari 2022	Membuat notifikasi portal djka (portal.djka.dephub.go.id) 3 hari sebelum rapat dimulai	Februari 2022

**Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan**

ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Direktorat terkait	Ketersediaan data dari operator tidak sesuai kebutuhan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
2.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat atau konsinyering pengumpulan dan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu
4.	Pencetakan draft Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
5.	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari operator tidak sesuai kebutuhan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	11,56	1
2	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	8,96	2
3.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	6,72	3
4.	Tertundanya pelaksanaan rapat atau konsinyering pengumpulan dan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu	5,76	4

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
5.	Pencetakan draft Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu	2,52	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Evaluasi
& Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari operator tidak sesuai kebutuhan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyiapan sistem <i>online</i> guna pengambilan data	Desember 2022	Data capaian kinerja yang <i>update</i> dan valid	Portal aplikasi DJKA, pengoptimalan e-performance	Desember 2022	Koordinasi dengan direktorat terkait terkait rencana integrasi data kinerja dengan pihak operator	Desember 2022
2	Kompilasi dan analisis data tertunda	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Surat/Nota Dinas permintaan data ke Direktorat/Balai/Bagian agar menyampaikan data tepat waktu sesuai PM 85/2020	April, Juli, Oktober, Desember 2022	Data dukung kinerja yang valid	Surat/Nota Dinas, portal aplikasi DJKA	April, Juli, Oktober, Desember 2022	Evaluasi laporan kinerja dan laporan kepada pimpinan dan seluruh unit kerja	April, Juli, Oktober, Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sosialisasi dan rapat penyusunan laporan TW Kinerja Ditjen Perkeretaapian Triwulanan dan <i>upload</i> panduan penyelenggaraan SAKIP untuk menjadi acuan termasuk dalam penyusunan dokumen Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian di <i>website</i>	Januari, Maret, Juni, September dan Desember 2022	Rapat Sosialisasi Penyusunan Lap TW DJKA sesuai PM 85/2020 dan panduan penyelenggaraan SAKIP	Surat/Nota/ Website Dinas untuk penyampaian buku panduan SAKIP	Januari, Maret, Juni, September dan Desember 2022	Evaluasi laporan kinerja dan laporan kepada pimpinan dan seluruh unit kerja	April, Juli, Oktober dan Desember 2022
4	Penyusunan laporan (narasi) membutuhkan waktu yang lama	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM Tim Penyusun Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengusulan pengusulan diklat SAKIP untuk pegawai yang belum mengikuti diklat	Maret 2022	Kebutuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Surat/Nota Dinas usulan diklat kepada Bagian Kepegawaian	Maret 2022	Rapat koordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum	Maret 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Tertundanya pelaksanaan rapat atau konsinyering pengumpulan dan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Usulan Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Maret, Juni, September dan Desember 2022	Usulan kegiatan pelaksanaan rapat atau konsinyering dengan memperhatikan protokl kesehatan	Surat/Nota Dinas, dokumen anggaran	Maret, Juni, September dan Desember 2022	Koordinasi dengan Satker terkait usulan kegiatan	Maret, Juni, September dan Desember 2022
5	Pencetakan draft Laporan Triwulanan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Pencetakan konsep/dokumen melalui pihak ketiga/unit pencetakan	April, Juli, Oktober dan Desember 2022	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga/unit pencetakan agar laporan selesai tepat waktu	Surat/Perjanjian Kerjasama	April, Juli, Oktober dan Desember 2022	Pembahasan rencana kerjasama dengan unit pencetakan	April, Juli, Oktober dan Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Evaluasi &
Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Bagian terkait	Ketersediaan data dari Bagian lain tidak sesuai kebutuhan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
2.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat atau konsinyering pengumpulan dan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu
4.	Pencetakan draft Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan dokumen Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
5.	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Bagian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Evaluasi
& Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari Bagian lain tidak sesuai kebutuhan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	10,20	1
2.	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Bagian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	7,28	2
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat atau konsinyering pengumpulan dan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Ditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu	5,60	4
4.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	6,24	3

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
5.	Pencetakan draft Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan dokumen Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu	3.52	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Evaluasi
& Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari Bagian terkait tidak sesuai kebutuhan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyiapan sistem <i>online</i> guna pengambilan data	Desember 2022	Data capaian kinerja yang <i>update</i> dan valid	Surat/Nota Dinas	Desember 2022	Koordinasi dengan direktorat terkait terkait rencana integrasi data kinerja dengan pihak Bagian terkait	Desember 2022
2	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Bagian lain	Surat/Nota Dinas permintaan data ke Direktorat/Balai/Bagian agar menyampaikan data tepat waktu sesuai PM 85/2020	Maret, Juni, September 2022	Data dukung kinerja yang valid	Rapat pembahasan/konsinyering, WA, Email, Tlp	Maret, Juni, September 2022	Evaluasi kelengkapan data dan laporan kepada pimpinan secara berkala termasuk evaluasi isian e- <i>Performance</i>	Maret, Juni, September 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Tertundanya pelaksanaan rapat atau konsinyering pengumpulan dan penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Setditjen Perkeretaapian	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Maret, Juni, September dan Desember 2022	Usulan kegiatan pelaksanaan rapat atau konsinyering dengan memperhatikan protokol kesehatan	Surat/Nota Dinas, dokumen anggaran	Maret, Juni, September dan Desember 2022	Koordinasi dengan Satker terkait usulan kegiatan	Maret, Juni, September dan Desember 2022
4	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan panduan penyelenggaraan SAKIP untuk menjadi acuan termasuk dalam penyusunan dokumen Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	April - Mei 2022	Buku panduan penyelenggaraan SAKIP	Surat/Nota Dinas untuk penyampaian buku panduan SAKIP	April - Mei 2022	Evaluasi laporan kinerja dan laporan kepada pimpinan dan seluruh unit kerja	Juli, Oktober 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Pencetakan draft Laporan Triwulanan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Pencetakan konsep/dokumen melalui pihak ketiga/unit pencetakan	April, Juli, Oktober, Desember 2022	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga/unit pencetakan agar laporan selesai tepat waktu	Surat/Perjanjian Kerjasama	April, Juli, Oktober, Desember 2022	Pembahasan rencana kerjasama dengan unit pencetakan	April, Juli, Oktober, Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Evaluasi &
Pelaporan

Andi Guntur Asapa
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit organisasi** : Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Laporan SPIP Ditjen KA yang Akuntabel/ Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
2. Menghasilkan Laporan SPIP Ditjen KA yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Rapat tertunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat waktu
2.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan terhadap kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian resiko kegiatan	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Pimpinan memiliki agenda rapat yang bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
4.	Penyusunan Laporan SPIP tidak sesuai ketentuan PM No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Tim penyusun laporan SPIP belum memahami peraturan terkait penyusunan laporan SPIP	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel
5.	Penyampaian Laporan SPIP terlambat disampaikan ke Biro	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO	Penyampaian Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat Waktu

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit organisasi** : Koordinator Kelompok Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Laporan SPIP Ditjen KA yang Akuntabel/ Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
2. Menghasilkan Laporan SPIP Ditjen KA yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Rapat tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat waktu	4,00	4
2.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan terhadap kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian resiko kegiatan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	10,80	1
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian	Pimpinan memiliki agenda rapat yang bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	5,72	3
4.	Penyusunan Laporan SPIP tidak sesuai ketentuan PM No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub	Tim penyusun laporan SPIP belum memahami peraturan terkait penyusunan laporan SPIP	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel	7,28	2
5.	Penyampaian Laporan SPIP terlambat disampaikan ke Biro	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO	Penyampaian Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat Waktu	2,88	5

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda

Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit organisasi** : Koordinator Kelompok Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
- Kegiatan** : Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan Kegiatan** :
1. Menghasilkan Laporan SPIP Ditjen KA yang Akuntabel/ Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
 2. Menghasilkan Laporan SPIP Ditjen KA yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan terhadap kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian risiko kegiatan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Menyampaikan surat permintaan data dukung penyusunan laporan SPIP kepada Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian agar tepat waktu	Juni 2022	Penilaian Resiko, Daftar Resiko, Peta Resiko, RTP	Surat Permintaan	Juni 2022	Monitoring progres data dukung yang sudah disampaikan	Juni 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
2	Penyusunan Laporan SPIP tidak sesuai ketentuan PM No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub	Tim penyusun laporan SPIP belum memahami peraturan terkait penyusunan laporan SPIP	Mengundang Bimtek dan Sosialisasi Tim/PIC yang ditunjuk masing-masing unit kerja/koordinator kelompok	Februari 2022	Bimtek dan Sosialisasi PM 25 Tahun 2018	PM 25 tahun 2018	Februari 2022	Menyusun konsep surat permintaan data dukung penyusunan laporan SPIP kepada Bagian dilingkungan Setditjen Perkeretaapian	Februari 2022
3	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian	Pimpinan memiliki agenda rapat yang bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda Persetujuan SPIP belum ditandatangani oleh Dirjen Perkeretaapian	Koordinasi dengan Sekretaris/Ajudan terkait agenda pimpinan Penyusunan jadwal kegiatan/rapat	September 2022	Agenda pimpinan dengan jadwal kegiatan unit kerja	Google kalender	Oktober 2022	Koordinasi dengan TU Pimpinan	Oktober 2022
4	Rapat tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi	Usulan revisi dokumen anggaran/POK	September 2022	Penyampaian usulan revisi dokumen anggaran untuk penambahan anggaran kegiatan	Surat usulan revisi dokumen anggaran	September 2022	Inventaris sisa anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Oktober 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Penyampaian Laporan SPIP terlambat disampaikan ke Biro	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO)	Koordinasi dengan TU Pimpinan	November 2022			November 2022		November 2022

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit organisasi** : Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan :
1. Menghasilkan Laporan Setditjen Perkeretaapian yang Akuntabel/
Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
2. Menghasilkan Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Rapat tertunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat waktu
2.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan terhadap kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian resiko kegiatan	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Pimpinan memiliki agenda rapat yang bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
4.	Penyusunan Laporan SPIP tidak sesuai ketentuan PM No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Tim penyusun laporan SPIP belum memahami peraturan terkait penyusunan laporan SPIP	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel
5.	Penyampaian Laporan SPIP terlambat disampaikan ke Biro	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO)	Penyampaian Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat Waktu

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan


ANDI GUNTUR ASAPA
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit organisasi** : Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan :
1. Menghasilkan Laporan Setditjen Perkeretaapian yang Akuntabel/
Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
2. Menghasilkan Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Rapat tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat waktu	4,00	4
2.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan terhadap kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian resiko kegiatan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	10,80	1
3.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian	Pimpinan memiliki agenda rapat yang bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	5,72	3
4.	Penyusunan Laporan SPIP tidak sesuai ketentuan PM No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub	Tim penyusun laporan SPIP belum memahami peraturan terkait penyusunan laporan SPIP	Penyusunan Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak akuntabel	7,28	2
5.	Penyampaian Laporan SPIP terlambat disampaikan ke Biro	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO)	Penyampaian Laporan SPIP Ditjen Perkeretaapian tidak tepat Waktu	2,88	5

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit organisasi : Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Perkeretaapian

Kegiatan : Penyusunan Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian

Tujuan Kegiatan :

1. Menghasilkan Laporan Setditjen Perkeretaapian yang Akuntabel/
Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
2. Menghasilkan Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan terhadap kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian risiko kegiatan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Menyampaikan surat permintaan data dukung penyusunan laporan SPIP kepada Unit Kerja/ Kordinator Kelompok dilingkungan Setditjen Perkeretaapian	Juni 2022	Daftar Resiko, Peta Resiko, RTP	Surat Permintaan	Juni 2022	Monitoring progres data dukung yang sudah disampaikan	Juni 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
			agar tepat waktu						
2	Penyusunan Laporan SPIP tidak sesuai ketentuan PM No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub	Tim penyusun laporan SPIP belum memahami peraturan terkait penyusunan laporan SPIP	Mengundang Bimtek dan Sosialisasi Tim/PIC yang ditunjuk masing-masing bagian	Februari 2022	Bimtek dan Sosialisasi	PM 25 Tahun 2018	Februari 2022	Mengecek Pengumpulan data dukung penyusunan laporan SPIP di lingkungan Setditjen Perkeretaapian	Februari 2022
3	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Laporan SPIP Setditjen Perkeretaapian	Pimpinan memiliki agenda rapat yang bersamaan dengan kegiatan lain sehingga kegiatan tertunda	Penyusunan jadwal kegiatan/rapat antar unit kerja/ koordinator kelompok Bagian dan Subbag	Oktober 2022	Agenda pimpinan dengan jadwal kegiatan unit kerja	Google kalender	Oktober 2022	Koordinasi dengan TU Pimpinan	Oktober 2022
4	Rapat tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi	Usulan revisi dokumen anggaran/POK	Oktober 2022	Penyampaian usulan revisi dokumen anggaran untuk penambahan anggaran kegiatan	Surat usulan revisi dokumen anggaran	Oktober 2022	Inventaris sisa anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Oktober 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Penyampaian Laporan SPIP terlambat disampaikan ke Biro	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO)	Koordinasi dengan TU Pimpinan dan Sekretaris	November 2022	Draft Laporan SPIP	WA	November 2022	Mengingatkan TU Setditjen untuk Mengecek apakah Laporan SPIP Sudah tanda tangan	November 2022

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan



ANDI GUNTUR ASAPA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Direktorat terkait	Ketersediaan data dari Operator tidak sesuai kebutuhan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
2.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel
3.	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsinyering tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan LKIP tidak selesai tepat waktu
4.	Pencetakan untuk bahan dan konsep laporan tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan dokumen LKIP tidak selesai tepat waktu
5.	kompilasi dan analisis data tertunda termasuk penyusunan narasi	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	LKIP tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	10,88	1
2.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari Operator tidak sesuai kebutuhan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	8,96	2
3.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	4,32	3
4.	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsinyering tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	4,00	4
5.	Pencetakan untuk bahan dan konsep laporan tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan dokumen LKIP tidak selesai tepat waktu	2,88	5

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi dan analisis data tertunda termasuk Penyusunan laporan (narasi)	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Surat/Nota Dinas permintaan data ke Direktorat/Balai/Bagian agar menyampaikan data tepat waktu sesuai PM 85/2020	Januari-Februari 2022	Data Kinerja dari Direktorat/Balai/Bagian untuk penyampaian secara tepat waktu	Surat/Nota Dinas, portal aplikasi DJKA	Januari-Februari, Desember 2022	Evaluasi kelengkapan data dan laporan kepada pimpinan secara berkala termasuk evaluasi isian e-Performance	Januari-Desember 2022
2	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari Operator tidak sesuai kebutuhan LKIP	Penyiapan sistem <i>online</i> guna pengambilan data	Januari-Desember 2022	Data capaian kinerja yang <i>update</i> dan valid	Portal aplikasi DJKA, pengoptimalan e-performance	Desember 2022	Koordinasi dengan direktorat terkait rencana integrasi data kinerja dengan pihak operator	Maret-Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsiny ering tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk <i>social distancing</i>	Januari - Februari 2022	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk social distancing dan menyediakan akses rapat mealui zoom meeting	Surat/Nota Dinas	Mei - November 2022	Koordinasi dengan Satker terkait usulan kegiatan	Januari- Februari 2022
4	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan LKIP	Rapat Sosialisasi Penyusunan LKIP sesuai PM. 85.2020 dan penayangan panduan penyelenggaraan SAKIP untuk menjadi acuan termasuk dalam penyusunan dokumen LKIP (Website)	Januari 2022	Rapat Sosialisasi Penyusunan LKIP sesuai PM 85/2020 dan Panduan penyelenggara n SAKIP	Surat/Nota Dinas untuk penyampaian tindaklanjut rapat LKIP dan website	Januari 2022	Evaluasi laporan kinerja dan laporan kepada pimpinan dan seluruh unit kerja	April, Juli, Oktober dan Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Pencetakan untuk bahan dan konsep laporan tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Pencetakan konsep/dokumen melalui pihak ketiga/unit pencetakan	Februari 2022	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga/unit pencetakan agar laporan selesai tepat waktu	Surat/Perjanjian Kerjasama	Januari-Februari 2022	Pembahasan rencana kerjasama dengan unit pencetakan	Januari 2022

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Bagian	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Bagian terkait	Ketersediaan data dari Unit atau Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian tidak sesuai kebutuhan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
3.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel
4.	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsinyering tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
5.	Pencetakan untuk konsep/finalisasi laporan tertunda	Kelompok Evaluasi & Pelaporan	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan dokumen LKIP tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Bagian	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	12,96	1
2.	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari Unit atau Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian tidak sesuai kebutuhan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	8,96	2
3.	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan LKIP	Penyusunan LKIP tidak akuntabel	5,28	3
4.	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsinyering tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Penyusunan LKIP tidak selesai tepat waktu	4,84	4
5.	Pencetakan untuk konsep/finalisasi laporan tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Penyerahan dokumen LKIP tidak selesai tepat waktu	2,52	5

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setditjen Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi dan analisis data termasuk penyusunan laporan (narasi) tertunda	Data pendukung masih belum/terlambat disampaikan oleh Bagian	Surat/Nota Dinas permintaan data ke Bagian lain agar menyampaikan data tepat waktu sesuai PM 45/2016	Januari 2022	Data Kinerja dari Direktorat/Balai /Bagian untuk penyampaian secara tepat waktu	Surat/Nota Dinas, portal aplikasi DJKA	Januari 2022	Evaluasi kelengkapan data dan laporan kepada pimpinan secara berkala termasuk evaluasi isian e-Performance	Januari 2022
2	Pengumpulan data tidak sesuai ketentuan	Ketersediaan data dari Unit atau Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian tidak sesuai kebutuhan LKIP	Penyiapan sistem <i>online</i> terintegrasi guna pengambilan data	Maret - Desember 2022	<i>Updating</i> dan penyediaan data) secara <i>realtime</i> dan lengkap	Portal aplikasi DJKA, pengoptimalan <i>e-performance</i>	Maret - Desember 2022	Koordinasi dengan Bagian terkait rencana integrasi data kinerja	Maret - Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sesuai ketentuan PM 85/2020	Anggota tim belum sepenuhnya mengetahui peraturan/ pedoman terkait penyusunan LKIP	Rapat Sosialisasi Penyusunan LKIP sesuai PM. 85.2020 dan penayangan panduan penyelenggaraan SAKIP untuk menjadi acuan termasuk dalam penyusunan dokumen LKIP (Website)	Januari – Februari 2022	Rapat Sosialisasi Penyusunan LKIP sesuai PM 85/2020	Surat/Nota Dinas untuk penyampaian buku panduan SAKIP	Januari 2022	Evaluasi laporan kinerja dan laporan kepada pimpinan dan seluruh unit kerja	April, Juli, Oktober dan Desember 2022
4	Pelaksanaan rapat koordinasi/konsiny ering tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk social distancing dan menyediakan akses rapat melalui <i>zoom meeting</i>	Januari 2022	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk social distancing dan menyediakan akses rapat mealui <i>zoom meeting</i>	Surat/Nota Dinas, dokumen anggaran	Januari- Februari 2022	Koordinasi dengan Satker terkait usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk social distancing dan menyediakan akses rapat mealui <i>zoom meeting</i>	Januari- Februari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
5	Pencetakan untuk konsep/finalisasi laporan tertunda	ATK dan printer tidak mencukupi	Pencetakan konsep/dokumen melalui pihak ketiga/unit pencetakan	Februari 2022	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga/unit pencetakan agar laporan selesai tepat waktu	Surat/Perjanjian Kerjasama	Januari-Februari 2022	Pembahasan rencana kerjasama dengan unit pencetakan	Januari 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordiantor Kelompok Evaluasi & Pelaporan

Andi Guntur Asapa
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19840724 200712 1 001

DAFTAR RISIKO

Unit organisasi : Koordinator Kelompok Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang Akuntabel
 2. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja secara tepat waktu

NO	RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan	Subbag EP	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2.	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai ketentuan PM 85/2020	Subbag EP	Adanya Pergantian Tim penyusun Perjanjian Kinerja sehingga belum memahami peraturan terkait SAKIP	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel
3.	Rapat persiapan dan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tertunda pelaksanaannya	Subbag EP	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi adanya kebijakan penyesuaian anggaran/reconfusing	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel
4.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian	Subbag EP	Adanya kebijakan pembatasan kegiatan PPKM level 3 karena pandemi (covid-19 omicron)	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
5.	Persetujuan dokumen Perjanjian Kinerja Oleh Dirjen Perkeretaapian terlambat	Subbag EP	Pimpinan Dinas untuk melakukan peninjauan/monitoring lapangan kedaerah	Penyampaian PK tidak tepat Waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan



Andi Guntur Asapa

Penata (III/c)

NIP. 19840724 200712 1 001

PETA RISIKO

Unit organisasi : Koordinator Kelompok Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang Akuntabel
 2. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja secara tepat waktu

NO	RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	7,68	1
2.	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai ketentuan PM 85/2020	Adanya Pergantian Tim penyusun Perjanjian Kinerja sehingga belum memahami peraturan terkait SAKIP	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel	5,40	2
3.	Rapat persiapan dan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi adanya kebijakan penyesuaian anggaran/recofusing	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel	4,80	3
4.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian	Adanya kebijakan pembatasan kegiatan PPKM level 3 karena pandemi (covid-19 omicron)	Penyusunan PK Setditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	3,92	4
5.	Persetujuan dokumen Perjanjian Kinerja Oleh Dirjen Perkeretaapian terlambat	Pimpinan Dinas untuk melakukan peninjauan/monitoring lapangan kedaerah	Penyampaian PK tidak tepat Waktu	3,36	5

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan


Andi Guntur Asapa

Penata (III/c)

NIP. 19840724 200712 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT
NO. 8 JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204,
3856836, 3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

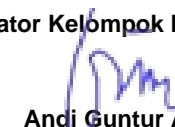
Unit organisasi	:	<u>Koordinator Kelompok Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian</u>
Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja <u>Setditjen</u> Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan	:	1. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang Akuntabel 2. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja secara tepat waktu

Rank	Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan	Beberapa data dukung belum update dan tidak valid	Menyampaikan surat permintaan data target kinerja kepada unit kerja terkait agar melakukan penyampaian data secara tepat waktu	Januari 2022	Surat Penyampaian Data target kinerja yang update dan valid	Surat permintaan, nota dinas, rapat pembahasan	Januari 2020, Desember 2020	Monitoring progres data kinerja dari unit kerja terkait	Januari 2022
2	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai ketentuan PM 85/2020	Adanya Pergantian Tim penyusun Perjanjian Kinerja sehingga belum memahami peraturan terkait SAKIP	Penyusunan buku panduan penyelenggaraan SAKIP termasuk Perjanjian Kinerja	Januari 2022	Tata cara penyusunan Dokumen SAKIP	Buku panduan dan Surat	Januari 2022	TIM Kelompok EP melakukan pengumpulan regulasi terkait tata cara penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kemenhub	Januari 2022

Rank	Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Rapat persiapan dan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi adanya kebijakan penyesuaian anggaran/recofusing	Mengusulkan revisi dokumen anggaran	November s.d Desember 2022 anggaran	usulan revisi dokumen	Surat usulan	November s.d Desember 2022	Inventaris sisa anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	November s.d Desember 2022
4	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian	Adanya kebijakan pembatasan kegiatan PPKM level 3 karena pandemi (covid-19 omicron)	Koordinasi dengan TU terkait serta melaksanakan rapat secara online/virtual zoom meeting	Januari 2022	Melaksanakan rapat secara online/aplikasi zoom meeting	WA, telp, zoom, email/e-surel/portal DJKA;	Januari 2022	Sub Koordinator Kelompok EP mengingatkan staf untuk menyusun jadwal kegiatan agar disesuaikan dengan kondisi pandemi	Januari 2022
5	Persetujuan dokumen Perjanjian Kinerja Oleh Dirjen Perkeretaapian terlambat	Pimpinan Dinas untuk melakukan peninjauan/monitoring lapangan kedaerah	Koordinasi dengan TU terkait jadwal pimpinan	Januari 2022	Draft Perjanjian Kinerja	Nota Dinas dan Dokumen PK	Januari 2022	Mengingatkan TU Dirjen untuk Mengecek apakah Perjanjian Kinerja Sudah tanda tangan	Januari 2022

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan



Andi Guntur Asapa

Penata (III/c)

NIP. 19840724 200712 1 001

DAFTAR RISIKO

Unit organisasi : Koordinator Kelompok Perencanaan, Ditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang Akuntabel
2. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja secara tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan	Sub Koordinator EP	Beberapa data dukung yang disampaikan unit kerja terkait belum update dan tidak valid	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2.	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai ketentuan PM 85/2020	Sub Koordinator EP	Adanya Pergantian Tim penyusun Perjanjian Kinerja sehingga belum memahami peraturan terkait SAKIP	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3.	Persetujuan Perjanjian Kinerja belum ditanda tangan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian	Sub Koordinator EP	Dirjen tidak berada di tempat karena melakukan monitoring ke luar daerah	Penyampaian PK tidak tepat Waktu
4.	Rapat persiapan dan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 tertunda pelaksanaannya	Sub Koordinator EP	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi adanya kebijakan penyesuaian anggaran/recofusing anggaran	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator EP	Adanya kebijakan pembatasan kegiatan PPKM level 3 karena pandemi (covid-19 omicron)	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
6.	Dokumen Perjanjian Kinerja Terselip (tidak ditemukan)	Sub Koordinator EP	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO)	Penyampaian PK tidak tepat Waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan



Andi Guntur Asapa
Penata (III/c)
NIP. 19840724 200712 1 001

PETA RISIKO

Unit organisasi : Koordinator Kelompok Perencanaan, Ditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang Akuntabel
2. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja secara tepat waktu

	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RAN KING
1.	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan	Beberapa data dukung yang disampaikan unit kerja terkait belum update dan tidak valid	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8,44	1
2.	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai ketentuan PM 85/2020	Adanya Pergantian Tim penyusun Perjanjian Kinerja sehingga belum memahami peraturan terkait SAKIP	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	7,00	2
3.	Persetujuan Perjanjian Kinerja belum ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian	Dirjen tidak berada di tempat karena melakukan monitoring ke luar daerah	Penyampaian PK tidak tepat Waktu	4,58	3
4.	Rapat persiapan dan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi adanya kebijakan penyesuaian anggaran/recofusing anggaran	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel	4,33	4
5.	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian	Adanya kebijakan pembatasan kegiatan PPKM level 3 karena pandemi (covid-19 omicron)	Penyusunan PK Ditjen tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4,17	5
6.	Dokumen Perjanjian Kinerja Terselip (tidak ditemukan)	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi (jadwal piket WFH/WFO)	Penyampaian PK tidak tepat Waktu	3,61	6

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan


Andi Guntur Asapa

Penata (III/c)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT
NO. 8 JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Organisasi** : Koordinator Kelompok Perencanaan, Ditjen Perkeretaapian
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : 1. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang Akuntabel
2. Menghasilkan Dokumen Perjanjian Kinerja secara tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Kompilasi dan analisis data tidak dapat dilaksanakan	Beberapa data dukung yang disampaikan unit kerja terkait belum update dan tidak valid	Menyampaikan surat permintaan data target kinerja kepada unit kerja terkait agar melakukan penyampaian data secara tepat waktu	Januari 2022	Data target kinerja yang update dan valid	Surat permintaan, nota dinas, undangan rapat pembahasan	Januari 2022	Menyusun konsep surat permintaan data target kinerja	Januari 2022, Desember 2020
2	Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai ketentuan PM 85/2020	Adanya Pergantian Tim penyusun Perjanjian Kinerja sehingga	Penyusunan buku panduan dokumen SAKIP termasuk	Januari 2022	Tata cara Penyusunan dokumen SAKIP	Surat dan Buku panduan SAKIP	Januari 2022	Pengumpulan regulasi terkait tata cara penyelenggaraan SAKIP di	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
		belum memahami peraturan terkait SAKIP	perjanjian Kinerja					lingkungan Kemenhub	
3	Persetujuan Perjanjian Kinerja belum ditanda tangan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian	Dirjen tidak berada di tempat karena melakukan monitoring ke luar daerah	Koordinasi dengan Sekretaris/Ajudan terkait agenda pimpinan	November 2022	Data target kinerja yang update dan valid	Surat permintaan, nota dinas, rapat pembahasan	November 2020	Mengecek agenda pimpinan melalui google kalender	Januari 2022
4	Rapat persiapan dan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 tertunda pelaksanaannya	Anggaran pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi adanya kebijakan penyesuaian anggaran/recofusing anggaran	Usulan revisi dokumen anggaran	Januari 2022	Tata cara penyelenggaraan SAKIP termasuk tata cara penyusunan PK secara informatif	Surat dan Buku panduan SAKIP	Januari 2022	Inventaris sisa anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Oktober 2020
5	Tertundanya pelaksanaan rapat pembahasan draft Perjanjian Kinerja Ditjen Perkeretaapian	Adanya kebijakan pembatasan kegiatan PPKM level 3 karena pandemi (covid-19 omicron)	Menjadwalkan kegiatan rapat antar Bagian dan Subbag melalui aplikasi zoom	Januari 2022	Sinkronisasi dan updating agenda pimpinan dengan jadwal kegiatan unit kerja	Google kalender, WA, Aplikasi Zoom	Januari 2022	Mengingatkan staf untuk menyusun jadwal kegiatan	Januari 2022
6	Dokumen Perjanjian Kinerja Terselip (tidak ditemukan)	Staf TU Pimpinan yang bertugas terbatas karena pandemi	Koordinasi dengan TU pimpinan untuk menginput Dokumen	Januari 2022	Usulan revisi dokumen anggaran untuk penambahan	Surat usulan	Januari 2022	Mengecek Buku Ekspedisi dan Portal DJKA	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
		(jadwal piket WFH/WFO)	lengkap pada aplikasi surat di portal DJKA		anggaran kegiatan				

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Evaluasi & Pelaporan



Andi Guntur Asapa

Penata (III/c)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Semesteran
Tujuan : 1. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang valid pada tiap publikasi
2. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Rapat koordinasi penyusunan Statistik Semesteran Bidang Perkeretaapian tertunda	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan kegiatan prioritas lainnya	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu
2.	Draft Dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian belum dapat difinalisasi	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data statistik belum disampaikan/ masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat	Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu
3.	Pengisian data statistik bidang perkeretaapian tidak sesuai dengan format	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data yang disampaikan Direktorat tidak lengkap dari sumber data/operator atau terdapat anomali data	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid
4.	Penyampaian dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian kepada Pustikom tertunda	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data statistik belum mendapat persetujuan pimpinan	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu
5.	Terdapat perbedaan data antara data statistik dan dokumen pelaporan kinerja	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data yang disampaikan Direktorat tidak sama dengan data pelaporan kinerja dan tidak dilakukan pengecekan sebelum dipublikasikan	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid dan konsisten pada tiap publikasi

Jakarta, Februari 2022

Perencana Ahli Muda

Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Semesteran
Tujuan : 1. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang valid dan konsisten pada tiap publikasi
2. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Terdapat perbedaan data antara data statistik dan dokumen pelaporan kinerja	Data yang disampaikan Direktorat tidak sama dengan data pelaporan kinerja dan tidak dilakukan pengecekan sebelum dipublikasikan	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid	8,16	1
2.	Draft Dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian belum dapat difinalisasi	Data statistik belum disampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat	Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu	7,80	2
3.	Pengisian data statistik bidang perkeretaapian tidak sesuai dengan format	Data yang disampaikan Direktorat tidak lengkap dari sumber data/operator	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid	5,44	3
4.	Penyampaian dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian kepada Pustikom tertunda	Data statistik belum mendapat persetujuan pimpinan atau terdapat anomali data	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu	5,28	4
5.	Rapat koordinasi penyusunan Statistik Semesteran Bidang Perkeretaapian tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan kegiatan prioritas lainnya	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu	2,88	5

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan

ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : 1. Pengelolaan Konten Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan aktual

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Terdapat perbedaan data antara data statistik dan dokumen pelaporan kinerja	Data yang disampaikan Direktorat tidak sama dengan data pelaporan kinerja dan tidak dilakukan pengecekan sebelum dipublikasikan	Pengecekan Data dan Rapat koordinasi kepada semua PIC terkait penyusunan data statistik	Januari dan Juli 2022	Mengkonfirmasi kepada Direktorat jika terdapat anomali data	Whats App dan Portal DJKA	Januari dan Juli 2022	Berkoordinasi Intensif dengan PIC Direktorat dan pelaporan kinerja untuk memastikan bahwa Data Statistik dan Pelaporan Kinerja sudah sesuai	Januari dan Juli 2022
2	Draft Dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian belum dapat difinalisasi	Data statistik belum disampaikan/ masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat	Mengikutsertakan Direktorat teknis dalam proses <i>coaching clinic</i> yang diselenggarakan Pustikom	Januari dan Juli 2022	Menyampaikan kebutuhan data dan tenggat waktu pengumpulan data serta memastikan tidak ada kendala	Surat, Rapat Koordinasi	Januari dan Juli 2022	Penyampaian Surat Permohonan Data dengan batas waktu melalui Portal DJKA dan Whats App	Januari dan Juli 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Pengisian data statistik bidang perkeretaapian tidak sesuai dengan format	Data yang disampaikan Direktorat tidak lengkap dari sumber data/operator atau terdapat anomali data	Rapat koordinasi kepada semua PIC data di Direktorat untuk memahami proses penyusunan data statistik	Januari dan Juli 2022	Kebutuhan kelengkapan dan koordinasi pengelolaan data	Surat, Rapat Koordinasi	Januari dan Juli 2022	Penyampaian Surat Permohonan Data dengan batas waktu melalui Portal DJKA dan Whats App	Januari dan Juli 2022
4	Rapat koordinasi penyusunan Statistik Semesteran Bidang Perkeretaapian tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan kegiatan prioritas lainnya	Menyisipkan agenda pembahasan data statistik bersamaan dengan agenda lain yang terkait	Januari dan Juli 2022	Menyampaikan agenda rapat kepada PIC Direktorat	Whats App, Portal DJKA	Januari dan Juli 2022	Melakukan komunikasi melalui Whats App dan telepon serta peringatan rapat melalui Portal DJKA	Januari dan Juli 2022
5.	Penyampaian dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian kepada Pustikom tertunda	Data statistik belum mendapat persetujuan pimpinan	Persetujuan melalui media digital	Januari dan Juli 2022	Menyampaikan Persetujuan data statistik bidang perkeretaapian	Whats App dan Portal DJKA	Januari dan Juli 2022	Berkoordinasi Intensif dengan PIC TU agar dokumen dapat disetujui pimpinan tepat waktu	Januari dan Juli 2022

Jakarta, Februari 2022
Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan



ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Tahunan
Tujuan : 1. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang valid dan konsisten pada tiap publikasi
2. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Rapat koordinasi penyusunan Statistik Tahunan Bidang Perkeretaapian tertunda	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan kegiatan prioritas lainnya	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu
2.	Draft Dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian belum dapat difinalisasi	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data statistik belum disampaikan/ masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat	Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu
3.	Pengisian data statistik bidang perkeretaapian tidak sesuai dengan format	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data yang disampaikan Direktorat tidak lengkap dari sumber data/operator atau terdapat anomali data	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid
4.	Penyampaian dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian kepada Pustikom tertunda	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data statistik belum mendapat persetujuan pimpinan	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu
5.	Terdapat perbedaan data antara data statistik dan dokumen pelaporan kinerja	Kelompok Evaluasi dan Pelaporan	Data yang disampaikan Direktorat tidak sama dengan data pelaporan kinerja dan tidak dilakukan pengecekan sebelum dipublikasikan	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid dan konsisten pada tiap publikasi

**Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan**

ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Tahunan
Tujuan : 1. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang valid dan konsisten pada tiap publikasi
2. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Terdapat perbedaan data antara data statistik dan dokumen pelaporan kinerja	Data yang disampaikan Direktorat tidak sama dengan data pelaporan kinerja dan tidak dilakukan pengecekan sebelum dipublikasikan	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid	8,16	1
2.	Draft Dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian belum dapat difinalisasi	Data statistik belum disampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat	Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak selesai tepat waktu	7,80	2
3.	Pengisian data statistik bidang perkeretaapian tidak sesuai dengan format	Data yang disampaikan Direktorat tidak lengkap dari sumber data/operator	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak valid	5,44	3
4.	Penyampaian dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian kepada Pustikom tertunda	Data statistik belum mendapat persetujuan pimpinan atau terdapat anomali data	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu	5,28	4
5.	Rapat koordinasi penyusunan Statistik Tahunan Bidang Perkeretaapian tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan kegiatan prioritas lainnya	Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian tidak tepat waktu	2,88	5

**Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan**

ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

- Unit Kerja** : Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Pengelolaan Data Statistik Bidang Perkeretaapian Tahunan
Kegiatan : 1. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang valid dan konsisten pada tiap publikasi
2. Tersusunnya Data Statistik Bidang Perkeretaapian yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Terdapat perbedaan data antara data statistik dan dokumen pelaporan kinerja	Data yang disampaikan Direktorat tidak sama dengan data pelaporan kinerja dan tidak dilakukan pengecekan sebelum dipublikasikan	Pengecekan Data dan Rapat koordinasi kepada semua PIC terkait penyusunan data statistik	Januari 2022	Mengkonfirmasi kepada Direktorat jika terdapat anomali data	Whats App dan Portal DJKA	Januari 2022	Berkoordinasi Intensif dengan PIC Direktorat dan pelaporan kinerja untuk memastikan bahwa Data Statistik dan Pelaporan Kinerja sudah sesuai	Januari 2022
2	Draft Dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian belum dapat difinalisasi	Data statistik belum disampaikan/ masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat	Mengikutsertakan Direktorat teknis dalam <i>coaching clinic</i> yang diselenggarakan Pustikom	Januari 2022	Menyampaikan kebutuhan data dan tenggat waktu pengumpulan data serta memastikan tidak ada kendala	Surat, Rapat Koordinasi	Januari 2022	Penyampaian Surat Permohonan Data dengan batas waktu melalui Portal DJKA dan Whats App	Januari 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Pengisian data statistik bidang perkeretaapian tidak sesuai dengan format	Data yang disampaikan Direktorat tidak lengkap dari sumber data/operator atau terdapat anomali data	Rapat koordinasi kepada semua PIC data di Direktorat untuk memahami proses penyusunan data statistik	Januari 2022	Kebutuhan kelengkapan dan koordinasi pengelolaan data	Surat, Rapat Koordinasi	Januari 2022	Penyampaian Surat Permohonan Data dengan batas waktu melalui Portal DJKA dan Whats App	Januari 2022
4	Rapat koordinasi penyusunan Statistik Tahunan Bidang Perkeretaapian tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan kegiatan prioritas lainnya	Menyisipkan agenda pembahasan data statistik bersamaan dengan agenda lain yang terkait	Januari 2022	Menyampaikan agenda rapat kepada PIC Direktorat	Whats App, Portal DJKA	Januari 2022	Melakukan komunikasi melalui Whats App dan telepon serta peringatan rapat melalui Portal DJKA	Januari 2022
5.	Penyampaian dokumen Data Statistik Bidang Perkeretaapian kepada Pustikom tertunda	Data statistik belum mendapat persetujuan pimpinan	Persetujuan melalui media digital	Januari 2022	Menyampaikan Persetujuan data statistik bidang perkeretaapian	Whats App dan Portal DJKA	Januari 2022	Berkoordinasi Intensif dengan PIC TU agar dokumen dapat disetujui pimpinan tepat waktu	Januari 2022

**Perencana Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Kelompok
Evaluasi dan Pelaporan**



ANDI GUNTUR ASAPA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840724 200712 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Kelompok : Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Pemrosesan Revisi Anggaran Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	SDM Tidak Memahami Standar Operasi Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Belum efisien dan efektifnya Pemrosesan revisi anggaran (Proses Usulan, Data Dukung dan Batas Waktu)
2.	Kesalahan Pemrosesan Revisi Anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Pegawai kurang memahami pembagian kewenangan dalam pemrosesan revisi anggaran sesuai Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun berjalan	Kesalahan administrasi proses revisi anggaran saat diusulkan ke Kementerian Keuangan
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung usulan revisi	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Data dukung usulan revisi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja
4.	Kesalahan data dalam usulan revisi anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan perbandingan dengan data lain yang lebih valid	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja
5.	Adanya tambahan kebutuhan data dukung oleh pihak Kementerian Keuangan	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Adanya data dukung khusus yang diperlukan untuk menyetujui usulan revisi oleh Kementerian Keuangan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
6.	Usulan revisi anggaran ditolak oleh Kemenkeu	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Ketidaksesuaian data dukung, tidak sesuai dengan program DJKA, tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah pada tahun berjalan	Peningkatan anggaran yang tidak terserap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022
 Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
 selaku Koordinator Kelompok Keuangan



SOFIA AVIANTIE
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Kelompok : Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Pemrosesan Revisi Anggaran Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	SDM Tidak Memahami Standar Operasi Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Belum efisien dan efektifnya Pemrosesan revisi anggaran (Proses Usulan, Data Dukung dan Batas Waktu)	1,67	6
2.	Kesalahan Pemrosesan Revisi Anggaran	Pegawai kurang memahami pembagian kewenangan dalam pemrosesan revisi anggaran sesuai Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun berjalan	Kesalahan administrasi proses revisi anggaran saat diusulkan ke Kementerian Keuangan	2,00	4
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung usulan revisi	Data dukung usulan revisi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	3,00	3
4.	Kesalahan data dalam usulan revisi anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan perbandingan dengan data lain yang lebih valid	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	3,56	2
5.	Adanya tambahan kebutuhan data dukung oleh pihak Kementerian Keuangan	Adanya data dukung khusus yang diperlukan untuk menyetujui usulan revisi oleh Kementerian Keuangan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	7,11	1

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
6.	Usulan revisi anggaran ditolak oleh kemenkeu	Ketidaksesuaian data dukung, tidak sesuai dengan program DJKA, tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah pada tahun berjalan	Peningkatan anggaran yang tidak terserap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2,00	4

Jakarta, Januari 2022
 Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
 selaku Koordinator Kelompok Keuangan



SOFIA AVIANTIE
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Kelompok : Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Pemrosesan Revisi Anggaran Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	SDM Tidak Memahami Standar Operasi Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Pencetakan buku peraturan Tata Cara Revisi Anggaran Kemenkeu dan Kemenhub sebagai pedoman dasar revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara revisi kepada setiap staf pemroses revisi	Diskusi antar staf dan pimpinan dalam pengambilan tindakan proses revisi	Januari s.d Desember 2022	Pengontrolan kualitas usulan revisi dan posisi setiap usulan yang diproses bagian Keuangan	Januari s.d Desember 2022
2	Kesalahan Pemrosesan Revisi Anggaran	Pegawai kurang memahami pembagian kewenangan dalam pemrosesan revisi anggaran sesuai Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun berjalan	Pencetakan buku peraturan Tata Cara Revisi Anggaran Kemenkeu dan Kemenhub sebagai pedoman dasar revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara revisi kepada setiap staf pemroses revisi	Koordinasi yang intensif dan diskusi antara pengusul, staf pemroses revisi dan pihak Kementerian Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Pemantauan kesesuaian jenis revisi dengan peraturan terkait dan koordinasi intensif dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Keterlambatan penyampaian data dukung usulan revisi	Data dukung usulan revisi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Koordinasi yang berkesinambungan dalam melengkapi data dukung	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian informasi kebutuhan data dukung sesuai dengan jenis usulan revisi	Koordinasi secara intensif dengan pengusul revisi anggaran.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi awal usulan revisi anggaran untuk memastikan kebutuhan data dukung	Januari s.d Desember 2022
4	Kesalahan data dalam usulan revisi anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan perbandingan dengan data lain yang lebih valid	Pengecekan data pada Bagian Keuangan dan Balai/Satker yang mengajukan usulan revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian informasi sumber perbandingan yang sesuai dengan jenis usulan revisi	Koordinasi secara intensif dengan pengusul revisi anggaran dalam memastikan kesesuaian data.	Januari s.d Desember 2022	Membandingkan data dengan pihak terkait (Kemenkeu, Bappenas dll)	Januari s.d Desember 2022
5	Adanya tambahan kebutuhan data dukung oleh pihak Kementerian Keuangan	Adanya data dukung khusus yang diperlukan untuk menyetujui usulan revisi oleh Kementerian Keuangan	Inventarisir kebutuhan data dukung sesuai usulan revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian inventarisasi kebutuhan data dukung sesuai dengan revisi yang diusulkan	Koordinasi Intensif dengan pihak terkait untuk mengontrol batas waktu dan kualitas data dukung yang disampaikan.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi awal dengan Kemenkeu dan Satker untuk persiapan data dukung khusus	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
6	Usulan revisi anggaran ditolak oleh kemenkeu	Ketidaksesuaian data dukung, tidak sesuai dengan program DJKA, tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah pada tahun berjalan	Koordinasi dengan Perencanaan terkait kesesuaian usulan dan perencanaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian kebijakan pada tahun berjalan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Pemerintah	Koordinasi Intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kesesuaian revisi	Januari s.d Desember 2022	Identifikasi kesesuaian usulan kegiatan dengan program Ditjen KA dan Kemenkeu	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
 Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
 selaku Koordinator Kelompok Keuangan



SOFIA AMANTIE
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Kelompok : Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Satker / Balai tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan	Laporan yang dihasilkan tidak sesuai
2.	Kesalahan Pemrosesan	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Satker / Balai menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan yang belum update	Kesalahan dalam proses pemutakhiran data laporan realisasi/penyerapan anggaran pendapatan dan belanja
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung pelaporan PNBP	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Data dukung pelaporan PNBPi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja
4.	Kesalahan data dalam pelaporan realisasi PNBP	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan rekap dan atau pelaporan realisasi PNBP	Keterlambatan penginputan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
selaku Koordinator Kelompok Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Kelompok : Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Satker / Balai tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan	Laporan yang dihasilkan tidak sesuai	1,67	4
2.	Kesalahan Pemrosesan	Satker / Balai menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan yang belum update	Kesalahan dalam proses pemutakhiran data laporan realisasi/penyerapan anggaran pendapatan dan belanja	2,00	3
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung pelaporan PNBP	Data dukung pelaporan PNBP yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	3,00	2
4.	Kesalahan data dalam pelaporan realisasi PNBP	Balai/Satker pengusul tidak melakukan rekap dan atau pelaporan realisasi PNBP	Keterlambatan penginputan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	6,22	1

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
selaku Koordinator Kelompok Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN


Kelompok : Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Satker / Balai tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan	Kebijakan untuk menerima calon pegawai baru	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBP	Diskusi antar staf dan pimpinan dalam pengambilan tindakan proses Pengusulan dan monitoring PNBP	Januari s.d Desember 2022	Pengontrolan kualitas usulan PNBP dan posisi setiap usulan yang diproses bagian Keuangan	Januari s.d Desember 2022
2	Kesalahan Pemrosesan	Satker / Balai menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan yang belum update	Mengikuti dan mengadakan sosialisasi tata cara penginputan realisasi PNBP berdasarkan peraturan tahun berjalan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBP	Koordinasi yang intensif dan diskusi antara pengusul, staf pemroses PNBP dan pihak Kementerian Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Pemantauan kesesuaian jenis PNBP dengan peraturan terkait dan koordinasi intensif dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Keterlambatan penyampaian data dukung pelaporan PNBPNBP	Data dukung pelaporan PNBPNBP yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Koordinasi awal sebelum penginputan realisasi PNBPNBP	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBPNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBPNBP	Koordinasi secara intensif dengan pengusul PNBPNBP anggaran.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi awal usulan PNBPNBP anggaran untuk memastikan kebutuhan data dukung	Januari s.d Desember 2022
4	Kesalahan data dalam pelaporan realisasi PNBPNBP	Balai/Satker pengusul tidak melakukan rekap dan atau pelaporan realisasi PNBPNBP	Melakukan kroscek untuk angka realisasi PNBPNBP	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBPNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBPNBP	Koordinasi secara intensif dengan pengusul PNBPNBP anggaran dalam memastikan kesesuaian data.	Januari s.d Desember 2022	Membandingkan data dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya
selaku Koordinator Kelompok Keuangan



SOFIA AVIANTIE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Kelompok : Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan : Pemrosesan Revisi Anggaran Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	SDM Tidak Memahami Standar Operasi Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Belum efisien dan efektifnya Pemrosesan revisi anggaran (Proses Usulan, Data Dukung dan Batas Waktu)
2.	Kesalahan Pemrosesan Revisi Anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Pegawai kurang memahami pembagian kewenangan dalam pemrosesan revisi anggaran sesuai Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun berjalan	Kesalahan administrasi proses revisi anggaran saat diusulkan ke Kementerian Keuangan
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung usulan revisi	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Data dukung usulan revisi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja
4.	Kesalahan data dalam usulan revisi anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan perbandingan dengan data lain yang lebih valid	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja
5.	Adanya tambahan kebutuhan data dukung oleh pihak Kementerian Keuangan	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Adanya data dukung khusus yang diperlukan untuk menyetujui usulan revisi oleh Kementerian Keuangan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
6.	Usulan revisi anggaran ditolak oleh Kemenkeu	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Ketidaksiesuaian data dukung, tidak sesuai dengan program DJKA, tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah pada tahun berjalan	Peningkatan anggaran yang tidak terserap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022
 Analisis Anggaran Ahli Muda
 selaku Sub-Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran



IRVAN ARIESTIANA

Pembina (IV/a)

NIP. 19790623 200502 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Kelompok : Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan : Pemrosesan Revisi Anggaran Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	SDM Tidak Memahami Standar Operasi Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Belum efisien dan efektifnya Pemrosesan revisi anggaran (Proses Usulan, Data Dukung dan Batas Waktu)	1,67	6
2.	Kesalahan Pemrosesan Revisi Anggaran	Pegawai kurang memahami pembagian kewenangan dalam pemrosesan revisi anggaran sesuai Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun berjalan	Kesalahan administrasi proses revisi anggaran saat diusulkan ke Kementerian Keuangan	2,00	4
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung usulan revisi	Data dukung usulan revisi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	3,00	3
4.	Kesalahan data dalam usulan revisi anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan perbandingan dengan data lain yang lebih valid	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	3,56	2
5.	Adanya tambahan kebutuhan data dukung oleh pihak Kementerian Keuangan	Adanya data dukung khusus yang diperlukan untuk menyetujui usulan revisi oleh Kementerian Keuangan	Keterlambatan Persetujuan Revisi Anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	7,11	1
6.	Usulan revisi anggaran ditolak oleh kemenkeu	Ketidaksiesuaian data dukung, tidak sesuai dengan program DJKA, tidak sesuai dengan	Peningkatan anggaran yang tidak terserap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2,00	4

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
		kebijakan penganggaran pemerintah pada tahun berjalan			

Jakarta, Januari 2022
Analisis Anggaran Ahli Muda
selaku Sub-Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran



IRVAN ARIESTIANA
Pembina (IV/a)
NIP. 19790623 200502 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Kelompok : Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan : Pemrosesan Revisi Anggaran Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	SDM Tidak Memahami Standar Operasi Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Ditjen Perkeretaapian	Pencetakan buku peraturan Tata Cara Revisi Anggaran Kemenkeu dan Kemenhub sebagai pedoman dasar revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara revisi kepada setiap staf pemroses revisi	Diskusi antar staf dan pimpinan dalam pengambilan tindakan proses revisi	Januari s.d Desember 2022	Pengontrolan kualitas usulan revisi dan posisi setiap usulan yang diproses bagian Keuangan	Januari s.d Desember 2022
2	Kesalahan Pemrosesan Revisi Anggaran	Pegawai kurang memahami pembagian kewenangan dalam pemrosesan revisi anggaran sesuai Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran pada tahun berjalan	Pencetakan buku peraturan Tata Cara Revisi Anggaran Kemenkeu dan Kemenhub sebagai pedoman dasar revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara revisi kepada setiap staf pemroses revisi	Koordinasi yg intensif dan diskusi antara pengusul, staf pemroses revisi dan pihak Kementerian Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Pemantauan kesesuaian jenis revisi dengan peraturan terkait dan koordinasi intensif dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Keterlambatan penyampaian data dukung usulan revisi	Data dukung usulan revisi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Koordinasi yang berkesinambungan dalam melengkapi data dukung	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian informasi kebutuhan data dukung sesuai dengan jenis usulan revisi	Koordinasi secara intensif dengan pengusul revisi anggaran.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi awal usulan revisi anggaran untuk memastikan kebutuhan data dukung	Januari s.d Desember 2022
4	Kesalahan data dalam usulan revisi anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan perbandingan dengan data lain yang lebih valid	Pengecekan data pada Bagian Keuangan dan Balai/Satker yang mengajukan usulan revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian informasi sumber perbandingan yang sesuai dengan jenis usulan revisi	Koordinasi secara intensif dengan pengusul revisi anggaran dalam memastikan kesesuaian data.	Januari s.d Desember 2022	Membandingkan data dengan pihak terkait (Kemenkeu, Bappenas dll)	Januari s.d Desember 2022
5	Adanya tambahan kebutuhan data dukung oleh pihak Kementerian Keuangan	Adanya data dukung khusus yang diperlukan untuk menyetujui usulan revisi oleh Kementerian Keuangan	Inventarisir kebutuhan data dukung sesuai usulan revisi anggaran	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian inventarisasi kebutuhan data dukung sesuai dengan revisi yang diusulkan	Koordinasi Intensif dengan pihak terkait untuk mengontrol batas waktu dan kualitas data dukung yg disampaikan.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi awal dengan Kemenkeu dan Satker untuk persiapan data dukung khusus	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
6	Usulan revisi anggaran ditolak oleh kemenkeu	Ketidaksesuaian data dukung, tidak sesuai dengan program DJKA, tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah pada tahun berjalan	Koordinasi dengan Perencanaan terkait kesesuaian usulan dan perencanaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian kebijakan pada tahun berjalan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan Pemerintah	Koordinasi Intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kesesuaian revisi	Januari s.d Desember 2022	Identifikasi kesesuaian usulan kegiatan dengan program Ditjen KA dan Kemenkeu	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
 Analis Anggaran Ahli Muda
 selaku Sub-Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran



IRVAN ARIESTIANA
 Pembina (IV/a)

NIP. 19790623 200502 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Kelompok : Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan : Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Satker / Balai tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan	Laporan yang dihasilkan tidak sesuai
2.	Kesalahan Pemrosesan	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Satker / Balai menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan yang belum update	Kesalahan dalam proses pemutakhiran data laporan realisasi/penyerapan anggaran pendapatan dan belanja
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung pelaporan PNBP	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Data dukung pelaporan PNBPi yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja
4.	Kesalahan data dalam pelaporan realisasi PNBP	Kelompok Pelaksanaan Anggaran	Balai/Satker pengusul tidak melakukan rekap dan atau pelaporan realisasi PNBP	Keterlambatan penginputan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja

Jakarta, Januari 2022

Analisis Anggaran Ahli Muda

selaku Sub-Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran



IRVAN ARIESTIANA

Pembina (IV/a)

NIP. 19790623 200502 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Kelompok : Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan : Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Satker / Balai tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan	Laporan yang dihasilkan tidak sesuai	1,67	4
2.	Kesalahan Pemrosesan	Satker / Balai menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan yang belum update	Kesalahan dalam proses pemutakhiran data laporan realisasi/penyerapan anggaran pendapatan dan belanja	2,00	3
3.	Keterlambatan penyampaian data dukung pelaporan PNBP	Data dukung pelaporan PNBP yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Keterlambatan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	3,00	2
4.	Kesalahan data dalam pelaporan realisasi PNBP	Balai/Satker pengusul tidak melakukan rekap dan atau pelaporan realisasi PNBP	Keterlambatan penginputan pelaporan realisasi PNBP sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja	6,22	1

Jakarta, Januari 2022

Analisis Anggaran Ahli Muda

selaku Sub-Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran

IRVAN ARIESTIANA

Pembina (IV/a)

NIP. 19790623 200502 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Kelompok : Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan : Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Keterbatasan Kualitas SDM Pemroses revisi anggaran	Satker / Balai tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan	Kebijakan untuk menerima calon pegawai baru	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBP	Diskusi antar staf dan pimpinan dalam pengambilan tindakan proses Pengusulan dan monitoring PNBP	Januari s.d Desember 2021	Pengontrolan kualitas usulan PNBP dan posisi setiap usulan yang diproses bagian Keuangan	Januari s.d Desember 2022
2	Kesalahan Pemrosesan	Satker / Balai menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Belanja dan Anggaran Pendapatan yang belum update	Mengikuti dan mengadakan sosialisasi tata cara penginputan realisasi PNBP berdasarkan peraturan tahun berjalan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBP	Koordinasi yg intensif dan diskusi antara pengusul, staf pemroses PNBP dan pihak Kementerian Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Pemantauan kesesuaian jenis PNBP dengan peraturan terkait dan koordinasi intensif dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
3	Keterlambatan penyampaian data dukung pelaporan PNBPNBP	Data dukung pelaporan PNBPNBP yang dibutuhkan, masih dalam proses penyusunan dan persetujuan	Koordinasi awal sebelum penginputan realisasi PNBPNBP	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBPNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBPNBP	Koordinasi secara intensif dengan pengusul PNBPNBP anggaran.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi awal usulan PNBPNBP anggaran untuk memastikan kebutuhan data dukung	Januari s.d Desember 2022
4	Kesalahan data dalam pelaporan realisasi PNBPNBP	Balai/Satker pengusul tidak melakukan rekap dan atau pelaporan realisasi PNBPNBP	Melakukan kroscek untuk angka realisasi PNBPNBP	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan tata cara monitoring PNBPNBP kepada setiap staf pemroses pengusulan PNBPNBP	Koordinasi secara intensif dengan pengusul PNBPNBP anggaran dalam memastikan kesesuaian data.	Januari s.d Desember 2022	Membandingkan data dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Analisis Anggaran Ahli Muda
selaku Sub-Koordinator Kelompok Pelaksanaan Anggaran



IRVAN ARIESTIANA
Pembina (IV/a)

NIP. 19790623 200502 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Peninjauan Lapangan

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Kekurangan Data Dukung yang disampaikan	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Ketidaktahuan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Belum efisien dan efektifnya waktu penyerahan data dukung pertama sampai dengan lengkap
2	Luasan yang disampaikan pemohon tidak sesuai dengan dilapangan	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Ketidaktahuan pemohon terkait batas tanah DJKA	Kesalahan Nilai Besaran Sewa
3	Data yang diusulkan tidak sama dengan Data yang tertera pada SIMAK BMN DJKA	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Adanya pencatatan yang kurang lengkap pada aplikasi SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktun lebih lama
4	Ada 2 kali penarikan PNBPN	Ditjen Perkeretaapian	Pemohon tidak mengetahui bahwa selain pembayaran Ijin Teknis, pemohon juga diharuskan membayar sewa BMN	Pemohon tidak membayar pemanfaatan sewa BMN
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Ditjen Perkeretaapian	Kekurangan Anggaran untuk peninjauan lapangan karena Kemenkeu meminta dianggarkan dari Setditjen KA	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Peninjauan Lapangan

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Kekurangan Data Dukung yang disampaikan	Ketidaktahuan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Belum efisien dan efektifnya waktu penyerahan data dukung pertama sampai dengan lengkap	5.44	4
2	Luasan yang disampaikan pemohon tidak sesuai dengan dilapangan	Ketidaktahuan pemohon terkait batas tanah DJKA	Kesalahan Nilai Besaran Sewa	9.78	1
3	Data yang diusulkan tidak sama dengan Data yang tertera pada SIMAK BMN DJKA	Adanya pencatatan yang kurang lengkap pada aplikasi SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktun lebih lama	7.33	2
4	Ada 2 kali penarikan PNBPN	Pemohon tidak mengetahui bahwa selain pembayaran Ijin Teknis, pemohon juga diharuskan membayar sewa BMN	Pemohon tidak membayar pemanfaatan sewa BMN	5.33	5
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk peninjauan lapangan karena Kemenkeu meminta dianggarkan dari Setditjen KA	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	6.22	3

Jakarta, Januari 2022
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Peninjauan Lapangan

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
4	Kekurangan Data Dukung yang disampaikan	Ketidaktahuan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Belum efisien dan efektifnya waktu penyerahan data dukung pertama sampai dengan lengkap	Berkirim surat secara formal terkait persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Mei s.d Desember 2022	Menginformasikan kepada pemohon syarat-syarat usulan sewa lahan BMN	Koordinasi dengan Pihak Pemohon	Berkoordinasi dengan pihak pemohon secara informal	Mei s.d Desember 2022
1	Luasan yang disampaikan pemohon tidak sesuai dengan dilapangan	Ketidaktahuan pemohon terkait batas tanah DJKA	Kesalahan Nilai Besaran Sewa	Dilakukan peninjauan lapangan secara bersama dengan semua pihak	Mei s.d Desember 2022	Data Luasan wilayah yang sesuai antara permohonan dengan kondisi lapangan	Koordinasi dengan Pihak terkait di Lingkungan DJKA	Disusunnya Berita Acara Peninjauan Lapangan secara bersama-sama	Mei s.d Desember 2022
2	Data yang diusulkan tidak sama	Adanya pencatatan yang kurang lengkap	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu	Update data BMN yang telah diinventarisasi	Mei s.d Desember 2022	Melengkapi data SIMAK BMN	Koordinasi dengan Pihak Balai/	Memeriksa dan mengupdate data pada SIMAK	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
	dengan Data yang tertera pada SIMAK BMN DJKA	pada aplikasi SIMAK BMN	lebih lama	pada aplikasi SIMAK BMN			Satker di Lingkungan DJKA	BMN secara berkala	
5	Ada 2 kali penarikan PNBPNP	Pemohon tidak mengetahui bahwa selain pembayaran Ijin Teknis, pemohon juga diharuskan membayar sewa BMN	Pemohon tidak membayar pemanfaatan sewa BMN	Berkirim surat secara formal terkait penjelasan kewajiban pembayaran PNBPNP	Mei s.d Desember 2022	Menginformasikan kepada pemohon terkait jenis pembayaran PNBPNP	Koordinasi dengan Pihak Pemohon	Berkoordinasi dengan pihak pemohon secara informal	Mei s.d Desember 2022
3	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk peninjauan lapangan karena Kemenkeu meminta dianggarkan dari Setditjen KA	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	Koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan Revisi Anggaran	Januari s.d Desember 2022	Membuat rencana kebutuhan dana	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Mengusulkan perhitungan kebutuhan anggaran	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda



ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Serah Terima Barang Milik Negara

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Serah Terima Barang Milik Negara belum memenuhi Kriteria Pelaksanaannya	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Data Dukung Pelaksanaan serah terima belum lengkap	Setditjen harus sering mengingatkan
2	Pelaksanaan Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak tepat waktu	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Hasil Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Serah Terima Barang Milik Negara

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Serah Terima Barang Milik Negara belum memenuhi Kriteria Pelaksanaannya	Data Dukung Pelaksanaan serah terima belum lengkap	Setditjen harus sering mengingatkan	4.67	2
2	Pelaksanaan Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak tepat waktu	Hasil Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	10.00	1

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Serah Terima Barang Milik Negara

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
2	Serah Terima Barang Milik Negara belum memenuhi Kriteria Pelaksanaannya	Data Dukung Pelaksanaan serah terima belum lengkap	Setditjen harus sering mengingatkan	Menindaklanjuti melalui surat teguran bagi Balai/Satker yang belum menyampaikan kelengkapan data dukung	Mei s.d Desember 2022	Menginformasikan kepada Balai/satker terkait data dukung yang harus dilengkapi	Koordinasi dengan Pihak Balai/satker terkait	Balai/satker diharapkan memperhatikan pentingnya kelengkapan data dukung	Mei s.d Desember 2022
1	Pelaksanaan Serah Terima	Hasil Serah Terima Pelaksanaan	Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak	Melakukan pengecekan antara hasil pekerjaan	Mei s.d Desember 2022	Kesesuaian Realisasi pekerjaan	Koordinasi dengan Pihak terkait	Balai/satker diharapkan memperhatikan	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
	Operasional Pekerjaan tidak tepat waktu	Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	dapat dilaksanakan	dengan spesifikasi kontrak perjanjian		dengan kontrak perjanjian	di Lingkungan Ditjen Perkeretaapi an	hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	

Jakarta, Januari 2022
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN
 Ahli Muda



ARTHA EKA WIJAYA
 Penata (III/c)
 NIP. 198603092008121003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Negara

Tujuan : Data BMN yang Akutable;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian belum berjalan dengan baik	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Balai/Satker kurang mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Data Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak Update
2	Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Balai/satker belum mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN	Pencatatan BMN yang tidak runut dan rapih
3	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian tidak berjalan tepat waktu	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Balai/Satker tidak melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala (setiap tahun)	Tidak terdapat laporan pengawasan BMN

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Negara

Tujuan : Data BMN yang Akuntabel;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian belum berjalan dengan baik	Balai/Satker kurang mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Data Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak Update	4.00	3
2	Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Balai/satker belum mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN	Pencatatan BMN yang tidak runut dan rapih	8.00	2
3	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian tidak berjalan tepat waktu	Balai/Satker tidak melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala (setiap tahun)	Tidak terdapat laporan pengawasan BMN	13.44	1

Jakarta, Januari 2021

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Negara

Tujuan : Data BMN yang Akutable;

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
3	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian belum berjalan dengan baik	Balai/Satker kurang mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Data Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak Update	Mengadakan Sosialisasi terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mei s.d Desember 2021	Pemberitahuan secara informal maupun formal kepada Balai/Satker	Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Koordinasi secara Informal terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mei s.d Desember 2021
2	Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan	Balai/satker belum mengajukan Penetapan	Pencatatan BMN yang tidak runut dan rapih	Mengirim Surat Dinas Himbauan kepada Balai/Satker terkait	Mei s.d Desember 2021	Pemberitahuan secara informal maupun formal kepada	Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan	Koordinasi secara Informal terkait Pelaksanaan Pengawasan dan	Mei s.d Desember 2021

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
	peraturan yang berlaku	Status Penggunaan BMN				Balai/Satker	dan Pengelolaan BMN	Pengendalian BMN	
1	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian tidak berjalan tepat waktu	Balai/Satker tidak melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala (setiap tahun)	Tidak terdapat laporan pengawasan BMN	Mengirim Surat Teguran kepada Balai/Satker terkait yang belum menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala	Mei s.d Desember 2021	Pemberitahuan secara informal maupun formal kepada Balai/Satker	Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Koordinasi secara Informal terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mei s.d Desember 2021

Jakarta, Januari 2022
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda



ARTHA EKA WIJAYA
Penata (III/c)
NIP. 198603092008121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Inventarisasi dan Penilaian BMN

Tujuan : Data BMN yang Akutable;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Penyerahan Inventarisasi BMN/Revaluasi belum tepat waktu	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Ketidaksesuaian BMN antara data buku dan dilapangan	Belum efisien dan efektifnya proses pencatatan dan inventarisasi BMN
2	Perlu penambahan data dukung BMN yang harus sesuai dengan lapangan	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Formulir pendataan dari Ditjen KN selalu berubah-ubah	Kesalahan pencatatan administrasi yang berulang
3	Data dukung sulit ditemukan dan pencatatan tidak memadai	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Adanya Pencatatan yang kurang lengkap di SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama
4	Data dukung dilapangan sulit ditemukan/diperoleh karena medan yang tidak bisa dijangkau	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Pencarian data dukung BMN di Lapangan tidak Maksimal	Perolehan data dukung BMN jadi terkendala
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Ditjen Perkeretaapian	Kekurangan Anggaran untuk Peninjauan Lapangan	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui
6	Diperlukan Konsultan untuk Inventarisasi Barang Milik Negara	Ditjen Perkeretaapian	Kekurangan Sumber Daya Manusia dan waktu untuk peninjauan lapangan dalam rangka Revaluasi BMN	Memerlukan Anggaran yang Cukup besar

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Inventarisasi dan Penilaian BMN

Tujuan : Data BMN yang Akutable;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Penyerahan Inventarisasi BMN/Revaluasi belum tepat waktu	Ketidaksesuaian BMN antara data buku dan dilapangan	Belum efisien dan efektifnya proses pencatatan dan inventarisasi BMN	5.44	4
2	Perlu penambahan data dukung BMN yang harus sesuai dengan lapangan	Formulir pendataan dari Ditjen KN selalu berubah-ubah	Kesalahan pencatatan administrasi yang berulang	3.89	6
3	Data dukung sulit ditemukan dan pencatatan tidak memadai	Adanya Pencatatan yang kurang lengkap di SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama	7.00	2
4	Data dukung dilapangan sulit ditemukan/diperoleh karena medan yang tidak bisa dijangkau	Pencarian data dukung BMN di Lapangan tidak Maksimal	Perolehan data dukung BMN jadi terkendala	5.44	4
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk Peninjauan Lapangan	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	6.22	3
6	Diperlukan Konsultan untuk Inventarisasi Barang Milik Negara	Kekurangan Sumber Daya Manusia dan waktu untuk peninjauan lapangan dalam rangka Revaluasi BMN	Memerlukan Anggaran yang Cukup besar	10.00	1

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda

ARTHA EKA WIJAYA

Penata (III/c)

NIP. 198603092008121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

Kegiatan : Inventarisasi dan Penilaian BMN

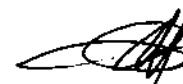
Tujuan : Data BMN yang Akuntabel;

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
4	Penyerahan Inventarisasi BMN/Revaluasi belum tepat waktu	Ketidaksesuaian BMN antara data buku dan dilapangan	Belum efisien dan efektifnya proses pencatatan dan inventarisasi BMN	Melibatkan SDM yang mengerti kondisi lapangan	Mei s.d Desember 2022	Menyesuaikan data buku dan kondisi di lapangan	Koordinasi dengan Pihak Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	SDM lebih memperhatikan kondisi lapangan	Mei s.d Desember 2022
6	Perlu penambahan data dukung BMN yang harus sesuai dengan lapangan	Formulir pendataan dari Ditjen KN selalu berubah-ubah	Kesalahan pencatatan administrasi yang berulang	Mengisi Formulir pendataan lebih Rinci	Mei s.d Desember 2022	Memperbaharui formulir	Koordinasi dengan Pihak terkait di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Pengisian formulir pendataan secara menyeluruh	Mei s.d Desember 2022
2	Data dukung sulit ditemukan dan pencatatan tidak memadai	Adanya Pencatatan yang kurang lengkap di SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama	Mengisi Lengkap BMN yang sudah di inventarisasi	Mei s.d Desember 2022	Melengkapi data SIMAK BMN	Koordinasi dengan Pihak Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Isian pencatatan BMN secara lengkap	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
4	Data dukung dilapangan sulit ditemukan/di peroleh karena medan yang tidak bisa dijangkau	Pencarian data dukung BMN di Lapangan tidak Maksimal	Perolehan data dukung BMN jadi terkendala	Melaksanakan Peninjauan Lapangan secara keseluruhan	Mei s.d Desember 2022	Melakukan peninjauan kembali di lapangan	Koordinasi dengan Pihak Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Peninjauan Lapangan secara keseluruhan	Mei s.d Desember 2022
3	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk Peninjauan Lapangan	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan Revisi Anggaran	Januari s.d Desember 2022	Membuat rencana kebutuhan dana	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Mengusulkan perhitungan kebutuhan anggaran	Januari s.d Desember 2022
1	Diperlukan Konsultan untuk Inventarisasi Barang Milik Negara	Kekurangan Sumber Daya Manusia dan waktu untuk peninjauan lapangan dalam rangka Revaluasi BMN	Memerlukan Anggaran yang Cukup besar	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selain konsultan dalam rangka Inventarisasi BMN	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
Ahli Muda



ARTHA EKA WIJAYA
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 198603092008121003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan
Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Negara
Tujuan : Data BMN yang Akuntabel;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian belum berjalan dengan baik	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Balai/Satker kurang mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Data Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak Update
2	Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Balai/satker belum mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN	Pencatatan BMN yang tidak runut dan rapih
3	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian tidak berjalan tepat waktu	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Balai/Satker tidak melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala (setiap tahun)	Tidak terdapat laporan pengawasan BMN

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Negara

Tujuan : Data BMN yang Akuntabel;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian belum berjalan dengan baik	Balai/Satker kurang mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Data Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak Update	4.00	3
2	Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Balai/satker belum mengajukan Penetapan Status Penggunaan BMN	Pencatatan BMN yang tidak runut dan rapih	8.00	2
3	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian tidak berjalan tepat waktu	Balai/Satker tidak melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala (setiap tahun)	Tidak terdapat laporan pengawasan BMN	13.44	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Negara

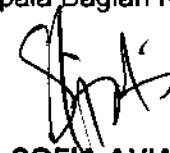
Tujuan : Data BMN yang Akuntabel;

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
3	Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian belum berjalan dengan baik	Balai/Satker kurang mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Data Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak Update	Mengadakan Sosialisasi terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mei s.d Desember 2022	Pemberitahuan secara informal maupun formal kepada Balai/Satker	Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Koordinasi secara Informal terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mei s.d Desember 2022
2	Pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan	Balai/satker belum mengajukan Penetapan	Pencatatan BMN yang tidak runut dan rapih	Mengirim Surat Dinas Himbauan kepada Balai/Satker terkait	Mei s.d Desember 2022	Pemberitahuan secara informal maupun formal kepada	Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan	Koordinasi secara Informal terkait Pelaksanaan Pengawasan dan	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
	peraturan yang berlaku	Status Penggunaan BMN				Balai/Satker	dan Pengelolaan BMN	Pengendalian BMN	
1	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian tidak berjalan tepat waktu	Balai/Satker tidak melaporkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala (setiap tahun)	Tidak terdapat laporan pengawasan BMN	Mengirim Surat Teguran kepada Balai/Satker terkait yang belum menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian secara berkala	Mei s.d Desember 2022	Pemberitahuan secara informal maupun formal kepada Balai/Satker	Koordinasi dengan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	Koordinasi secara Informal terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mei s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan



SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan
Kegiatan : Mengkoordinir Serah Terima Barang Milik Negara
Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Serah Terima Barang Milik Negara belum memenuhi Kriteria Pelaksanaannya	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Data Dukung Pelaksanaan serah terima belum lengkap	Setditjen harus sering mengingatkan
2	Pelaksanaan Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak tepat waktu	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Hasil Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Serah Terima Barang Milik Negara

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Serah Terima Barang Milik Negara belum memenuhi Kriteria Pelaksanaannya	Data Dukung Pelaksanaan serah terima belum lengkap	Setditjen harus sering mengingatkan	4.67	2
2	Pelaksanaan Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak tepat waktu	Hasil Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan	10.00	1

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Serah Terima Barang Milik Negara

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;

2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
2	Serah Terima Barang Milik Negara belum memenuhi Kriteria Pelaksananya	Data Dukung Pelaksanaan serah terima belum lengkap	Setditjen harus sering mengingatkan	Menindaklanjuti melalui surat teguran bagi Balai/Satker yang belum menyampaikan kelengkapan data dukung	Mei s.d Desember 2022	Menginformasikan kepada Balai/satker terkait data dukung yang harus dilengkapi	Koordinasi dengan Pihak Balai/satker terkait	Balai/satker diharapkan memperhatikan pentingnya kelengkapan data dukung	Mei s.d Desember 2022
1	Pelaksanaan Serah Terima	Hasil Serah Terima Pelaksanaan	Serah Terima Operasional Pekerjaan tidak	Melakukan pengecekan antara hasil pekerjaan	Mei s.d Desember 2022	Kesesuaian Realisasi pekerjaan	Koordinasi dengan Pihak terkait di	Balai/satker diharapkan memperhatikan	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
	Operasional Pekerjaan tidak tepat waktu	Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	dapat dilaksanakan	dengan spesifikasi kontrak perjanjian		dengan kontrak perjanjian	Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak perjanjian	

Jakarta, Januari 2022

Kepala/bagian Keuangan



SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan
Kegiatan : Mengkoordinir Peninjauan Lapangan
Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Kekurangan Data Dukung yang disampaikan	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Ketidaktahuan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Belum efisien dan efektifnya waktu penyerahan data dukung pertama sampai dengan lengkap
2	Luasan yang disampaikan pemohon tidak sesuai dengan dilapangan	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Ketidaktahuan pemohon terkait batas tanah DJKA	Kesalahan Nilai Besaran Sewa
3	Data yang diusulkan tidak sama dengan Data yang tertera pada SIMAK BMN DJKA	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Adanya pencatatan yang kurang lengkap pada aplikasi SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama
4	Ada 2 kali penarikan PNBPN	Ditjen Perkeretaapian	Pemohon tidak mengetahui bahwa selain pembayaran Ijin Teknis, pemohon juga diharuskan membayar sewa BMN	Pemohon tidak membayar pemanfaatan sewa BMN
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Ditjen Perkeretaapian	Kekurangan Anggaran untuk peninjauan lapangan karena Kemenkeu meminta dianggarkan dari Setditjen KA	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Peninjauan Lapangan

Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Kekurangan Data Dukung yang disampaikan	Ketidaktahuan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Belum efisien dan efektifnya waktu penyerahan data dukung pertama sampai dengan lengkap	5.44	4
2	Luasan yang disampaikan pemohon tidak sesuai dengan dilapangan	Ketidaktahuan pemohon terkait batas tanah DJKA	Kesalahan Nilai Besaran Sewa	9.78	1
3	Data yang diusulkan tidak sama dengan Data yang tertera pada SIMAK BMN DJKA	Adanya pencatatan yang kurang lengkap pada aplikasi SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktun lebih lama	7.33	2
4	Ada 2 kali penarikan PNBPN	Pemohon tidak mengetahui bahwa selain pembayaran Ijin Teknis, pemohon juga diharuskan membayar sewa BMN	Pemohon tidak membayar pemanfaatan sewa BMN	5.33	5
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk peninjauan lapangan karena Kemenkeu meminta dianggarkan dari Setditjen KA	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	6.22	3

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Peninjauan Lapangan

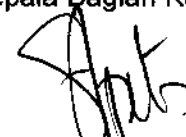
Tujuan : 1. Data yang Akuntabel;
2. Penyelesaian Pekerjaan Tepat Waktu.

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
4	Kekurangan Data Dukung yang disampaikan	Ketidaktahuan pemohon dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Belum efisien dan efektifnya waktu penyerahan data dukung pertama sampai dengan lengkap	Berkirim surat secara formal terkait persyaratan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan BMN	Mei s.d Desember 2022	Menginformasikan kepada pemohon syarat-syarat usulan sewa lahan BMN	Koordinasi dengan Pihak Pemohon	Berkoordinasi dengan pihak pemohon secara informal	Mei s.d Desember 2022
1	Luasan yang disampaikan pemohon tidak sesuai dengan dilapangan	Ketidaktahuan pemohon terkait batas tanah DJKA	Kesalahan Nilai Besaran Sewa	Memerintahkan staf terkait untuk melakukan peninjauan lapangan secara bersama dengan semua pihak	Mei s.d Desember 2022	Data Luasan wilayah yang sesuai antara permohonan dengan kondisi lapangan	Koordinasi dengan Pihak terkait di Lingkungan DJKA	Disusunnya Berita Acara Peninjauan Lapangan secara bersama-sama	Mei s.d Desember 2022
2	Data yang diusulkan tidak sama	Adanya pencatatan yang kurang lengkap	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktun	Monitoring Update data BMN yang telah	Mei s.d Desember 2022	Melengkapi data SIMAK BMN	Koordinasi dengan Pihak Balai/	Memeriksa dan mengupdate data pada SIMAK	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
	dengan Data yang tertera pada SIMAK BMN DJKA	pada aplikasi SIMAK BMN	lebih lama	diinventarisasi pada aplikasi SIMAK BMN			Satker di Lingkungan DJKA	BMN secara berkala	
5	Ada 2 kali penarikan PNBPNBP	Pemohon tidak mengetahui bahwa selain pembayaran Ijin Teknis, pemohon juga diharuskan membayar sewa BMN	Pemohon tidak membayar pemanfaatan sewa BMN	Berkirim surat secara formal terkait penjelasan kewajiban pembayaran PNBPNBP	Mei s.d Desember 2022	Menginformasikan kepada pemohon terkait jenis pembayaran PNBPNBP	Koordinasi dengan Pihak Pemohon	Berkoordinasi dengan pihak pemohon secara informal	Mei s.d Desember 2022
3	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk peninjauan lapangan karena Kemenkeu meminta dianggarkan dari Setditjen KA	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	Koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan Revisi Anggaran	Januari s.d Desember 2022	Membuat rencana kebutuhan dana	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapi an	Mengusulkan perhitungan kebutuhan anggaran	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan



SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Inventarisasi dan Penilaian BMN

Tujuan : Data BMN yang Akutable;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Penyerahan Inventarisasi BMN/Revaluasi belum tepat waktu	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Ketidaksesuaian BMN antara data buku dan dilapangan	Belum efisien dan efektifnya proses pencatatan dan inventarisasi BMN
2	Perlu penambahan data dukung BMN yang harus sesuai dengan lapangan	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Formulir pendataan dari Ditjen KN selalu berubah-ubah	Kesalahan pencatatan administrasi yang berulang
3	Data dukung sulit ditemukan dan pencatatan tidak memadai	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Adanya Pencatatan yang kurang lengkap di SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama
4	Data dukung dilapangan sulit ditemukan/diperoleh karena medan yang tidak bisa dijangkau	Subbag Perbendaharaan dan BMN	Pencarian data dukung BMN di Lapangan tidak Maksimal	Perolehan data dukung BMN jadi terkendala
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Ditjen Perkeretaapian	Kekurangan Anggaran untuk Peninjauan Lapangan	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui
6	Diperlukan Konsultan untuk Inventarisasi Barang Milik Negara	Ditjen Perkeretaapian	Kekurangan Sumber Daya Manusia dan waktu untuk peninjauan lapangan dalam rangka Revaluasi BMN	Memerlukan Anggaran yang Cukup besar

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian

Kegiatan : Mengkoordinir Inventarisasi dan Penilaian BMN

Tujuan : Data BMN yang Akuntabel;

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1	Penyerahan Inventarisasi BMN/Revaluasi belum tepat waktu	Ketidaksesuaian BMN antara data buku dan dilapangan	Belum efisien dan efektifnya proses pencatatan dan inventarisasi BMN	5.44	4
2	Perlu penambahan data dukung BMN yang harus sesuai dengan lapangan	Formulir pendataan dari Ditjen KN selalu berubah-ubah	Kesalahan pencatatan administrasi yang berulang	3.89	6
3	Data dukung sulit ditemukan dan pencatatan tidak memadai	Adanya Pencatatan yang kurang lengkap di SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama	7.00	2
4	Data dukung dilapangan sulit ditemukan/diperoleh karena medan yang tidak bisa dijangkau	Pencarian data dukung BMN di Lapangan tidak Maksimal	Perolehan data dukung BMN jadi terkendala	5.44	4
5	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk Peninjauan Lapangan	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	6.22	3
6	Diperlukan Konsultan untuk Inventarisasi Barang Milik Negara	Kekurangan Sumber Daya Manusia dan waktu untuk peninjauan lapangan dalam rangka Revaluasi BMN	Memerlukan Anggaran yang Cukup besar	10.00	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Kepala Bagian Keuangan

Kegiatan : Mengkoordinir Inventarisasi dan Penilaian BMN

Tujuan : Data BMN yang Akutable;

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
4	Penyerahan Inventarisasi BMN/Revaluasi belum tepat waktu	Ketidaksesuaian BMN antara data buku dan dilapangan	Belum efisien dan efektifnya proses pencatatan dan inventarisasi BMN	Melibatkan SDM yang mengerti kondisi lapangan	Mei s.d Desember 2022	Menyesuaikan data buku dan kondisi di lapangan	Koordinasi dengan Pihak Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	SDM lebih memperhatikan kondisi lapangan	Mei s.d Desember 2022
6	Perlu penambahan data dukung BMN yang harus sesuai dengan lapangan	Formulir pendataan dari Ditjen KN selalu berubah-ubah	Kesalahan pencatatan administrasi yang berulang	Menugaskan staf untuk dapat mengisi Formulir pendataan lebih Rinci	Mei s.d Desember 2022	Memperbaharui formulir	Koordinasi dengan Pihak terkait di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Pengisian formulir pendataan secara menyeluruh	Mei s.d Desember 2022
2	Data dukung sulit ditemukan dan pencatatan tidak memadai	Adanya Pencatatan yang kurang lengkap di SIMAK BMN	Pencatatan Inventarisasi BMN memakan waktu lebih lama	Menugaskan staf untuk dapat Mengisi Lengkap BMN yang sudah di inventarisasi	Mei s.d Desember 2022	Melengkapi data SIMAK BMN	Koordinasi dengan Pihak Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Isian pencatatan BMN secara lengkap	Mei s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
4	Data dukung dilapangan sulit ditemukan/di peroleh karena medan yang tidak bisa dijangkau	Pencarian data dukung BMN di Lapangan tidak Maksimal	Perolehan data dukung BMN jadi terkendala	Menugaskan staf untuk dapat Melaksanakan Peninjauan Lapangan secara keseluruhan	Mei s.d Desember 2022	Melakukan peninjauan kembali di lapangan	Koordinasi dengan Pihak Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Peninjauan Lapangan secara keseluruhan	Mei s.d Desember 2022
3	Diperlukan Revisi Anggaran	Kekurangan Anggaran untuk Peninjauan Lapangan	Persetujuan Revisi Anggaran belum tentu disetujui	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan Revisi Anggaran	Januari s.d Desember 2022	Membuat rencana kebutuhan dana	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Mengusulkan perhitungan kebutuhan anggaran	Januari s.d Desember 2022
1	Diperlukan Konsultan untuk Inventarisasi Barang Milik Negara	Kekurangan Sumber Daya Manusia dan waktu untuk peninjauan lapangan dalam rangka Revaluasi BMN	Memerlukan Anggaran yang Cukup besar	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selain konsultan dalam rangka Inventarisasi BMN	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Koordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perkeretaapian	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Keuangan



SOFIA AVIANTIE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan Kegiatan : Menghasilkan Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian Akurat dan Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Keterbatasan kuantitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan	Subbag Verifikasi Anggaran	Kurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara akurat	Belum efektif dan efisien dalam penyusunan Laporan Keuangan (Pembagian Tugas & Beban Kerja)
2.	Sering terjadinya pergantian operator SAI di Balai dan Satker	Subbag Verifikasi Anggaran	Honor SAI untuk Petugas SAI sangat kecil tapi tanggung jawab terhadap pekerejaan cukup besar	Sering terjadi kesalahan dalam laporan keuangan Satker dan Balai
3.	Aplikasi yang belum mengakomodir data laporan keuangan yang akurat	Subbag Verifikasi Anggaran	Aplikasi belum mendukung hasil pengolahan data yang akurat	Laporan Keuangan yang dihasilkan belum akurat (ada akun yang tidak sesuai)
4.	Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan yang berubah-ubah	Subbag Verifikasi Anggaran	Aturan Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Ke Biro Keuangan yang Selalu berubah-rubah	Penyusunan Laporan Keuangan kadang jadi tidak tepat waktu
5.	Masih sering terjadi kesalahan pemrosesan data terhadap Laporan Keuangan di tingkat satker atau balai	Subbag Verifikasi Anggaran	Pemrosesan laporan Keuangan menjadi terhambat karena masih harus memperbaiki data di tingkat balai dan satker	Laporan Keuangan Yang dikirim ke Biro Keuangan Jadi Terlambat
6.	Masih Kurangnya Fasillitas Kerja seperti Printer dan Scan	Subbag Verifikasi Anggaran	Pengadaan dari Kepegawaian yang masih kurang atas perangkat kerja	Terhambatnya pekerjaan Laporan Keuangan

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan

SOFIA AVIANTIE
Pembina Tk. I (IV/b)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kegiatan : Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan Kegiatan : Menghasilkan Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian Akurat dan Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Keterbatasan kuantitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan	Kurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara akurat	Belum efektif dan efisien dalam penyusunan Laporan Keuangan (Pembagian Tugas & Beban Kerja)	5.44	3
2.	Sering terjadinya pergantian operator SAI di Balai dan Satker	Honor SAI untuk Petugas SAI sangat kecil tapi tanggung jawab terhadap pekerejaan cukup besar	Sering terjadi kesalahan dalam laporan keuangan Satker dan Balai	4.00	6
3.	Aplikasi yang belum mengakomodir data laporan keuangan yang akurat	Aplikasi belum mendukung hasil pengolahan data yang akurat	Laporan Keuangan yang dihasilkan belum akurat (ada akun yang tidak sesuai)	6.22	2
4.	Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan yang berubah-ubah	Aturan Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Ke Biro Keuangan yang Selalu berubah-ubah	Penyusunan Laporan Keuangan kadang jadi tidak tepat waktu	5.00	4
5.	Masih sering terjadi kesalahan pemrosesan data terhadap Laporan Keuangan di tingkat satker atau balai	Pemrosesan laporan Keuangan menjadi terhambat karena masih harus memperbaiki data di tingkat balai dan satker	Laporan Keuangan Yang dikirim ke Biro Keuangan Jadi Terlambat	7.78	1

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
6.	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja seperti Printer dan Scan	Pengadaan dari Kepegawaian yang masih kurang atas perangkat kerja	Terhambatnya pekerjaan Laporan Keuangan	4.44	5

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan



SOFIA AVIANTIE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kegiatan : Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan Setditjen Perkeretaapian

Tujuan Kegiatan : Menghasilkan Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian Akurat dan Tepat Waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Keterbatasan kuantitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan	Kurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara akurat	Penyampaian Surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian Surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Penyampaian kebutuhan pegawai & koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian kebutuhan pegawai & koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan melakukan BIMTEK SAI	Januari s.d Desember 2022
2	Sering terjadinya pergantian operator SAI di Balai dan Satker	Honor SAI untuk Petugas SAI sangat kecil tapi tanggung jawab terhadap	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan agar dapat menaikkan Honor SAI, mengingat tanggung jawab	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kepada pihak terkait tentang Pengusulan	Berkoordinasi dengan Pihak terkait (Biro Keuangan) agar dapat	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan pihak terkait (Biro Keuangan) terhadap	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
		pekerejaan cukup besar	pekerjaan cukup besar		kenaikan honor SAI Bagi Opertor aplikasi SAI	meningkatkan Honor SAI, mengingat tanggung Jawab operator SAI terhadap pekerjaan cukup berat		kenaikan Honor SAI	
3	Aplikasi yang belum mengakomodir data laporan keuangan yang akurat	Aplikasi belum mendukung hasil pengolahan data yang akurat	Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kepada pihak terkait tentang perbaikan aplikasi	Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022
4	Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan yang berubah-ubah	Aturan Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Ke Biro Keuangan yang Selalu berubah-ubah	Berkoordinasi dengan Biro keuangan agar kedepan nya lebih dapat memastikan batas waktu pengumpulan laporan keuangan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian Informasi mengenai batas waktu dalam memberikan data dukung	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membantu memenuhi permintaan data dukung yang dibutuhkan.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi kepada Kantor/Satker/Balai uagar mempercepat pengumpulan data mengingatkan batas jadwal penyampaian data	Januari s.d Desember 2022
5	Masih sering terjadi kesalahan pemrosesan data	Pemrosesan laporan Keuangan menjadi	Melakukan BIMTEK terkait Aplikasi SAI kepada Pegawai yang	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan mengenai	Mengusulkan petugas yang bertanggungja	Januari s.d Desember 2022	Melakukan Sosialsasi BIMTEK khusus Aplikasi	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	terhadap Laporan Keuangan di tingkat satker atau balai	terhambat karena masih harus memperbaiki data di tingkat balai dan satker	bertugas dalam penanganan Laporan Keuangan di Balai dan Satker		penyusunan Laporan Keuangan	wab dalam penyusunan laporan keuangan agar mengikuti pelatihan.		SAI kepada Petugas yang menangani Laporan Keuangan	
6	Masih Kurangnya Fasillitas Kerja seperti Printer dan Scan	Pengadaan dari Kepegawaian yang masih kurang atas perangkat kerja	Melakukan koordinasi dengan kepegawaian untuk dapat memenuhi peralatan kantor yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kembali permintaan peralatan kantor yang dibutuhkan	Melakukan koordinasi dengan kepegawaian untuk dapat memenuhi peralatan kantor yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Melakukan koordinasi kembali dengan kepegawain terkait kekeurangan kebutuhan atas peralatan kantor.	Januari s.d Februari 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan



SOFIA AVIANTIE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670813 199603 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Mengkoordinir Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHP) BPK dan Itjen Pada Satker/Balai
Tujuan Kegiatan : Membantu Balai atau Satker dapat menuntaskan temuan dari Itjen dan BPK

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	SDM dari balai atau satker yang tidak paham atau tidak terlalu peduli atas temuan Itjen dan BPK	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Kurangnya SDM pada balai atau satker yang memang menangani terkait temuan BPK atau Itjen	Temuan pada Balai atau Itjen jadi tidak dapat segera diselesaikan
2.	Jangka Waktu masuknya BPK untuk Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK yang cukup lama	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Waktu Pemantauan dari BPK RI tiap semester dalam 1 tahun	Proses penuntasan atas temuan BPK RI menjadi lebih lama
3.	Batas waktu tindak lanjut sesuai Aturan PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub tidak berjalan dengan baik	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Balai atau Satker tidak mentaati PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub ,di mana adanya batas waktu penyampaian paling lambat 60 hari.	Tanggapan atas Temuan pada Balai atau satker melebihi dari batas waktu dari ketentuan PM 91 Tahun 2015
4.	Data tindak lanjut dari balai atau satker atas temuan BPK atau Itjen yang belum lengkap	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	kurangnya kelengkapan data dari balai atau satker menjadi temuan belum tentu bisa tuntas	Temuan BPK /Itjen dari Balai atau Satker menjadi tidak tuntas

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
5.	Terhambatnya penyampaian dan tindak lanjut dari balai dan satker ke Inspektorat atau BPK	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Turunnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari BPK atau Itjen yang lama ke Sediten Perkeretaapian	Terlambatnya balai atau satker menindak lanjuti temuan BPK atau Itjen
6.	Terhambat perkerejaan terkait LHP BPK atau Itjen	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja yang menunjang	Terhambatnya pekerjaan terkait Laporan Hasil Audit

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan



Sofia Aviantie
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon II : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kegiatan : Mengkoordinir Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHP) BPK dan Itjen Pada Satker/Balai

Tujuan Kegiatan : Membantu Balai atau Satker dapat menuntaskan temuan dari Itjen dan BPK

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	SDM dari balai atau satker yang tidak paham atau tidak terlalu peduli atas temuan Itjen dan BPK	Kurangnya SDM pada balai atau satker yang memang menangani terkait temuan BPK atau Itjen	Temuan pada Balai atau Itjen jadi tidak dapat segera diselesaikan	7.00	3
2.	Jangka Waktu masuknya BPK untuk Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK yang cukup lama	Waktu Pemantauan dari BPK RI tiap persemester dalam 1 tahun	Proses penuntasan atas temuan BPK RI menjadi lebih lama	6.00	2
3.	Batas waktu tindak lanjut sesuai Aturan PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub tidak berjalan dengan baik	Balai atau Satker tidak mentaati PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub ,di mana adanya batas waktu penyampaian paling lambat 60 hari.	Tanggapan atas Temuan pada Balai atau satker melebihi dari batas waktu dari ketentuan PM 91 Tahun 2015	5.00	4
4.	Data tindak lanjut dari balai atau satker atas temuan BPK atau Itjen yang belum lengkap	kurangnya kelengkapan data dari balai atau satker menjadi temuan belum tentu bisa tuntas	Temuan BPK /Itjen dari Balai atau Satker menjadi tidak tuntas	4.67	1

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
5.	Terhambatnya penyampaian dan tindak lanjut dari balai dan satker ke Inspektorat atau BPK	Turunnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari BPK atau Itjen yang lama ke Sesditen Perkeretaapian	Terlambatnya balai atau satker menindak lanjuti temuan BPK atau Itjen	4.00	5
6.	Terhambat perkerejaan terkait LHP BPK atau Itjen	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja yang menunjang	Terhambatnya pekerjaan terkait Laporan Hasil Audt	1.67	6

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan



Sofia Aviantie
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kegiatan : Mengkoordinir Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHP) BPK dan Itjen Pada Satker/Balai

Tujuan Kegiatan : Membantu Balai atau Satker dapat menuntaskan temuan dari Itjen dan BPK

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	SDM dari balai atau satker yang tidak paham atau tidak terlalu peduli atas temuan Itjen dan BPK	Kurangnya SDM pada balai atau satker yang memang menangani terkait temuan BPK atau Itjen	Melakukan koordinasi intens dengan Balai atau Satker terkait tindak lanjut BPK/Itjen	Januari s.d Desember 2022	Bersurat kembali kepada Balai atau satker agar segera menindaterkait temuan BPK atau Itjen	Melakukan kunjungan ke Balai atau satker untuk membantu percepatan tindak lanjut temuan BPK atau Itjen	Januari s.d Desember 2022	Melakukan koordinasi intens dengan Balai atau Satker terkait tindak lanjut BPK/Itjen	Januari s.d Desember 2022
2	Jangka Waktu masuknya BPK untuk Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK yang cukup lama	Waktu Pemantauan dari BPK RI tiap persemester dalam 1 tahun	Berkoordinasi dengan Balai dan Satker agar mempercepat pengumpulan data tindak lanjut temuan BPK/Itjen sambil menunggu	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
			tanggal Pemantau tindak lanjut dari BPK RI		temuan BPK dan Itjen	temuan BPK dan Itjen		temuan BPK dan Itjen	
3	Batas waktu tindak lanjut sesuai Aturan PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub tidak berjalan dengan baik	Balai atau Satker tidak mentaati PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub ,di mana adanya batas waktu penyampaian paling lambat 60 hari.	Berkoordinasi dengan Balai dan Satker dengan melakukan kunjungan langsung untuk melakukan percepatan pengumpulan data dari Balai dan Satker.	Januari s.d Desember 2022	Menginformasikan kembali atau bersurat kembali kepada Balai atau satker agar segera menindakterkait temuan BPK atau Itjen	Mengingatkan kembali balai atau satker untuk tentang Batas Waktu Penyampaian Tindak Lanjut sesuai PM 91 Tahun 2015	Januari s.d Desember 2021	Mengundang balai atau satker untuk sosialisasi PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub, agar Satker dan Balai mengerti Batas waktu penyampaian	Januari s.d Desember 2021
4	Data tindak lanjut dari balai atau satker atas temuan BPK atau Itjen yang belum lengkap	kurangnya kelengkapan data dari balai atau satker menjadi temuan belum tentu bisa tuntas	Berkoordinasi dan melakukan pemantauan serta pengecekan kembali terkait data-data dari balai dan satker terkait temuan	Januari s.d Desember 2022	Menyampaikan ke Satker atau Balai baik melalui berkoordinasi atau bersurat ke Balai atau satker atas kekurangan data	Mengumpulkan Satker dan Balai untuk pengecekan ulang data-data terkait temuan LHP	Januari s.d Desember 2022	Mengumpulkan Satker dan Balai untuk pengecekan ulang data-data terkait temuan LHP	Januari s.d Desember 2022
5	Terhambatnya penyampaian dan tindak lanjut dari	Turunnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari BPK atau Itjen yang lama	Melakukan Koordinasi langsung dengan Itjen	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat		Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	balai dan satker ke Inspektorat atau BPK	ke Sediten Perkeretaapian	atau biro keuangan mengenai LHP yang belum turun ke seditjen		Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas temuan BPK dan Itjen	Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas temuan BPK dan Itjen		Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas temuan BPK dan Itjen	
6	Terhambat perkerejaan terkait LHP BPK atau Itjen	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja yang menunjang	Bersurat kepada kepegawaian terkait kebutuhan sesuai dengan pengajuan kebutuhan atas perangkat kantor	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kembali permintaan peralatan kantor yang dibutuhkan	Melakukan koordinasi dengan kepegawaian untuk dapat memenuhi peralatan kantor yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan kepegawaian terkait kebutuhan peralatan kantor	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Keuangan



Sofia Aviantie
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670813 199603 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III: Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kegiatan : Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan Kegiatan : Menghasilkan Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian Akurat dan Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Keterbatasan kuantitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan	Kurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara akurat	Belum efektif dan efisien dalam penyusunan Laporan Keuangan (Pembagian Tugas & Beban Kerja)	5.44	3
2.	Sering terjadinya pergantian operator SAI di Balai dan Satker	Honor SAI untuk Petugas SAI sangat kecil tapi tanggung jawab terhadap pekerjaan cukup besar	Sering terjadi kesalahan dalam laporan keuangan Satker dan Balai	4.00	6
3.	Aplikasi yang belum mengakomodir data laporan keuangan yang akurat	Aplikasi belum mendukung hasil pengolahan data yang akurat	Laporan Keuangan yang dihasilkan belum akurat (ada akun yang tidak sesuai)	6.22	2
4.	Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan yang berubah-ubah	Aturan Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Ke Biro Keuangan yang Selalu berubah-ubah	Penyusunan Laporan Keuangan kadang jadi tidak tepat waktu	5.00	4
5.	Masih sering terjadi kesalahan pemrosesan data terhadap Laporan Keuangan di tingkat satker atau balai	Pemrosesan laporan Keuangan menjadi terhambat karena masih harus memperbaiki data di tingkat balai dan satker	Laporan Keuangan Yang dikirim ke Biro Keuangan Jadi Terlambat	7.78	1
6.	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja seperti Printer dan Scan	Pengadaan dari Kepegawaian yang masih kurang atas perangkat kerja	Terhambatnya pekerjaan Laporan Keuangan	4.44	5

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Verifikasi Anggaran

Evy Kristiana
Pembina (IV/a)

NIP. 19721224 199803 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan Kegiatan : Menghasilkan Laporan Keuangan Ditjen Perkeretaapian Akurat dan Tepat Waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Keterbatasan kuantitas SDM dalam menyusun Laporan Keuangan	Subbag Verifikasi Anggaran	Kurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara akurat	Belum efektif dan efisien dalam penyusunan Laporan Keuangan (Pembagian Tugas & Beban Kerja)
2.	Sering terjadinya pergantian operator SAI di Balai dan Satker	Subbag Verifikasi Anggaran	Honor SAI untuk Petugas SAI sangat kecil tapi tanggung jawab terhadap pekerjaan cukup besar	Sering terjadi kesalahan dalam laporan keuangan Satker dan Balai
3.	Aplikasi yang belum mengakomodir data laporan keuangan yang akurat	Subbag Verifikasi Anggaran	Aplikasi belum mendukung hasil pengolahan data yang akurat	Laporan Keuangan yang dihasilkan belum akurat (ada akun yang tidak sesuai)
4.	Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan yang berubah-ubah	Subbag Verifikasi Anggaran	Aturan Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Ke Biro Keuangan yang Selalu berubah-rubah	Penyusunan Laporan Keuangan kadang jadi tidak tepat waktu
5.	Masih sering terjadi kesalahan pemrosesan data terhadap Laporan Keuangan di tingkat satker atau balai	Subbag Verifikasi Anggaran	Pemrosesan laporan Keuangan menjadi terhambat karena masih harus memperbaiki data di tingkat balai dan satker	Laporan Keuangan Yang dikirim ke Biro Keuangan Jadi Terlambat
6.	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja seperti Printer dan Scan	Subbag Verifikasi Anggaran	Pengadaan dari Kepegawaian yang masih kurang atas perangkat kerja	Terhambatnya pekerjaan Laporan Keuangan

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Verifikasi Anggaran

Evy Kristiana
Pembina (IV/a)

NIP. 19721224 199803 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan : Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan Setdijen Perkeretaapian
Tujuan Kegiatan : Menghasilkan Laporan Keuangan Dijen Perkeretaapian Akurat dan Tepat Waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Keterbatasan Kuantitas SDM dalam Keuangan	Kurangnya jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara akurat	Penyampaian Surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian Surat permintaan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Penyampaian melalui pegawai & koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian melalui pegawai & koordinasi dengan Bagian Kepegawaian terkait penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan melakukan BIMTEK SAI	Januari s.d Desember 2022
2	Sering terjadinya pergantian operator SAI di Balai dan Satker	Honor SAI untuk Petugas SAI sangat kecil tapi tanggung jawab terhadap	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan agar dapat menaikkan Honor SAI, mengingat tanggung jawab	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kepada pihak terkait tentang Pengusulan kenaikan	Berkoordinasi dengan pihak terkait (Biro Keuangan) agar dapat meningkatkan	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan pihak terkait (Biro Keuangan)	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
		pekerjaan cukup besar	pekerjaan cukup besar		honor SAI Bagi Operator aplikasi SAI	Honor SAI, mengingat tanggung jawab operator SAI terhadap pekerjaan pekerjaan cukup berat		terhadap kenaikan Honor SAI	
3	Aplikasi yang belum mengakomodir data laporan keuangan yang akurat	Aplikasi belum mendukung hasil pengolahan data yang akurat	Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kepada pihak terkait tentang perbaikan aplikasi	Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyempurnaan aplikasi Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022
4	Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Yang berubah-ubah	Aturan Penetapan batas waktu pengumpulan Laporan Keuangan Ke Biro Keuangan yang Selalu berubah-ubah	Berkoordinasi dengan Biro keuangan agar kedepan nya lebih dapat memastikan batas waktu pengumpulan laporan keuangan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian Informasi mengenai batas waktu dalam memberikan data dukung	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membantu memenuhi permintaan data dukung yang dibutuhkan.	Januari s.d Desember 2022	Koordinasi kepada Kantor/Satker/Balai uagar mempercepat pengumpulan data mengingatkan batas jadwal penyampaian data	Januari s.d Desember 2022
5	Masih sering terjadi kesalahan pemrosesan data terhadap Laporan Keuangan di tingkat satker atau balai	Pemrosesan laporan Keuangan menjadi terhambat karena masih harus memperbaiki data di tingkat balai dan satker	Melakukan BIMTEK terkait Aplikasi SAI kepada Pegawai yang bertugas dalam penanganan Laporan Keuangan di Balai dan Satker	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian peraturan mengenai penyusunan Laporan Keuangan	Mengusulkan petugas yang bertanggungjawab ab dalam penyusunan laporan keuangan agar mengikuti pelatihan.	Januari s.d Desember 2022	Melakukan Sosialisasi BIMTEK khusus Aplikasi SAI kepada Petugas yang menangani Laporan Keuangan	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
6	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja seperti Printer dan Scan	Pengadaan dari Kepegawaian yang masih kurang atas perangkat kerja	Melakukan koordinasi dengan kepegawaian untuk dapat memenuhi peralatan kantor yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Penyampaian surat kembali permintaan peralatan kantor yang dibutuhkan	Melakukan koordinasi dengan kepegawaian untuk dapat memenuhi peralatan kantor yang dibutuhkan	Januari s.d Desember 2022	Melakukan koordinasi kembali dengan kepegawain terkait kekurangan kebutuhan atas peralatan kantor.	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Verifikasi Anggaran



Ewy Kristiana

Pembina (IV/a)

NIP. 19721224 199803 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Sub Bagian Verifikasi Anggaran

Kegiatan : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHP) BPK dan Itjen Pada Satker/Balai

Tujuan Kegiatan : Membantu Balai atau Satker dapat menuntaskan temuan dari Itjen dan BPK

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RAN KING
1.	SDM dari balai atau satker yang tidak paham atau tidak terlalu peduli atas temuan Itjen dan BPK	Kurangnya SDM pada balai atau satker yang memang menangani terkait temuan BPK atau Itjen	Temuan pada Balai atau Itjen jadi tidak dapat segera diselesaikan	7.00	3
2.	Jangka Waktu masuknya BPK untuk Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK yang cukup lama	Waktu Pemantauan dari BPK RI tiap semester dalam 1 tahun	Proses penuntasan atas temuan BPK RI menjadi lebih lama	6.00	2
3.	Batas waktu tindak lanjut sesuai Aturan PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub tidak berjalan dengan baik	Balai atau Satker tidak mentaati PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub di mana adanya batas waktu penyampaian paling lambat 60 hari.	Tanggapan atas Temuan pada Balai atau satker melebihi dari batas waktu dari ketentuan PM 91 Tahun 2015	5.00	4
4.	Data tindak lanjut dari balai atau satker atas temuan BPK atau Itjen yang belum lengkap	kurangnya ke engkapan data dari balai atau satker menjadi temuan belum tentu bisa tuntas	Temuan BPK /Itjen dari Balai atau Satker menjadi tidak tuntas	4.67	1
5.	Terhambatnya penyampaian dan tindak lanjut dari balai dan satker ke Inspektorat atau BPK	Turunnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari BPK atau Itjen yang larut ke Sesditen Perkeretaapiian	Terlambatnya balai atau satker menindak lanjuti temuan BPK atau Itjen	4.00	5
6.	Terhambat perkerejaan terkait LHP BPK atau Itjen	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja yang menunjang	Terhambatnya pekerjaan terkait Laporan Hasil Audit	1.67	6

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran

Evy Kristiana
Pembina (IV/a)

NIP. 197221224 199803 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Sub Bagian Verifikasi Anggaran
Kegiatan : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHP) BPK dan Itjen Pada Satker/Balai
Tujuan Kegiatan : Membantu Balai atau Satker dapat menuntaskan temuan dari Itjen dan BPK

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	SDM dari balai atau satker yang tidak paham atau tidak terlalu peduli atas temuan Itjen dan BPK	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Kurangnya SDM pada balai atau satker yang memang menangani terkait temuan BPK atau Itjen	Temuan pada Balai atau Itjen jadi tidak dapat segera diselesaikan
2.	Jangka Waktu masuknya BPK untuk Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK yang cukup lama	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Waktu Pemantauan dari BPK RI tiap semester dalam 1 tahun	Proses penuntasan atas temuan BPK RI menjadi lebih lama
3.	Batas waktu tindak lanjut sesuai Aturan PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub tidak berjalan dengan baik	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Balai atau Satker tidak mentaati PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub, di mana adanya batas waktu penyampaian paling lambat 60 hari.	Tanggapan atas Temuan pada Balai atau satker melebihi dari batas waktu dari ketentuan PM 91 Tahun 2015
4.	Data tindak lanjut dari balai atau satker atas temuan BPK atau Itjen yang belum lengkap	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	kurangnya kelengkapan data dari balai atau satker menjadi temuan belum tentu bisa tuntas	Temuan BPK /Itjen dari Balai atau Satker menjadi tidak tuntas
5.	Terhambatnya penyampaian dan tindak lanjut dari balai dan satker ke Inspektorat atau BPK	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Turunnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari BPK atau Itjen yang lama ke Sesditen Perkeretaapian	Terlambatnya balai atau satker menindak lanjuti temuan BPK atau Itjen
6.	Terhambat perkerejaan terkait LHP BPK atau Itjen	Sub Bagian Verifikasi Anggaran	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja yang menunjang	Terhambatnya pekerjaan terkait Laporan Hasil Audit

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran

Evy Kristiana
Pembina (IV/a)

NIP. 197221224 199803 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Sub Bagian Verifikasi Anggaran
Kegiatan : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHP) BPK dan Itjen Pada Satker/Balai
Tujuan Kegiatan : Membantu Balai atau Satker dapat menuntaskan temuan dari Itjen dan BPK

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	SDM dari balai atau satker yang tidak paham atau tidak terlahu peduli atas temuan Itjen dan BPK	Kurangnya SDM pada balai atau satker yang memang menangani terkait temuan BPK atau Itjen	Melakukan koordinasi intonc dengan Balai atau Satker terkait tindak lanjut BPK/Itjen	Januari s.d Des 2022	Bersurat kembali kepada Balai atau satker agar segera menindakterkait temuan BPK atau Itjen	Melakukan kunjungan ke Balai atau satker untuk membantu percepatan tindak lanjut temuan BPK atau Itjen	Januari s.d Des 2022	Melakukan koordinasi intons dengan Balai atau Satker terkait tindak lanjut BPK/Itjen	Januari s.d Desember 2022
2	Jangka Waktu masuknya BPK untuk Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK yang cukup lama	Waktu Pemantauan dari BPK RI tiap semester dalam 1 tahun	Berkoordinasi dengan Balai dan Satker agar mempercepat pengumpulan data tindak lanjut temuan BPK/Itjen sambil menunggu tanggal Pemantau	Januari s.d Des 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas temuan BPK dan Itjen	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas temuan BPK dan Itjen	Januari s.d Des 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas temuan BPK dan Itjen	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
			tindak lanjut dari BPK RI						
3	Batas waktu tindak lanjut sesuai Aturan PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub tidak berjalan dengan baik	Balai atau Satker tidak mentaati PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub ,di mana adanya batas waktu penyampaian paling lambat 60 hari.	Berkoordinasi dengan Balai dan Satker dengan melakukan kunjungan langsung untuk mempercepat pengumpulan data dari Balai dan Satker.	Januari s.d Des 2022	Menginformasikan kembali atau bersurat kembali kepada Balai atau satker agar segera meninderkait temuan BPK atau Itjen	Mengingatkan kembali balai atau satker untuk tentang Batas Waktu Penyampaian Tindak Lanjut sesuai PM 91 Tahun 2015	Januari s.d Des 2022	Mengundang balai atau satker untuk sosialisasi PM 91 Tahun 2015 tentang Tata cara tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kemenhub, agar Satker dan Balai mengerti Batas waktu penyampahan	Januari s.d Desember 2022
4	Data tindak lanjut dari balai atau satker atas temuan BPK atau Itjen yang belum lengkap	kurangnya kelengkapan data dari balai atau satker menjadi temuan belum tentu bisa tuntas	Berkoordinasi dan melakukan pemantauan serta pengecekan kembali terkait data-data dari balai dan satker terkait temuan	Januari s.d Des 2022	Menyampaikan ke Satker atau Balai baik melalui berkoordinasi atau bersurat ke Balai atau satker atas kekurangan data	Mengumpulkan Satker dan Balai untuk pengecekan ulang data-data terkait temuan LHP	Januari s.d Des 2022	Mengumpulkan Satker dan Balai untuk pengecekan ulang data-data terkait temuan LHP	Januari s.d Desember 2022
5	Terhambatnya penyampaian dan tindak lanjut dari balai dan satker ke Inspektorat atau BPK	Turunnya LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari BPK atau Itjen yang lama ke Sedsien Perkeretaapian	Melakukan Koordinasi langsung dengan Itjen atau biro keuangan mengenai LHP yang belum turun ke sedsitjen	Januari s.d Des 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil Audit atas	Januari s.d Desember 2022	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal tentang waktu pemantauan Hasil	Januari s.d Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom		Waktu	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
6	Terhambat perkerajaan terkait LHP BPK atau Itjen	Masih Kurangnya Fasilitas Kerja yang memunjang	Bersurat kepada kepegawaian terkait kebutuhan sesuai dengan pengajuan kebutuhan atas perangkat kantor	Januari s.d Des 2022	temuan BPK dan Itjen Penyampaian surat kembali permintaan peralatan kantor yang dibutuhkan	temuan BPK dan Itjen Melakukan koordinasi dengan kepegawaian untuk dapat memenuhi peralatan kantor yang dibutuhkan	Januari s.d Des 2022	Audit atas temuan BPK dan Itjen Berkordinasi dengan kepegawaian terkait kebutuhan peralatan kantor	Januari s.d Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran



Ewy Kristiana
Pembina (IV/a)
NIP. 197221224 199803 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N08
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

DAFTAR RESIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Perundang-undangan

Kegiatan : Penghimpunan, pendokumentasian, penginformasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyiapkan bahan untuk Penyusunan dan/atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkeretaapian.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait untuk Penyusunan dan/atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkeretaapian.

No	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT
1	Belum optimalnya kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Eselon IV	Belum terdapat SOP dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Efisiensi inventarisasi dan pencarian dokumen.
2	Minimnya ketersediaan data dukung	Eselon IV	Terlambatnya penyampaian data dukung	Pengarsipan dan pencetakan peraturan terhambat

Jakarta, 28 Maret 2022

SUB KOORDINATOR KELOMPOK PERUNDANG-
UNDANGAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI &
INFORMASI HUKUM

IRAWATI SJURMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19681127 199403 2 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Perundang-undangan

Kegiatan : Penghimpunan, pendokumentasian, penginformasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyiapkan bahan untuk Penyusunan dan/atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkeretaapian.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait untuk Penyusunan dan/atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkeretaapian.

No	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANGKING
1	Belum optimalnya kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Belum terdapat SOP dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Efisiensi inventarisasi dan pencarian dokumen.	1.40	2
2	Minimnya ketersediaan data dukung	Terlambatnya penyampaian data dukung	Pengarsipan dan pencetakan peraturan terhambat	2.60	1

Jakarta, 28 Maret 2022

SUB KOORDINATOR KELOMPOK PERUNDANG-
UNDANGAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI &
INFORMASI HUKUM

IRAWATI SJURMAN

Pembina (IV/a)

NIP. 19681127 199403 2 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N0.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Perundang-undangan

Kegiatan : Penghimpunan, pendokumentasian, penginformasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyiapkan bahan untuk Penyusunan dan/atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkeretaapian.

2. Berkoordinasi dengan Direktorat dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait untuk Penyusunan dan/atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perkeretaapian.

RANGKAI NG	PERNYATAAN RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	WAKTU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMAN TAUAN	WAKTU
						INFOR MASI	KOMUNI KASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum optimalnya kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Belum terdapat SOP dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Efisiensi inventarisasi dan pencarian dokumen.	koordinasi antar staff melalui WhatsApp dan e-mail dalam proses pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	120 menit	Membuat surat ke bagian kepegawaian dan biro kepegawaian terkait SOP	Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian dan biro kepegawaian terkait SOP	Bersurat secara berkala	120 menit
2	Minimnya ketersediaan data dukung	Terlambatnya penyampaian data dukung	Pengarsipan dan pencetakan peraturan terhambat	Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait agar melakukan penyampaian data	120 menit	Mengingat kan ke pihak terkait untuk segera	Memberikan batas waktu penyampaian data dukung	Bersurat secara berkala	120 menit

				secara periodik & tepat waktu		menyam- paikan data dukung			
--	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--

Jakarta, **28 Maret** 2022

SUB KOORDINATOR KELOMPOK PERUNDANG-
UNDANGAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI &
INFORMASI HUKUM



IRAWATI SJURMAN

Pembina (IV/a)

NIP. 19681127 199403 2 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV/Fungsional** : **Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum**
Kegiatan : **Bantuan Hukum (advokasi)**
Tujuan Kegiatan : 1. Memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui pemberian pertimbangan dan bantuan hukum (advokasi) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Menyusun bahan-bahan bantuan hukum (advokasi) yang diperlukan dan diserahkan untuk beracara.
3. Menyiapkan barang bukti yang diperlukan dalam menjalankan kuasa.
4. Melaksanakan pendampingan kepada Pejabat/Staf yang menghadapi masalah hukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Terkendala dalam menyusun bahan bantuan hukum yang diperlukan untuk beracara	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	SDM terbatas jumlahnya	Penyusunan bahan bantuan hukum (advokasi) menjadi kurang maksimal
2.	Terkendala dalam menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	SDM terbatas jumlahnya	Terhambatnya dan tertundanya pelaksanaan kegiatan
3.	Terbatasnya anggaran untuk melakukan pembahasan dan penyusunan bahan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19	Terhambatnya penyusunan bahan pertimbangan dan bantuan hukum

Jakarta, 2 Maret 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM

EDDY SUSANTO
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV/Fungsional** : **Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum**
Kegiatan : **Bantuan Hukum (advokasi)**
Tujuan Kegiatan :
1. Memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui pemberian pertimbangan dan bantuan hukum (advokasi) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 2. Menyusun bahan-bahan bantuan hukum (advokasi) yang diperlukan dan diserahkan untuk beracara.
 3. Menyiapkan barang bukti yang diperlukan dalam menjalankan kuasa.
 4. Melaksanakan pendampingan kepada Pejabat/Staf yang menghadapi masalah hukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Terbatasnya anggaran untuk melakukan pembahasan dan penyusunan bahan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum	Pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19	Terhambatnya penyusunan bahan pertimbangan dan bantuan hukum	8,89	1
2.	Terkendala dalam menyusun bahan bantuan hukum yang diperlukan untuk beracara	SDM terbatas jumlahnya	Penyusunan bahan bantuan hukum (advokasi) menjadi kurang maksimal	8,00	2
3.	Terkendala dalam menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan	SDM terbatas jumlahnya	Terhambatnya dan tertundanya pelaksanaan kegiatan	7,00	3

Jakarta, 2 Maret 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM

EDDY SUSANTO
Penata Tk. I (IH/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum

Kegiatan : Bantuan Hukum (advokasi)

Tujuan Kegiatan :

1. Memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui pemberian pertimbangan dan bantuan hukum (advokasi) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Menyusun bahan-bahan bantuan hukum (advokasi) yang diperlukan dan diserahkan untuk beracara.
3. Menyiapkan barang bukti yang diperlukan dalam menjalankan kuasa.
4. Melaksanakan pendampingan kepada Pejabat/Staf yang menghadapi masalah hukum di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

RANKING	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	WAKTU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN	WAKTU	
						INFORMASI	KOMUNIKASI			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terbatasnya anggaran untuk melakukan pembahasan dan penyusunan bahan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum	Pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19	Terhambatnya penyusunan bahan pertimbangan dan bantuan hukum	Melakukan revisi anggaran	Pada saat persiapan kegiatan	PPK menginformasikan update ketersediaan anggaran	Membuat group whatsapp untuk para pengelola anggaran tiap Sub-Koordinator	Melakukan koordinasi dengan PPK	Januari - Desember 2022	
	2	SDM terbatas jumlahnya	Penyusunan bahan bantuan hukum (advokasi) menjadi kurang maksimal	Berkoordinasi aktif dengan Biro Hukum	Pada saat persiapan kegiatan	Menyampaikan kendala2 dalam penyusunan kepada pimpinan dan melakukan diskusi bersama dalam menyelesaikan	Koordinasi menggunakan whatsapp group	Pimpinan mengupdate progres penyusunan bahan bantuan hukum	Januari - Desember 2022	

3	Terkendala dalam menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan	SDM terbatas jumlahnya	Terhambatnya dan tertundanya pelaksanaan kegiatan	Melakukan penyesuaian jadwal sesuai kebutuhan	Pada saat pelaksanaan kegiatan	penyusunan bahan bantuan hukum Berkoordinasi dengan panitera penyelenggara sidang terkait jadwal sidang selanjutnya	Koordinasi menggunakan whatsapp group	Melakukan koordinasi dengan Panitera penyelenggara sidang	Januari - Desember 2022 (sesuai jadwal sidang)
---	---	------------------------	---	---	--------------------------------	--	---------------------------------------	---	--

Jakarta, 2 Maret 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM

EDDY SUSANTO

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV/Fungsional** : **Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum**
Kegiatan : **Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama**
Tujuan Kegiatan : 1. Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, BUMN, maupun swasta
2. Memberikan bimbingan teknis terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Pemotongan anggaran yang telah dialokasikan	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19	Terhambatnya kegiatan penyusunan naskah perjanjian kerjasama
2.	Staf yang pernah mengikuti diklat/sosialisasi legal drafting terbatas	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Belum dilaksanakan kembali diklat/sosialisasi legal drafting dari Biro maupun badan diklat	Penyusunan draft perjanjian kerjasama kurang maksimal
3.	Lamanya penyampaian koreksi dan masukan dari pihak pemohon	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Menunggu jadwal pembahasan internal pihak pemohon	Finalisasi naskah perjanjian kerjasama tertunda

Jakarta, Februari 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM

EDDY SUSANTO
Penata Tk. I (II/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV/Fungsional** : Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum
Kegiatan : Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama
Tujuan Kegiatan : 1. Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, BUMN, maupun swasta
2. Memberikan bimbingan teknis terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Pemotongan anggaran yang telah dialokasikan	Pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19	Terhambatnya kegiatan penyusunan naskah perjanjian kerjasama	7,11	1
2.	Staf yang pernah mengikuti diklat/sosialisasi legal drafting terbatas	Belum dilaksanakan kembali diklat/sosialisasi legal drafting dari Biro maupun badan diklat	Penyusunan draft perjanjian kerjasama kurang maksimal	7,00	2
3.	Lamanya penyampaian koreksi dan masukan dari pihak pemohon	Menunggu jadwal pembahasan internal pihak pemohon	Finalisasi naskah perjanjian kerjasama tertunda	4,67	3

Jakarta, Februari 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM

EDDY SUSANTO
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum
Kegiatan : Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama
Tujuan Kegiatan : 1. Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, BUMN, maupun swasta
 2. Memberikan bimbingan teknis terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

RANKING	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	WAKTU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN	WAKTU
						INFORMASI	KOMUNIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemotongan anggaran yang telah dialokasikan	Pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19	Terhambatnya kegiatan penyusunan naskah perjanjian kerjasama	Melakukan revisi anggaran	Januari - Desember 2022	PPK menginformasikan update ketersediaan anggaran	Membuat group whatsapp untuk para pengelola anggaran tiap Sub-Koordinator	Melakukan koordinasi dengan PPK	Januari - Desember 2022
2.	Staf yang pernah mengikuti diklat/sosialisasi legal drafting terbatas	Belum dilaksanakan kembali diklat/sosialisasi legal drafting dari Biro maupun badan diklat	Penyusunan draft perjanjian kerjasama kurang maksimal	Melakukan sharing dan diskusi dalam penyusunan draft perjanjian	Januari - Desember 2022	Melakukan rapat internal	Melalui whatsapp group	Menyampaikan usulan kepada Biro Kepegawaian untuk mengadakan diklat legal drafting	Januari - Desember 2022

3.	Lamanya penyampaian koreksi dan masukan dari pihak pemohon	Menunggu jadwal pembahasan internal pihak pemohon	Finalisasi naskah perjanjian kerjasama tertunda	Menetapkan deadline penyampaian koreksi dan masukan	Januari - Desember 2022	Update koreksi draft masing-masing PIC para pihak melalui email dan whatsapp	Menghubungi contact person pihak pemohon	belum ada	Januari - Desember 2022 (sesuai kebutuhan)
----	--	---	---	---	-------------------------	--	--	-----------	--

Jakarta, Februari 2022

**SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM**



EDDY SUSANTO

Perata Tk. I (III/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

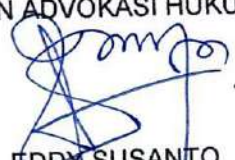
DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV/Fungsional** : **Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum**
- Kegiatan** : **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian**
- Tujuan Kegiatan** :
1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman SDM terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian.
 2. Sarana Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi antar instansi terkait (Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha).
 3. Peningkatan dan Kemajuan Perkeretaapian di Indonesia.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Pemotongan anggaran yang telah dialokasikan	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Pemotongan anggaran penanganan pandemi covid-19	Pelaksanaan kegiatan kurang maksimal
2.	Peserta undangan tidak seluruhnya hadir	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Khawatir tertular covid-19	Target penyampaian informasi kurang maksimal
3.	Tertundanya waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Sub-Koordinator Perjanjian dan Advokasi Hukum	Melonjaknya kasus positif covid-19	Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi tertunda

Jakarta, 15 Februari 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM


EDDY SUSANTO

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV/Fungsional** : Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum
- Kegiatan** : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
- Tujuan Kegiatan** :
1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman SDM terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian.
 2. Sarana Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi antar instansi terkait (Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha.
 3. Peningkatan dan Kemajuan Perkeretaapian di Indonesia.

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Pemotongan anggaran yang telah dialokasikan	Pemotongan anggaran penanganan pandemi covid-19	Pelaksanaan kegiatan kurang maksimal	10,00	1
2.	Peserta undangan tidak seluruhnya hadir	Khawatir tertular covid-19	Target penyampaian informasi kurang maksimal	8,89	2
3.	Tertundanya waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Melonjaknya kasus positif covid-19	Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi tertunda	7,00	3

Jakarta, 25 Februari 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM

EDDY SUSANTO

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional : Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum

Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian

- Tujuan Kegiatan :
1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman SDM terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian.
 2. Sarana Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi antar instansi terkait (Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha).
 3. Peningkatan dan Kemajuan Perkeretaapian di Indonesia.

RANKING	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	WAKTU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN	WAKTU
						INFORMASI	KOMUNIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemotongan anggaran yang telah dialokasikan	Pemotongan anggaran penanganan pandemi covid-19	Pelaksanaan kegiatan kurang maksimal	Melakukan revisi anggaran	Pada saat persiapan kegiatan	PPK menginformasikan update ketersediaan anggaran	Membuat group whatsapp untuk para pengelola anggaran tiap Sub-Koordinator	Melakukan koordinasi dengan PPK	Januari - Desember 2022
2	Peserta undangan tidak seluruhnya hadir	Khawatir tertular covid-19	Target penyampaian informasi kurang maksimal	Menyediakan fasilitas swab antigen sebelum memulai kegiatan	Pada saat persiapan kegiatan	Mencantumkan whatsapp <i>contact person</i> untuk konfirmasi kehadiran	Komunikasi melalui whatsapp	Melakukan konfirmasi kehadiran sebelum kegiatan dilaksanakan	Bulan Maret dan Juni 2022

3	Tertundanya waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi	Melonjaknya kasus positif covid-19	Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi tertunda	Membuat alternatif waktu pelaksanaan kegiatan	Pada saat persiapan kegiatan	Update jadwal pelaksanaan kegiatan pada whatsapp group panitia	Membuat group whatsapp panitia	Belum ada	Januari - Desember 2022
---	--	------------------------------------	--	---	------------------------------	--	--------------------------------	-----------	-------------------------

Jakarta, 25 Februari 2022

SUB-KOORDINATOR PERJANJIAN
DAN ADVOKASI HUKUM



EDDY SUSANTO

Penata Tk. I (II/d)

NIP. 19801118 201012 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RESIKO

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Pemantauan dan Investasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Di Bidang Perkeretaapian

Tujuan Kegiatan : 1. Menunjang Adanya Potensi Kerjasama Bidang Perkeretaapian
2. Menyiapkan Bahan Kerjasama Luar Negeri

No	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Lambatnya proses koordinasi dengan balai teknik perkeretaapian dan Direktorat Teknis terkait potensi Kerjasama Luar Negeri	Sub Koordinator	Belum terkoordinasi dengan baik pentingnya adanya potensi Kerjasama Luar Negeri yang ada	Tertundanya apabila ada potensi Kerjasama Luar Negeri
2	Kurangnya SDM yang mampu membantu dalam penyusunan bahan Kerjasama Luar Negeri	Sub Koordinator	Keterbatasan SDM yang memiliki	Membutuhkan durasi yang cukup lama dalam Penyusunan bahan Kerjasama Luar Negeri
3	Kurangnya saran dan masukan dari direktorat teknis dan balai terkat potensi kerjasama dan investasi	Sub Koordinator	Keterbatasan informasi yang didapatkan	Kurang beragamnya masukan yang disampaikan

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum

YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANGKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Pemantauan dan Investasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Di Bidang Perkeretaapian

Tujuan Kegiatan : 1. Menunjang Adanya Potensi Kerjasama Bidang Perkeretaapian
2. Menyiapkan Bahan Kerjasama Luar Negeri

No	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT	SCORE	RANGKING
1	2	4	5		
1	Lambatnya proses koordinasi dengan balai teknik perkeretaapian dan Direktorat Teknis terkait potensi Kerjasama Luar Negeri	Belum terkoordinasi dengan baik pentingnya adanya potensi Kerjasama Luar Negeri yang ada	Tertundanya apabila ada potensi Kerjasama Luar Negeri	6,24	3
2	Kurangnya SDM yang mampu membantu dalam penyusunan bahan Kerjasama Luar Negeri	Keterbatasan SDM yang dimiliki	Membutuhkan durasi yang cukup lama dalam penyusunan bahan Kerjasama Luar Negeri	7,56	2
3	Kurangnya saran dan masukan dari Direktorat Teknis dan UPT terkait potensi Kerjasama Luar Negeri	Keterbatasan informasi yang didapatkan	Kurang beragamnya masukan yang disampaikan	8,56	1

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum

YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPAIAN**

Fax : (021) 3506204.

JL. MEDAN MERDEKA BARAT N08
JAKARTA 10110

GEDUNG KARYA

3505557, 3505558
3505559, 3506526

TEL : (021) 3506204, 3856883

3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Pemantauan dan Investasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Di Bidang Perkeretaapian

Tujuan Kegiatan : 1. Menunjang Adanya Potensi Kerjasama Bidang Perkeretaapian

2. Menyiapkan Bahan Kerjasama Luar Negeri

RAN GKIN G	PERNYATAAN RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALI AN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIA N	WAK TU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKA N PEMANTA UAN	WAKT U
						INFOR MASI	KOMU NIK ASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lambatnya proses koordinasi dengan balai teknik perkeretaapian dan Direktorat teknis terkait potensi Kerjasama Luar Negeri	Belum terkoordinasi dengan baik pentingnya adanya potensi Kerjasama Luar Negeri yang ada	Tertundanya apabila ada potensi Kerjasama Luar Negeri	Terus meningkatkan dalam hal penyampaian informasi	120 menit	Mengirim nota dinas permintaan bahan kepada balai teknik	Surat	Bersurat secara berkala	120 menit
2	Kurangnya SDM yang mampu membantu dalam penyusunan bahan Kerjasama Luar Negeri	Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dalam	Membutuhkan durasi yang cukup lama dalam Penyusunan	Mengoptimalkan SDM yang ada dan menambah jumlah SDM yang kompeten	120 menit	Mengusulkan SDM kepada bagian kepegawaian	Surat	Bersurat secara berkala	120 menit

3	Kurangnya saran dan masukan dari direktorat yeknis dan balai terkait potensi kerjasama dan investasi	bidang penyusunan bahan Kerjasama Luar Negeri	bahan Kerjasama Luar Negeri	Menginfokan terhadap SDM pengelola database untuk melengkapi informasi	120 menit	Membuat matriks kerja	Nota dinas	Bersurat secara berkala	120 menit
---	--	---	-----------------------------	--	-----------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum



YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RESIKO

Unit Kerja Eselon IV: Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Bahan Publikasi dan Edukasi Publik Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyediakan Bahan Publikasi dan Edukasi Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian;
2. Berkoordinasi dengan Direktorat dan Balai Teknik Perkeretaapian Terkait Bahan Publikasi.

No	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Terkendalanya SOP penyusunan bahan publikasi siaran pers dan pemberitaan secara cepat dan tepat	Sub Koordinator	Belum adanya SOP publikasi dan penyusunan rilis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Publikasi bidang perkeretaapian menjadi kurang optimal
2	Kurangnya pemberitaan kegiatan pembangunan di wilayah kerja balai	Sub Koordinator	Kurangnya pemahaman akan pentingnya penyampaian informasi/berita tentang kegiatan atau hasil kerja Balai	Program kerja DJKA di Pusat maupun Balai kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat
3	Kurang maksimalnya pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan	Sub Koordinator	Jumlah sarana penunjang fotografi dan videografi yang kurang memadai	Publikasi hasil peliputan foto dan video peliputan kegiatan kurang maksimal

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum

YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANGKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV: Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Bahan Publikasi dan Edukasi Publik Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyediakan Bahan Publikasi dan Edukasi Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian;
2. Berkoordinasi dengan Direktorat dan Balai Teknik Perkeretaapian Terkait Bahan Publikasi.

No	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT	SCORE	RANGKING
1	2	4	5		
1	Terkendalanya SOP penyusunan bahan publikasi siaran pers dan pemberitaan secara cepat dan tepat	Belum adanya SOP publikasi dan penyusunan rilis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Publikasi bidang perkeretaapian menjadi kurang optimal	6,21	1
2	Kurangnya pemberitaan kegiatan pembangunan di wilayah kerja balai	Kurangnya pemahaman akan pentingnya penyampaian informasi/berita tentang kegiatan atau hasil kerja Balai	Program kerja DJKA di Pusat maupun Balai kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	5,28	2
3	Kurang maksimalnya pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan	Jumlah sarana penunjang fotografi dan videografi yang kurang	Publikasi hasil peliputan foto dan video peliputan kegiatan kurang maksimal	4,68	3

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum

YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N08
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV: Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Bahan Publikasi dan Edukasi Publik Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyediakan Bahan Publikasi dan Edukasi Tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian;
2. Berkoordinasi dengan Direktorat dan Balai Teknik Perkeretaapian Terkait Bahan Publikasi.

RANGKING	PERNYATAAN RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	WAKTU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN	WAKTU
						INFORMASI	KOMUNIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terkendalanya SOP penyusunan bahan publikasi siaran pers dan pemberitaan secara cepat dan tepat	Belum adanya SOP publikasi dan penyusunan rilis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Memaksimalkan publikasi bidang perkeretaapian menjadi lebih optimal	Pengusulan SDM/Pegawai CPNS dan Kegiatan Diklat Bidang Kehumasan	20 jam	Bersurat ke Unit kerja Bagian Kepegawaian serta unit kerja lain terkait	Surat	Diklat secara berkala	120 menit
2	Kurangnya pemberitaan kegiatan	Kurangnya pemahaman akan	Program kerja DJKA di Pusat maupun Balai	Sosialisasi Pentingnya Publikasi dan	20 jam	Bersurat ke Balai	Undangan Rapat	Bimtek secara berkala	120 menit

3	pembangunan di Wilayah Kerja Balai	pentingnya penyampaian informasi/ berita tentang kegiatan atau hasil kerja Balai	kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Bimtek tentang penulisan dan pengelolaan pemberitaan	120 menit	Mengirim surat kepada Bagian Kepegawaian	Surat	Bersurat secara berkala	120 menit			
	Kurang maksimalnya pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan	Jumlah sarana penunjang fotografi dan videografi yang kurang	Publikasi hasil peliputan foto dan video peliputan kegiatan kurang maksimal	Pengusulan sarana fotografi dan videografi baru ke Bagian Kepegawaian	120 menit							

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum



YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RESIKO

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Kegiatan : 1. Memberikan Informasi yang Dibutuhkan Masyarakat

2. Menjamin Keterbukaan Informasi Intansi Pemerintahan Sesuai Dengan
Ketentuan yang berlaku

No	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT
1	2	3	4	5
1	Terhambatnya pemberian informasi khususnya informasi yang dikecualikan kepada pemohon informasi	Sub Koordinator	Masih adanya miskomunikasi antara PPID Ditjen Perkeretaapian dan PPID UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Pemberian informasi publik yang diminta pemohon terlambat atau bahkan tidak dapat diberikan.
2	Belum lengkapnya Daftar Informasi Publik yang dimiliki oleh UPT dilingkungan Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator	Belum meratanya pemahaman tentang informasi yang dikecualikan	Dibutuhkan waktu cukup lama guna memperoleh informasi yang diperlukan
3	Kurang terorganisirnya informasi yang diperoleh	Sub Koordinator	Pemegang database yang masih tersebar di unit kerja pusat/balai/PPK, belum menyatu pada unit PPID terkait	PPID UPT kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum

YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RANGKING / PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Kegiatan : 1. Memberikan Informasi yang Dibutuhkan Masyarakat

2. Menjamin Keterbukaan Informasi Intansi Pemerintahan Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku

No	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK / AKIBAT	SCORE	RANGKING
1	2	4	5		
1	Terhambatnya pemberian informasi khususnya informasi yang dikecualikan kepada pemohon informasi	Sulitnya mendapatkan data tersebut dari unit kerja terkait baik pusat maupun balai	Pemberian informasi publik yang diminta pemohon terlambat atau bahkan tidak dapat diberikan.	5,67	2
2	Sulitnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan pemohon dari unit kerja terkait baik pusat maupun balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Belum meratanya pemahaman tentang informasi yang dikecualikan	Dibutuhkan waktu cukup lama guna memperoleh informasi yang dibutuhkan	6,27	1
3	Kurang terorganisirnya alur mendapatkan informasi dari unit kerja terkait pusat maupun balai	Pemegang database yang masih tersebar di unit kerja pusat/balai/PPK, belum menyatu pada unit PPID terkait	PPID UPT kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan	5,50	3

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum

YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N08
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja Eselon IV : Sub Koordinator Humas dan KSLN

Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Kegiatan : 1. Memberikan Informasi yang Dibutuhkan Masyarakat

2. Menjamin Keterbukaan Informasi Intansi Pemerintahan Sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku

RANGKING	PERNYATAAN RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK PADA CAPAIAN PENGENDALIAN	RENCANA PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN	WAKTU	RENCANA PERBAIKAN		RENCANA PERBAIKAN PEMANTAUAN	WAKTU
						INFOR MASI	KOMUNI KASI		
1	Terhambatnya pemberian informasi khususnya informasi yang dikecuailkan kepada pemohon informasi	3 Sulitnya mendapatkan data tersebut dari unit kerja terkait baik pusat maupun balai	4 Pemberian informasi publik yang diminta pemohon terlambat atau bahkan tidak dapat diberikan.	5 Menyusun Daftar Informasi Publik dan sudah disepakati bersama	6 120 menit	7 Bersurat pada unit kerja pusat dan balai	8 Surat, rapat	9 Bersurat secara berkala	10 120 menit
2	Sulitnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan pemohon dari unit kerja terkait baik pusat maupun	3 Belum meratanya pemahaman tentang informasi yang dikecuailkan	4 Dibutuhkan waktu cukup lama guna memperoleh informasi yang dibutuhkan	5 Sosialisasi yang inten kepada PPK dan petugas PPID tentang UU KIP dan aturan lain terkait PPID	6 120 menit	7 Bersurat pada unit kerja pusat dan balai serta menyusun materi sosialisasi	8 Surat, rapat	9 Memastikan semua PPK dan petugas PPID serta pimpinan unit kerja memahami dengan baik	10 120 menit

3	balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Kurang terorganisirnya alur mendapatkan informasi dari unit kerja terkait pusat maupun balai	Pemegang database yang masih tersebar di unit kerja pusat/balai/PK, belum menyatu pada unit PPID terkait	PPID UPT kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan	Menyusun data base berbasis online	120 menit	Bersurat pada unit kerja pusat dan balai	Surat, rapat	UUD KIP dan turunannya	120 menit
---	---	--	--	---	------------------------------------	-----------	--	--------------	------------------------	-----------

Jakarta, April 2022

Kepala Bagian Hukum



YENNESI ROSITA

Pembina (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

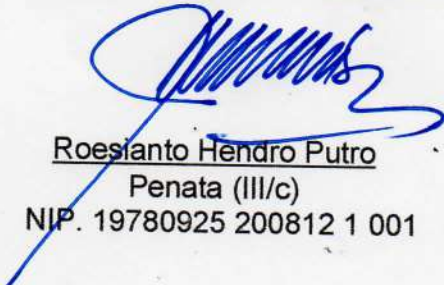
DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan penataan arsip in-aktif

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Penataan arsip in-aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Subbag tata usaha	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip in -aktif.	Arsip in-aktif tidak tertata dengan baik
2	Waktu dalam penataan arsip in-aktif menjadi lebih lama	Subbag tata usaha	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip in-aktif.	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu
3	Penataan arsip in-aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Subbag tata usaha	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip in-aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer
4	Penataan arsip in-aktif membutuhkan waktu tambahan	Subbag tata usaha	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Jakarta,, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

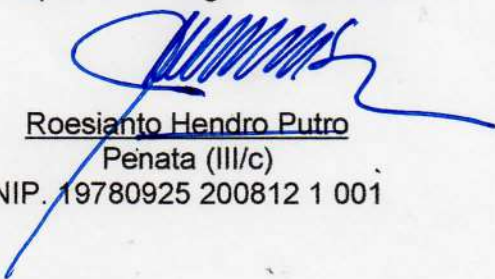
PETA RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan penataan arsip in-aktif

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Penataan arsip in-aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip in -aktif.	Arsip in aktif tidak tertata dengan baik	6,60	1
2	Waktu dalam penataan arsip in-aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip in-aktif.	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,80	3
3	Penataan arsip in-aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip in-aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer	5,80	2
4	Penataan arsip in aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip in-aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,60	4

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

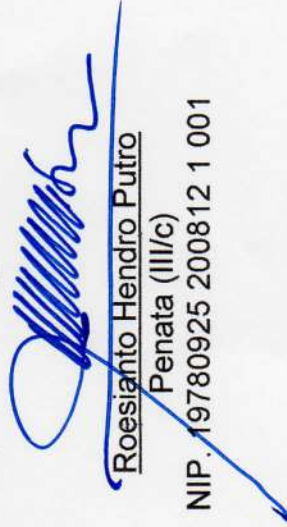
**Unit Kerja Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kegiatan : mengkoordinasikan penataan arsip in-aktif**

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Penataan arsip in aktif tidak dapat terlaksana	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip in -aktif.	Sdm yang memahami penataan arsip in aktif	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberikan arahan	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek sdm yang menata arsip in aktif	April 2022
2	Waktu dalam penataan arsip in aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip in-aktif.	Jra (Jadwal Retensi Arsip) arsip in aktif dikerjakan oleh sdm yang memahami	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberi pedoman peraturan yang berlaku	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek deadline waktu yang ditentukan	April 2022
3	Penataan arsip in-aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Entry data dilakukan oleh sdm yang memahami computer	Maret 2022	Mengingat kan untuk kerjasama dalam pengerjaan arsip in aktif	Saharing pengetahuan	April 2022	Kasubbag tata usaha mengecek list runtuatan yang sudah dikerjakan	April 2022

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana kegendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
4	Penataan arsip in aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Penataan arsip in aktif yang belum dikerjakan dapat dikerjakan dengan sdm yang ada	Maret 2022	Mengingatikan untuk segera dikerjakan dengan sdm yang ada	Rapat secara periodik	April 2022	Kasubbag tata usaha memantau jadwal Deadline	April 2022

Jakarta, Januari 2022

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
 Penata (III/c)
 NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : penataan arsip aktif

No	Pernyataan resiko	Penanggung jawab	penyebab	dampak
1	Penataan arsip aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Subbag tata usaha	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak tertata dengan baik
2	Waktu dalam penataan arsip aktif menjadi lebih lama	Subbag tata usaha	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu
3	Penataan arsip aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Subbag tata usaha	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer
4	Penataan arsip aktif membutuhkan waktu tambahan	Subbag tata usaha	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)
NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

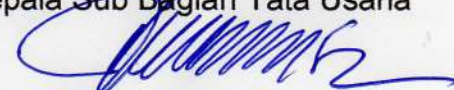
PETA RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : penataan arsip aktif

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Penataan arsip aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak tertata dengan baik	6,60	1
2	Waktu dalam penataan arsip aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,40	4
3	Penataan arsip aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer	6,00	2
4	Penataan arsip aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,80	3

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001 .

3	Penataan arsip aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Entry data dilakukan oleh sdm yang memahami komputer	Maret 2022	Mengingat kan untuk kerjasama dalam pengerjaan arsip aktif	Saharing pengetahuan	April 2022	Kasubbag tata usaha mengecek list runtutan yang sudah dikerjakan	April 2022
4	Penataan arsip aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid - 19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Penataan arsip aktif yang belum dikerjakan dapat dikerjakan dengan sdm yang ada	Maret 2022	Mengingatkan untuk segera dikerjakan dengan sdm yang ada	Rapat secara periodik	April 2022	Kasubbag tata usaha mematu jadwal Deadline	April 2022

Jakarta , Januari 2022
Pit. Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Roesianto Hendro Putro

Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kegiatan : penataan arsip aktif

rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keagendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Penataan arsip aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip aktif	Sdm yang memahami penataan arsip aktif	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberikan arahan	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek sdm yang menata arsip aktif	April 2022
2	Waktu dalam penataan arsip aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip aktif	Jra (Jadwal Retensi Arsip) aktif dikerjakan oleh sdm yang memahami	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberi pedoman peraturan yang berlaku	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek deadline waktu yang ditentukan	April 2022



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Mengkoordinasikan penataan arsip aktif

No	Pernyataan resiko	Penanggung jawab	penyebab	dampak
1	Penataan arsip aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak tertata dengan baik
2	Waktu dalam penataan arsip aktif menjadi lebih lama	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu
3	Penataan arsip aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer
4	Penataan arsip aktif membutuhkan waktu tambahan	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Mengkoordinasikan penataan arsip aktif

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Penataan arsip aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak tertata dengan baik	6,60	1
2	Waktu dalam penataan arsip aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip aktif	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,40	4
3	Penataan arsip aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer	6,00	2
4	Penataan arsip aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,80	3

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum


Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan penataan arsip aktif

rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana key pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Penataan arsip aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip aktif	Sdm yang memahami penataan arsip aktif	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberikan arahan	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek sdm yang menata arsip aktif	April 2022
2	Waktu dalam penataan arsip aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip aktif	Jra (Jadwal Retensi Arsip) aktif dikerjakan oleh sdm yang memahami	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberi pedoman peraturan yang berlaku	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek deadline waktu yang ditentukan	April 2022

3	Penataan arsip aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Entry data dilakukan oleh sdm yang memahami komputer	Maret 2022	Mengingat kan untuk kerjasama dalam pengerjaan arsip aktif	Saharing pengetahuan	April 2022	Kasubbag tata usaha mengecek list runtutan yang sudah dikerjakan	April 2022
4	Penataan arsip aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid - 19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Penataan arsip aktif yang belum dikerjakan dapat dikerjakan dengan sdm yang ada	Maret 2022	Mengingatkan untuk segera dikerjakan dengan sdm yang ada	Rapat secara periodik	April 2022	Kasubbag tata usaha mematau jadwal Deadline	April 2022

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum


Syafek Jamhari, M.Pd

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan penataan arsip in-aktif

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Penataan arsip in-aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Kepala bagian kepegawaian dan umum	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip in -aktif.	Arsip in-aktif tidak tertata dengan baik
2	Waktu dalam penataan arsip in-aktif menjadi lebih lama	Kepala bagian kepegawaian dan umum	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip in-aktif.	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu
3	Penataan arsip in-aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Kepala bagian kepegawaian dan umum	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip in-aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer
4	Penataan arsip in-aktif membutuhkan waktu tambahan	Kepala bagian kepegawaian dan umum	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan penataan arsip in-aktif

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Penataan arsip in-aktif tidak dapat terlaksana dengan baik	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip in -aktif.	Arsip in aktif tidak tertata dengan baik	6,60	1
2	Waktu dalam penataan arsip in-aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip in-aktif.	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,80	3
3	Penataan arsip in-aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Penataan arsip in-aktif membutuhkan sdm lain yang memahami pengoperasian komputer	5,80	2
4	Penataan arsip in aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip in-aktif menjadi sedikit terhambat	Arsip in-aktif tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu	4,60	4

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : mengkoordinasikan penataan arsip in-aktif

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	kommunikasi			
1	Penataan arsip in aktif tidak dapat terlaksana	Sdm masih ada yang belum memahami dalam penataan arsip in-aktif.	Sdm yang memahami penataan arsip in aktif	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberikan arahan	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek sdm yang menata arsip in aktif	April 2022
2	Waktu dalam penataan arsip in aktif menjadi lebih lama	Sdm masih ada yang belum memahami peraturan yang berhubungan dalam penataan arsip in-aktif.	Jra (Jadwal Retensi Arsip) arsip in aktif dikerjakan oleh sdm yang memahami	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Memberi pedoman peraturan yang berlaku	April 2022	Kabag kepeg dan umum mengecek deadline waktu yang ditentukan	April 2022
3	Penataan arsip in-aktif membutuhkan tenaga sdm lain yang memahami dalam mengoperasikan komputer	Sdm masih ada yang belum memahami pengoperasian komputer.	Entry data dilakukan oleh sdm yang memahami computer	Maret 2022	Mengingat kan untuk kerjasama dalam pengerjaan arsip in aktif	Saharing pengetahuan	April 2022	Kasubbag tata usaha mengecek list runtutan yang sudah dikerjakan	April 2022

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
4	Penataan arsip in aktif membutuhkan waktu tambahan	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga penataan arsip aktif menjadi sedikit terhambat	Penataan arsip in aktif yang belum dikerjakan dapat dikerjakan dengan sdm yang ada	Maret 2022	Mengingatkan untuk segera dikerjakan dengan sdm yang ada	Rapat secara periodik	April 2022	Kasubbag tata usaha memantau jadwal Deadline	April 2022

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (V/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Adanya suatu kesalahan dalam penyampaian informasi ke pimpinan	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm kurang memiliki sikap sigap, cekatan dan komunikasi yang baik	Kurang mendapat kepercayaan dari pimpinan
2	Dalam berkoordinasi masih lambat	Kepala kepegawaian dan umum	Masih ada sebagian sdm yang belum bisa dalam memahami teknologi	Kegiatan menjadi terhambat
3	Kegiatan tidak tersusun dengan baik	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm kurang menguasai sop keprotokolan	Kegiatan menjadi terhambat

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Adanya suatu kesalahan dalam penyampaian informasi ke pimpinan	Sdm kurang memiliki sikap sigap, cekatan dan komunikasi yang baik	Kurang mendapat kepercayaan pimpinan	6,60	1
2	Dalam berkoordinasi masih lambat	Masih ada sebagian sdm yang belum bisa dalam memahami teknologi	Kegiatan menjadi terhambat	4,80	3
3	Kegiatan Tidak tersusun dengan baik	Sdm kurang menguasai sop keprotokolan	Kegiatan menjadi terhambat	5,00	2

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan kegiatan keprotokolalan

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana kegiatan pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	kommunikasi			
1	Adanya suatu kesalahan dalam penyampaian informasi ke pimpinan	Sdm kurang memiliki sikap sigap, cekatan dan komunikasi yang baik	Memberi nasihat dan saran agar tidak terulang kembali	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Mencatat agenda kegiatan dengan detail	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau kegiatan pimpinan.	Maret 2022
2	Dalam berkoordinasi masih lambat	Masih ada sebagian sdm yang belum bisa dalam memahami teknologi	Memberikan arahan untuk mempelajari pengoperasian teknologi	Maret 2022	Melakukan evaluasi kinerja	Membuat group whatsapp	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau kegiatan pimpinan	Maret 2022

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana ke pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
3	Kegiatan tidak tersusun dengan baik	Sdm kurang menguasai sop keprotokol	Diikutsertakan dalam kegiatan diklat keprotokol, diklat pelayanan pimpinan	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Mencatat kegiatan dengan menggunakan aplikasi google calender	Maret 2022	kasubag tata usaha dinotifikasi setiap kegiatan atau agenda pimpinan	Maret 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan proses surat keluar

no	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Surat keluar tidak tertata dengan baik
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : mengkoordinasikan proses surat keluar

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Surat keluar tidak tertata dengan baik	6,60	1
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu	4,80	2
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu	4,60	3

Jakarta , Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan proses surat keluar

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	kommunikasi			
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Sdm yang memahami tata naskah	Maret 2022	Sharing pengetahuan mandiri	Saling mengingatkan antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau proses filling surat	Maret 2022
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Surat keluar dikerjakan oleh sdm yang memahami dalam pengiputan surat ke dalam ms excel	Maret 2022	Sharing pengetahuan mandiri	Membuat group whatsapp	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau filling surat yang dikerjakan	Maret 2022

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Sdm yang ada harus mengetahui sop dalam memproses surat keluar yang berlaku	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling membantu antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha mengecek tanggal surat dan tanggal disposisi surat	Maret 2022

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Mengkoordinasikan dalam proses surat masuk

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Melakukan Double check satu persatu surat yang belum terdisposisi	Kepala kepegawaian dan umum	Notif surat masuk yang belum terdisposisi di kotak masuk menu utama portal dan menu e-surat	Terlambat menerima disposisi dari pimpinan
2	Adanya keterlambatan meneruskan surat kepada pimpinan	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan surat ke aplikasi portal menjadi sedikit terlambat.	Pendistribusian surat masuk menjadi tidak tepat waktu
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Kepala kepegawaian dan umum	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat masuk menjadi tidak tepat waktu

Jakarta , Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Mengkoordinasikan dalam proses surat masuk

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Melakukan Double check satu persatu surat yang belum terdisposisi	Notif surat masuk yang belum terdisposisi di kotak masuk menu utama portal dan menu e-surat	Terlambat menerima disposisi dari pimpinan	6,60	1
2	Adanya keterlambatan meneruskan surat kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan surat ke aplikasi portal menjad sedikit terlambat.	Pendistribusi an surat masuk menjadi tidak tepat waktu	5,80	2
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusi an surat masuk menjadi tidak tepat waktu	5,60	3

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Syafek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

**Unit Kerja eselon III : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan dalam proses surat masuk**

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana kepengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Melakukan Double check satu persatu surat yang belum terdisposisi	Notif surat masuk yang belum terdisposisi di kotak masuk menu utama portal dan menu e-surat	Sdm yang memahami aplikasi portal	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling mengingatkan antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau proses filing surat masuk	Maret 2022
2	Adanya keterlambatan meneruskan surat kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan surat ke aplikasi portal menjadi sedikit terlambat.	saling membantu pegawai	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Membuat group whatsapp	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau filing surat masuk yang dikerjakan	Maret 2022

3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Sdm yang ada harus mengetahui sop surat masuk yang berlaku	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling membantu antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha mengecek tanggal surat dan tanggal disposisi surat	Maret 2022
---	---	---	--	------------	------------------------------------	-------------------------------	------------	---	------------

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum


Syatek Jamhari, M.Pd
Pembina Tingkat I (V/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972


DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan proses surat keluar

no	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Subbag tata usaha	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Surat keluar tidak tertata dengan baik
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Subbag tata usaha	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Subbag tata usaha	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)
NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972


DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan proses surat keluar

no	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Subbag tata usaha	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Surat keluar tidak tertata dengan baik
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Subbag tata usaha	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Subbag tata usaha	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)
NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

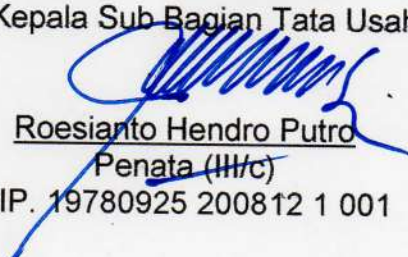
PETA RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan proses surat keluar

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Surat keluar tidak tertata dengan baik	6,60	1
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu	4,80	2
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat keluar menjadi tidak tepat waktu	4,60	3

Jakarta , Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN


Unit Kerja Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kegiatan : Mengkoordinasikan proses surat keluar

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Dalam memproses file terjadi kesalahan	Sdm masih kurang memahami tata naskah	Sdm yang memahami tata naskah	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling mengingatkan antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau proses filling surat	Maret 2022
2	Terlambat meneruskan surat kepada pimpinan.	Sdm selama pandemi covid -19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan dan penerusan surat menjadi sedikit terlambat	Surat keluar dikerjakan oleh sdm yang memahami dalam pengiputan surat ke dalam ms excel	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Membuat group whatsapp	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau filling surat yang dikerjakan	Maret 2022

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana kegendalian	waktu	Rencana infokom	waktu	Rencana pemantauan	waktu				
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Sdm yang ada harus mengetahui sop dalam memproses surat keluar yang berlaku	Maret 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>informasi</th> <th>komunikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sharing pengetahuan secara mandiri</td> <td>Saling membantu antar pegawai</td> </tr> </tbody> </table>	informasi	komunikasi	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling membantu antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha mengecek tanggal surat dan tanggal disposisi surat	Maret 2022
informasi	komunikasi											
Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling membantu antar pegawai											

Jakarta, Januari 2022

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
 Penata (III/c)
 NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972


DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Adanya suatu kesalahan dalam penyampaian informasi ke pimpinan	Subbag tata usaha	Sdm kurang memiliki sikap sigap, cekatan dan komunikasi yang baik	Kurang mendapat kepercayaan dari pimpinan
2	Dalam berkoordinasi masih lambat	Subbag tata usaha	Masih ada sebagian sdm yang belum bisa dalam memahami teknologi	Kegiatan menjadi terhambat
3	Kegiatan tidak tersusun dengan baik	Subbag tata usaha	Sdm kurang menguasai sop keprotokolan	Kegiatan menjadi terhambat

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)
NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

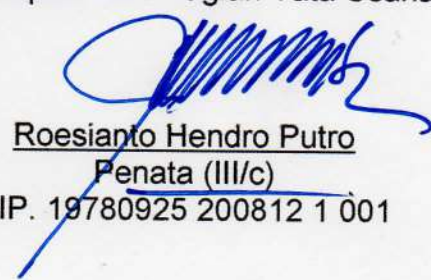
PETA RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan

No	Pernyataan resiko	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Adanya suatu kesalahan dalam penyampaian informasi ke pimpinan	Sdm kurang memiliki sikap sigap, cekatan dan komunikasi yang baik	Kurang mendapat kepercayaan pimpinan	6,60	1
2	Dalam berkoordinasi masih lambat	Masih ada sebagian sdm yang belum bisa dalam memahami teknologi	Kegiatan menjadi terhambat	4,80	3
3	Kegiatan Tidak tersusun dengan baik	Sdm kurang menguasai sop keprotokolan	Kegiatan menjadi terhambat	5,00	2

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)
NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kegiatan : mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana kegendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Adanya suatu kesalahan dalam penyampaian informasi ke pimpinan	Sdm kurang memiliki sikap sigap, cekatan dan komunikasi yang baik	Memberi nasihat dan saran agar tidak terulang kembali	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Mencatat agenda kegiatan dengan detail	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau kegiatan pimpinan.	Maret 2022
2	Dalam berkoordinasi masih lambat	Masih ada sebagian sdm yang belum bisa dalam memahami teknologi	Memberikan arahan untuk mempelajari pengoperasian teknologi	Maret 2022	Melakukan evaluasi kinerja	Membuat group whatsapp	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau kegiatan pimpinan	Maret 2022

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana keg pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
3	Kegiatan tidak tersusun dengan baik	Sdm kurang menguasai sop keprotokolan	Diikutsertakan dalam kegiatan diklat keprotokolan, diklat pelayanan pimpinan	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Mencatat kegiatan dengan menggunakan aplikasi google calender	Maret 2022	kasubag tata usaha dinotifikasi setiap kegiatan atau agenda pimpinan	Maret 2022

Jakarta, Januari 2022

Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Roesianto Hendro Putro

Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972


DAFTAR RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : memproses surat masuk

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
1	Melakukan Double check satu persatu surat yang belum terdisposisi	Kepala sub bagian tata usaha	Notif surat masuk yang belum terdisposisi di kotak masuk menu utama portal dan menu e-surat	Terlambat menerima disposisi dari pimpinan
2	Adanya keterlambatan meneruskan surat kepada pimpinan	Kepala sub bagian tata usaha	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan surat ke aplikasi portal menjad sedikit terlambat.	Pendistribusian surat masuk menjadi tidak tepat waktu
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Kepala sub bagian tata usaha	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat masuk menjadi tidak tepat waktu

Jakarta , Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro

Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

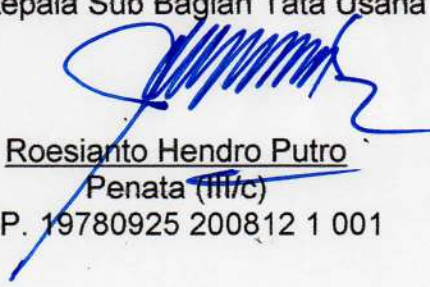
PETA RISIKO

Unit kerja eselon IV : Kepala sub bagian Tata Usaha

Kegiatan : memproses surat masuk

No	Pernyataan resiko	Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak	Score Risiko	Rangking
1	Melakukan Double check satu persatu surat yang belum terdisposisi	Kepala sub bagian tata usaha	Notif surat masuk yang belum terdisposisi di kotak masuk menu utama portal dan menu e-surat	Terlambat menerima disposisi dari pimpinan	6,60	1
2	Adanya keterlambatan meneruskan surat kepada pimpinan	Kepala sub bagian tata usaha	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan surat ke aplikasi portal menjadi sedikit terlambat.	Pendistribusian surat masuk menjadi tidak tepat waktu	5,80	2
3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Kepala sub bagian tata usaha	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Pendistribusian surat masuk menjadi tidak tepat waktu	5,60	3

Jakarta, Januari 2022
Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roesianto Hendro Putro
Penata (III/c)

NIP. 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836

3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758

3813972


RENCANA TINDAK PERBAIKAN

**Unit Kerja Eselon IV : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kegiatan : Memproses surat masuk**

Rank	Pernyataan risiko	penyebab	Rencana pengendalian	waktu	Rencana infokom		waktu	Rencana pemantauan	waktu
					informasi	komunikasi			
1	Melakukan Double check satu persatu surat yang belum terdisposisi	Notif surat masuk yang belum terdisposisi di kotak masuk menu utama portal dan menu e-surat	Sdm yang memahami aplikasi portal	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling mengingatkan antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau proses filling surat masuk	Maret 2022
2	Adanya keterlambatan meneruskan surat kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo sehingga dalam penginputan surat ke aplikasi portal menjadi sedikit terlambat.	saling membantu pegawai	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Membuat group whatsapp	Maret 2022	Kasubag tata usaha memantau filling surat masuk yang dikerjakan	Maret 2022

3	Dalam memproses Surat keluar terjadi penumpukan karena terlambat untuk diteruskan kepada pimpinan	Sdm selama pandemi covid-19 sistem kerja disesuaikan dengan jadwal wfh/wfo, kemudian sdm yang kerja wfo tidak terfokus hanya untuk mengerjakan surat keluar	Sdm yang ada harus mengetahui sop surat masuk yang berlaku	Maret 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Saling membantu antar pegawai	Maret 2022	Kasubag tata usaha mengecek tanggal surat dan tanggal disposisi surat	Maret 2022
---	---	---	--	------------	------------------------------------	-------------------------------	------------	---	------------

Jakarta, Januari 2022
 Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha


 Roesianto Hendro Putro
 Penata (III/c)
 NIP 19780925 200812 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA
Tujuan : Terbentuknya Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional tidak sesuai dengan outline/ketentuan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Pegawai belum memahami peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
2.	Rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
3.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai	Dokumen tidak selesai tepat waktu
4.	Dokumen usulan jabatan fungsional tidak selesai sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah ditentukan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Banyaknya keterlibatan dengan Kementerian lain dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga memakan waktu lebih lama	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA
Tujuan : Terbentuknya Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional tidak sesuai dengan outline/ketentuan	Pegawai belum memahami peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	6,00	4
2.	Rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	8,89	2
3.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai	Dokumen tidak selesai tepat waktu	7,56	3
4.	Dokumen usulan jabatan fungsional tidak selesai sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah ditentukan	Banyaknya keterlibatan dengan Kementerian lain dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga memakan waktu lebih lama	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	9,00	1

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

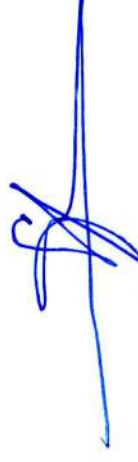
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA
Tujuan : Terbentuknya Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional tidak sesuai dengan outline/ketentuan	Pegawai belum memahami peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Dokumen usul jabatan fungsional tidak akuntabel	Mengikuti kegiatan seminar atau Bimbingan Teknis	Januari – Desember 2022	Ketentuan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Seminar, Bimtek	Koordinasi dengan Biro Kepegawaian	Januari – Desember 2022
2	Rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Usulan jabatan fungsional tidak dapat dilaksanakan tepat waktu	Sinkronisasi jadwal kegiatan / rapat dengan unit kerja melalui pengingat di Google Calender	Januari – Desember 2022	Agenda Kegiatan	WA, Google Calender	Menghubungi PIC masing-masing unit kerja yang terlibat	Januari – Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai	Waktu pelaksanaan mundur dari jadwal yang diberikan	Penyampaian permohonan data melalui surat dengan batas waktu	Januari – Desember 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Rapat	Menghubungi PIC masing-masing unit kerja yang terlibat	Januari – Desember 2022
1	Dokumen usulan jabatan fungsional tidak selesai sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah ditentukan	Banyaknya keterlibatan dengan Kementerian lain dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga memakan waktu lebih lama	Waktu pelaksanaan mundur dari jadwal yang diberikan	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari – Desember 2022	Melengkapi data dukung sesuai jadwal kegiatan	Membuat <i>chat group</i>	Menghubungi PIC pada instansi terkait	Januari – Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Terwujudnya Organisasi yang tepat fungsi
2. Terwujudnya Organisasi yang sesuai kebutuhan organisasi
3. Terwujudnya tata kerja yang sistematis dan harmonis antar unit kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Kelengkapan berkas/dokumen usulan penataan organisasi belum lengkap	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan – peraturan terkait dengan kebutuhan organisasi	Tidak terlaksananya penataan organisasi
2.	Rapat koordinasi penataan organisasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Tidak Terwujudnya Organisasi Ditjen Perhubungan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
3.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	a. Mutasi pegawai tanpa adanya penggantian b. Kurangnya SDM yang kompeten	Tidak terlaksananya penataan organisasi
4.	Penyusunan bahan usulan penataan organisasi belum dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan secara penuh oleh Direktorat/Balai	Tidak terlaksananya penataan organisasi

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Terwujudnya Organisasi yang tepat fungsi
2. Terwujudnya Organisasi yang sesuai kebutuhan organisasi
3. Terwujudnya tata kerja yang sistematis dan harmonis antar unit kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Kelengkapan berkas/dokumen usulan penataan organisasi belum lengkap	Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan – peraturan terkait dengan kebutuhan organisasi	Proses penyusunan dokumen penataan organisasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	3,38	3
2.	Rapat koordinasi penataan organisasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	3,94	2
3.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	a. Mutasi pegawai tanpa adanya penggantian b. Kurangnya SDM yang kompeten	Keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen penataan organisasi	3,25	4
4.	Penyusunan bahan usulan penataan organisasi belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan secara penuh oleh Direktorat/Balai	Dokumen tidak selesai tepat waktu	5,50	1

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** :
1. Terwujudnya Organisasi yang tepat fungsi
 2. Terwujudnya Organisasi yang sesuai kebutuhan organisasi
 3. Terwujudnya tata kerja yang sistematis dan harmonis antar unit kerja

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1						7	8	9	10
3	Kelengkapan berkas/dokumen usulan penataan organisasi belum lengkap	Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan – peraturan terkait dengan kebutuhan organisasi	Dokumen Penataan dan Evaluasi Organisasi belum dapat dilanjutkan	Koordinasi dengan stakeholder terkait dokumen pendukung yang diperlukan	Februari – April 2022	Melakukan evaluasi	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Memperbanyak literatur dan referensi	Januari – Desember 2022
2	Rapat koordinasi penataan organisasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Penataan dan Evaluasi Organisasi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu	Koordinasi dengan sekretaris pimpinan terkait jadwal yang kosong	Januari – Desember 2022	Jadwal /agenda pimpinan	Rapat Koordinasi	Sinkronisasi jadwal kegiatan/rapat melalui google calender	Januari – Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	a. Mutasi pegawai tanpa adanya penggantian b. Kurangnya SDM yang kompeten	Hasil dari Penataan dan Evaluasi Organisasi kurang maksimal tidak sesuai target	Pengajian SDM untuk mengikuti sosialisasi/ workshop	Januari	Sharing pengetahuan secara mandiri	Rapat	Melakukan <i>training</i> secara bergilir dan bertahap dalam menunjang kemampuan dalam penataan organisasi	Januari – April 2022
1	Penyusunan bahan usulan penataan organisasi belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan secara penuh oleh Direktorat/Balai	Waktu pelaksanaan mundur dari jadwal yang diberikan	Membuat <i>chat group</i> untuk koordinasi teknis serta membuat surat permintaan data dengan batas waktu	Januari – Desember 2022	Melengkapi data pendukung sesuai jadwal kegiatan	Membuat <i>chat group</i>	Koordinasi dengan Direktorat/Balai	Januari – Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang valid
2. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak sesuai dengan peraturan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu
2.	Kelengkapan berkas/dokumen bahan pengendalian gratifikasi belum lengkap	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu
3.	Rapat Koordinasi penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu
4.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Data Pendukung belum di sampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum


SYAFEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang valid
2. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak sesuai dengan peraturan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	7,39	3
2.	Kelengkapan berkas/dokumen bahan pengendalian gratifikasi belum lengkap	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	9,92	1
3.	Rapat Koordinasi penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	8,44	2
4.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat difinalisasi	Data Pendukung belum di sampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	5,83	4

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

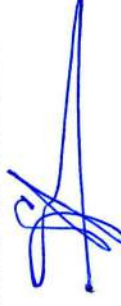
- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi Ditjen Perkeretaapian
- Tujuan** : 1. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang valid
2. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1					6	7	8	9	10
3	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak sesuai dengan peraturan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	Rapat sosialisasi penyusunan pengendalian gratifikasi sesuai PM. 47 tahun 2018 dan membuat dropbox Tim pengendalian gratifikasi untuk sharing pengetahuan	Januari 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Surat, Telepon, email, WA, SMS, Aplikasi Sistem Informasi online	Sharing pengetahuan	Januari-Maret 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelengkapan berkas/dokumen bahan pengendalian gratifikasi belum lengkap	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	dan komunikasi antar anggota Tim Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Januari – Maret 2022	Mengingatka n perwakilan Direktorat / Balai / Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Rapat Koordinasi	Koordinasi secara intensif dengan PIC yang menangani	Januari – Desember 2022
2	Rapat Koordinasi penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	Sinkronisasi jadwal kegiatan/rapat dengan unit kerja melalui pengingat Google Calender	April- Desember 2022	Agenda Kegiatan	WA, Google Calender	Sinkronisasi jadwal kegiatan/ rapat dengan unit kerja melalui pengingat Google Calender	April- Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1						7	8		10
4	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat difinalisasi	Data Pendukung belum di sampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	Penyampaian permohonan data melalui surat dengan batas waktu	April- November 2022	Kelengkapan Data	Surat, Nota Dinas	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	April- November 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Tujuan :
1. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
2. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Efektif dan Efisien

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Pemahaman pegawai mengenai Reformasi Birokrasi kurang	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Pegawai belum memahami kurang memahami tentang peraturan Reformasi Birokrasi	Pegawai kurang dapat mentransfer ilmu/-penyampaian informasi kepada pegawai lain mengenai Reformasi Birokrasi
2.	Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Pemotongan Anggaran (<i>Refocussing</i>)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang maksimal
3.	Kelengkapan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi belum lengkap	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	Proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak dapat dilakukan tepat waktu
4.	Rapat pembahasan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi ditunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Direktorat/Balai/Bagian ada penugasan lain yang lebih penting	Proses evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Tujuan :
1. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
2. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Efektif dan Efisien

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Pemahaman pegawai mengenai Reformasi Birokrasi kurang	Pegawai belum memahami kurang memahami tentang peraturan Reformasi Birokrasi	Pegawai kurang dapat mentransfer ilmu/- penyampaian informasi kepada pegawai lain mengenai Reformasi Birokrasi	7,81	1
2.	Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang	Pemotongan Anggaran (<i>Refocussing</i>)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang maksimal	5,91	3
3.	Kelengkapan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi belum lengkap	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	Proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak dapat dilakukan tepat waktu	5,34	4
4.	Rapat pembahasan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi ditunda pelaksanaannya	Direktorat/Balai/Bagian ada penugasan lain yang lebih penting	Proses evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	6,56	2

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

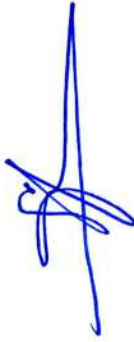
- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- Tujuan** : 1. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
2. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Efektif dan Efisien

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	1 Pemahaman pegawai mengenai Reformasi Birokrasi kurang	3 Pegawai belum memahami kurang memahami tentang peraturan Reformasi Birokrasi	4 pegawai kurang dapat mentransfer ilmu/-penyampaian informasi kepada pegawai lain mengenai Reformasi Birokrasi	5 Pemberian materi mengenai peraturan Reformasi Birokrasi melalui Sosialisasi /Bimtek	6 Januari - Mei 2022	7 Pemberian materi mengenai peraturan Reformasi Birokrasi	8 mengadakan pertemuan rutin membahas peraturan terbaru mengenai Reformasi Birokrasi	9 Pemberian materi mengenai peraturan Reformasi Birokrasi secara aktif	10 Januari - Mei 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang	Pemotongan Anggaran (<i>Refocussing</i>)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang maksimal	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Januari - Februari 2022	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Notulen rapat	Evaluasi Biaya	Januari - Februari 2022
4	Kelengkapan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi belum lengkap	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/ Bagian	Proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak dapat dilakukan tepat waktu	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Februari - Mei 2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/ Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Rapat Koordinasi	Melalui surat permintaan penyajian data dukung sesuai jadwal	Februari - Mei 2022
2	Rapat pembahasan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi ditunda	Direktorat/Balai/ Bagian ada penugasan lain yang lebih penting	Proses evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan	Melaksanakan rapat kegiatan rapat bersama yang mengevaluasi dari hasil penilaian	Januari - Mei 2022	Mengevaluasi hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi	Rapat	Hasil Evaluasi penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi yang	Januari - Mei 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2 pelaksanaannya	3	4 tepat waktu	5 Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi	6	7 Birokrasi	8	9 baik	10

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai
Tujuan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai selesai tepat waktu
2. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai yang di hasilkan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Kompilasi Kelengkapan Data pendukung (Analisis Beban Kerja / Uraian Tugas Jabatan Fungsional / Analisa Jabatan /Pegawai yang BUP (Batas Usia Pensiun) tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu
2.	Penyusunan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai belum sesuai ketentuan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Anggota Tim belum mempunyai wawasan/pengetahuan tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai	Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kebutuhan Pegawai tidak selesai tepat waktu
3.	Pelaksanaan rapat koordinasi/ konsinyering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemik COVID-19	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu
4.	Keterlambatan dalam membuat Konsep Surat Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	SDM yang menangani kegiatan tersebut memiliki pekerjaan baru yang harus segera di selesaikan	Pelaksanaan Kegiatan rencana Kebutuhan Formasi Pegawai tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
Kegiatan : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai
Tujuan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai selesai tepat waktu
2. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai yang di hasilkan sesuai dengan dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Kompilasi Kelengkapan Data pendukung (Analisis Beban Kerja / Uraian Tugas Jabatan Fungsional / Analisa Jabatan /Pegawai yang BUP (Batas Usia Pensiun) tertunda	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	7,28	2
2.	Penyusunan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai belum sesuai ketentuan	Anggota Tim belum mempunyai wawasan/pengetahuan tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai	Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kebutuhan Pegawai tidak selesai tepat waktu	8,84	1
3.	Pelaksanaan rapat koordinasi/ konsinyering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemik COVID-19	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	6,72	3
4.	Keterlambatan dalam membuat Konsep Surat Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai	SDM yang menangani kegiatan tersebut memiliki pekerjaan baru yang harus segera di selesaikan	Pelaksanaan Kegiatan rencana Kebutuhan Formasi Pegawai tidak tepat waktu	4,84	4

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum


SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon III** : Bagian Kepegawaian dan Umum
- Kegiatan** : Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai
- Tujuan** :
 1. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai selesai tepat waktu
 2. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai yang di hasilkan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1									
2	Kompilasi Kelengkapan Data pendukung (Analisis Beban Kerja / Uraian Tugas Jabatan Fungsional / Analisa Jabatan /Pegawai yang BUP (Batas Usia Pensiun) tertunda	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/ bagian	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Penyampaian permohonan data sudah melalui surat dengan batas waktu sesuai jadwal	Januari - Maret 2022	Data pendukung dari Direktorat/ Balai/Bagian untuk penyampaian secara tepat waktu	Surat/Nota Dinas, portal aplikasi DJKA	Evaluasi kelengkapan data kepada pimpinan secara berkala	Januari-Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai belum sesuai ketentuan	Anggota Tim belum mempunyai wawasan/pengertian tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai	Rapat dan Membuat dropbox Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai untuk sharing pengetahuan dan komunikasi antar anggota Tim	Koordinasi intensif dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk sharing pengetahuan terkait Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	Januari - Maret 2022	Rapat dan Sharing pengetahuan secara mandiri	Membuat dropbox	Evaluasi hasil penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	Januari-Maret 2022
3	Pelaksanaan rapat koordinasi/ konsinyering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk social distancing	Memantau anggota Tim secara aktif dan berkoordinasi intensif dengan Tim Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	Februari-Maret 2022	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk <i>social distancing</i>	Surat/Nota Dinas	Koordinasi dengan Satker terkait usulan kegiatan	Maret-Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1									
4	Keterlambatan dalam membuat Konsep Surat Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai	SDM yang menangani kegiatan tersebut memiliki pekerjaan baru yang harus segera di selesaikan	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	Mengusulkan penambahan SDM yang berkompeten	Maret 2022	Berkomunikasi secara intensif dengan PIC terkait	Nota Dinas, Telepon, WA, SMS, email, aplikasi sistem informasi online	Cek progress surat usulan	Maret-Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan :
1. Terwujudnya Organisasi yang tepat fungsi
2. Terwujudnya Organisasi yang sesuai kebutuhan organisasi
3. Terwujudnya tata kerja yang sistematis dan harmonis antar unit kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Kelengkapan berkas/dokumen usulan penataan organisasi belum lengkap	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan – peraturan terkait dengan kebutuhan organisasi	Tidak terlaksananya penataan organisasi
2.	Rapat koordinasi penataan organisasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Tidak Terwujudnya Organisasi Ditjen Perhubungan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
3.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	a. Mutasi pegawai tanpa adanya penggantian b. Kurangnya SDM yang kompeten	Tidak terlaksananya penataan organisasi
4.	Penyusunan bahan usulan penataan organisasi belum dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan secara penuh oleh Direktorat/Balai	Tidak terlaksananya penataan organisasi

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR
Pembina (IV/a)
NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan :
1. Terwujudnya Organisasi yang tepat fungsi
2. Terwujudnya Organisasi yang sesuai kebutuhan organisasi
3. Terwujudnya tata kerja yang sistematis dan harmonis antar unit kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Kelengkapan berkas/dokumen usulan penataan organisasi belum lengkap	Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan – peraturan terkait dengan kebutuhan organisasi	Proses penyusunan dokumen penataan organisasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	3,38	3
2.	Rapat koordinasi penataan organisasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	3,94	2
3.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	a. Mutasi pegawai tanpa adanya penggantian b. Kurangnya SDM yang kompeten	Keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen penataan organisasi	3,25	4
4.	Penyusunan bahan usulan penataan organisasi belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan secara penuh oleh Direktorat/Balai	Dokumen tidak selesai tepat waktu	5,50	1

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penataan dan Evaluasi Organisasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Terwujudnya Organisasi yang tepat fungsi
 2. Terwujudnya Organisasi yang sesuai kebutuhan organisasi
 3. Terwujudnya tata kerja yang sistematis dan harmonis antar unit kerja

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	3	Kelengkapan berkas/dokumen usulan penataan organisasi belum lengkap	4	5	6	7	8	9	10
3	Karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan – peraturan terkait dengan kebutuhan organisasi	Dokumen Penataan dan Evaluasi Organisasi belum dapat dilanjutkan	Koordinasi dengan stakeholder terkait dokumen pendukung yang diperlukan	Februari – April 2022	Melakukan evaluasi	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Memperbanyak literatur dan referensi	Januari – Desember 2022	
2	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Penataan dan Evaluasi Organisasi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu	Koordinasi dengan sekretaris pimpinan terkait jadwal yang kosong	Januari – Desember 2022	Jadwal /agenda pimpinan	Rapat Koordinasi	Sinkronisasi jadwal kegiatan/rapat melalui google calendar	Januari – Desember 2022	

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	a. Mutasi pegawai tanpa adanya penggantian b. Kurangnya SDM yang kompeten	Hasil dari Penataan dan Evaluasi Organisasi kurang maksimal tidak sesuai target	Pengajian SDM untuk mengikuti sosialisasi/ <i>workshop</i>	Januari	<i>Sharing</i> pengetahuan secara mandiri	Rapat	Melakukan <i>training</i> secara bergilir dan bertahap dalam menunjang kemampuan dalam penataan organisasi	Januari – April 2022
1	Penyusunan bahan usulan penataan organisasi belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan secara penuh oleh Direktorat/Balai	Waktu pelaksanaan mundur dari jadwal yang diberikan	Membuat <i>chat group</i> untuk koordinasi teknis serta membuat surat permintaan data dengan batas waktu	Januari – Desember 2022	Melengkapi data dukung sesuai jadwal kegiatan	Membuat <i>chat group</i>	Koordinasi dengan Direktorat/Balai	Januari – Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi



EVA AMIR
Pembina (IV/a)
NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang valid
2. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak sesuai dengan peraturan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu
2.	Kelengkapan berkas/dokumen bahan pengendalian gratifikasi belum lengkap	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu
3.	Rapat Koordinasi penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu
4.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Data Pendukung belum di sampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang valid
2. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang tepat waktu

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak sesuai dengan peraturan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	7,39	3
2.	Kelengkapan berkas/dokumen bahan pengendalian gratifikasi belum lengkap	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	9,92	1
3.	Rapat Koordinasi penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	8,44	2
4.	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat difinalisasi	Data Pendukung belum di sampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	5,83	4

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR
Pembina (IV/a)
NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyusunan Bahan Pengendalian Gratifikasi Ditjen Perkeretaapian
Tujuan : 1. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang valid
 2. Tersusunnya bahan Pengendalian Gratifikasi yang tepat waktu

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	3	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak sesuai dengan peraturan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/pedoman yang berhubungan dengan penyusunan bahan pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	Rapat sosialisasi penyusunan pengendalian gratifikasi sesuai PM. 47 tahun 2018 dan membuat dropbox Tim pengendalian gratifikasi untuk sharing pengetahuan dan	Januari 2022	Sharing pengetahuan secara mandiri	Surat, Telepon, email, WA, SMS, Aplikasi Sistem Informasi online	Sharing pengetahuan	Januari-Maret 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				komunikasi antar anggota Tim					
1	Kelengkapan berkas/dokumen bahan pengendalian gratifikasi belum lengkap	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data pendukung sesuai jadwal kegiatan	Januari – Maret 2022	Mengingatka n perwakilan Direktorat / Balai / Bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Rapat Koordinasi	Koordinasi secara intensif dengan PIC yang menangani	Januari – Desember 2022
2	Rapat Koordinasi penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tidak selesai tepat waktu	Sinkronisasi jadwal kegiatan/rapat dengan unit kerja melalui pengingat Google Calender	April- Desember 2022	Agenda Kegiatan	WA, Google Calender	Sinkronisasi jadwal kegiatan/rapat dengan unit kerja melalui pengingat Google Calender	April- Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyusunan bahan pengendalian gratifikasi belum dapat difinalisasi	Data Pendukung belum di sampaikan/masih dalam proses kompilasi oleh Direktorat/Balai	Proses penyusunan bahan pengendalian gratifikasi tidak tepat waktu	Penyampaian permohonan data melalui surat dengan batas waktu	April- November 2022	Kelengkapan Data	Surat, Nota Dinas	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	April- November 2022

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi



EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA
Tujuan : Terbentuknya Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional tidak sesuai dengan outline/ketentuan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Pegawai belum memahami peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
2.	Rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu
3.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat difinalisasi	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai	Dokumen tidak selesai tepat waktu
4.	Dokumen usulan jabatan fungsional tidak selesai sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah ditentukan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Banyaknya keterlibatan dengan Kementerian lain dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga memakan waktu lebih lama	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR
Pembina (IV/a)
NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA
Tujuan : Terbentuknya Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional tidak sesuai dengan outline/ketentuan	Pegawai belum memahami peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	6,00	4
2.	Rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	8,89	2
3.	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat difinalisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai	Dokumen tidak selesai tepat waktu	7,56	3
4.	Dokumen usulan jabatan fungsional tidak selesai sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah ditentukan	Banyaknya keterlibatan dengan Kementerian lain dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga memakan waktu lebih lama	Dokumen tidak akuntabel dan tidak selesai tepat waktu	9,00	1

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR
Pembina (IV/a)
NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3858836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Proses Usulan Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA
Tujuan : Terbentuknya Jabatan Fungsional di lingkungan DJKA

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu	
						Informasi	Komunikasi			
1	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional tidak sesuai dengan outline/ketentuan	Pegawai belum memahami peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Dokumen usul jabatan fungsional tidak akuntabel	Mengikuti kegiatan seminar atau Bimbingan Teknis	Januari – Desember 2022	Ketentuan penyusunan dokumen jabatan fungsional	Seminar, Bimtek	Koordinasi dengan Biro Kepegawaian	Januari – Desember 2022	
2	Rapat koordinasi penyusunan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Jadwal rapat tertunda karena bersamaan dengan kegiatan lainnya yang prioritas	Usulan jabatan fungsional tidak dapat dilaksanakan tepat waktu	Sinkronisasi jadwal kegiatan / rapat dengan unit kerja melalui pengingat di Google Calender	Januari – Desember 2022	Agenda Kegiatan	WA, Google Calender	Menghubungi PIC masing-masing unit kerja yang terlibat	Januari – Desember 2022	

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	3	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai	Waktu pelaksanaan mundur dari jadwal yang diberikan	Penyampaian permohonan data melalui surat dengan batas waktu	Januari – Desember 2022	7	8	9	10
3	2	Penyusunan bahan dokumen usulan jabatan fungsional belum dapat difinalisasi				Sharing pengetahuan secara mandiri	Rapat	Menghubungi PIC masing-masing unit kerja yang terlibat	Januari – Desember 2022
1	1	Dokumen usulan jabatan fungsional tidak selesai sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah ditentukan	Waktu pelaksanaan mundur dari jadwal yang diberikan	Koordinasi dengan instansi terkait	Januari – Desember 2022	Melengkapi data dukung sesuai jadwal kegiatan	Membuat <i>chat group</i>	Menghubungi PIC pada instansi terkait	Januari – Desember 2022

Jakarta, Januari 2022
 Sub Koordinator Kelompok
 Kepegawaian dan Organisasi



EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Tujuan : 1. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
2. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Efektif dan Efisien

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Pemahaman pegawai mengenai Reformasi Birokrasi kurang	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Pegawai belum memahami kurang memahami tentang peraturan Reformasi Birokrasi	Pegawai kurang dapat mentransfer ilmu/-penyampaian informasi kepada pegawai lain mengenai Reformasi Birokrasi
2.	Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Pemotongan Anggaran (<i>Refocussing</i>)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang maksimal
3.	Kelengkapan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi belum lengkap	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	Proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak dapat dilakukan tepat waktu
4.	Rapat pembahasan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi ditunda pelaksanaannya	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Direktorat/Balai/Bagian ada penugasan lain yang lebih penting	Proses evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan tepat waktu

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Tujuan :
1. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
2. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Efektif dan Efisien

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Pemahaman pegawai mengenai Reformasi Birokrasi kurang	Pegawai belum memahami kurang memahami tentang peraturan Reformasi Birokrasi	Pegawai kurang dapat mentransfer ilmu/-penyampaian informasi kepada pegawai lain mengenai Reformasi Birokrasi	7,81	1
2.	Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang	Pemotongan Anggaran (<i>Refocussing</i>)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang maksimal	5,91	3
3.	Kelengkapan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi belum lengkap	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	Proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak dapat dilakukan tepat waktu	5,34	4
4.	Rapat pembahasan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi ditunda pelaksanaannya	Direktorat/Balai/Bagian ada penugasan lain yang lebih penting	Proses evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	6,56	2

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Tujuan : 1. Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
 2. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Efektif dan Efisien

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu	
						Informasi	Komunikasi			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemahaman pegawai mengenai Reformasi Birokrasi kurang	Pegawai belum memahami kurang memahami tentang peraturan Reformasi Birokrasi	pegawai kurang dapat mentransfer ilmu/-penyampaian informasi kepada pegawai lain mengenai Reformasi Birokrasi	Pemberian materi mengenai peraturan Reformasi Birokrasi melalui Sosialisasi /Bimtek	Januari - Mei 2022	Pemberian materi mengenai peraturan Reformasi Birokrasi	mengadakan pertemuan rutin membahas peraturan terbaru mengenai Reformasi Birokrasi	Pemberian materi mengenai peraturan Reformasi Birokrasi secara aktif	Januari - Mei 2022	

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10
3	Anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang	Pemotongan Anggaran (<i>Refocussing</i>)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kurang maksimal	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Januari - Februari 2022	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Notulen rapat	Evaluasi Biaya	Januari - Februari 2022
4	Kelengkapan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi belum lengkap	Sebagian data pendukung belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/Bagian	Proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tidak dapat dilakukan tepat waktu	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data pendukung sesuai jadwal kegiatan	Februari - Mei 2022	Mengingatkan perwakilan Direktorat/Balai/Bagian untuk menyiapkan data pendukung sesuai jadwal kegiatan	Rapat Koordinasi	Melalui surat permintaan penyiapan data dukung sesuai jadwal	Februari - Mei 2022
2	Rapat pembahasan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi ditunda	Direktorat/Balai/Bagian ada penugasan lain yang lebih penting	Proses evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi tidak dapat dilakukan	Melaksanakan kegiatan rapat bersama yang mengevaluasi dari hasil penilaian	Januari - Mei 2022	Mengevaluasi hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi	Rapat	Hasil Evaluasi penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi yang	Januari - Mei 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan	Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi	
1	pelaksanaannya	3	4 tepat waktu	5 Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi	6	7 Birokrasi	8 8	9 10 baik

Jakarta, Januari 2022
 Sub Koordinator Kelompok
 Kepegawaian dan Organisasi



EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai
Tujuan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai selesai tepat waktu
2. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai yang di hasilkan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1	2	3	4	5
1.	Kompilasi Kelengkapan Data pendukung (Analisis Beban Kerja / Uraian Tugas Jabatan Fungsional / Analisa Jabatan /Pegawai yang BUP (Batas Usia Pensiun) tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu
2.	Penyusunan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai belum sesuai ketentuan	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Anggota Tim belum mempunyai wawasan/pengetahuan tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai	Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kebutuhan Pegawai tidak selesai tepat waktu
3.	Pelaksanaan rapat koordinasi/ konsinyering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemik COVID-19	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu
4.	Keterlambatan dalam membuat Konsep Surat Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai	Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi	SDM yang menangani kegiatan tersebut memiliki pekerjaan baru yang harus segera di selesaikan	Pelaksanaan Kegiatan rencana Kebutuhan Formasi Pegawai tidak tepat waktu

Jakarta, Januari 2022

Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR

Pembina (IV/a)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai
Tujuan :
1. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai selesai tepat waktu
2. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai yang di hasilkan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT	SCORE RISIKO	RANKING
1	2	3	4	5	6
1.	Kompilasi Kelengkapan Data pendukung (Analisis Beban Kerja / Uraian Tugas Jabatan Fungsional / Analisa Jabatan /Pegawai yang BUP (Batas Usia Pensiun) tertunda	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/bagian	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	7,28	2
2.	Penyusunan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai belum sesuai ketentuan	Anggota Tim belum mempunyai wawasan/pengetahuan tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai	Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kebutuhan Pegawai tidak selesai tepat waktu	8,84	1
3.	Pelaksanaan rapat koordinasi/ konsinyering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemik COVID-19	Proses Penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi tidak dapat dilakukan tepat waktu	6,72	3
4.	Keterlambatan dalam membuat Konsep Surat Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai	SDM yang menangani kegiatan tersebut memiliki pekerjaan baru yang harus segera di selesaikan	Pelaksanaan Kegiatan rencana Kebutuhan Formasi Pegawai tidak tepat waktu	4,84	4

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi

EVA AMIR
Pembina (IV/a)
NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Unit Kerja Eselon IV** : Kelompok Kepegawaian dan Organisasi
Kegiatan : Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai
Tujuan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai selesai tepat waktu
 2. Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai yang di hasilkan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1									
2	Kompilasi Kelengkapan Data pendukung (Analisis Beban Kerja / Uraian Tugas Jabatan Fungsional / Analisa Jabatan /Pegawai yang BUP (Batas Usia Pensiun) tertunda	Data pendukung masih belum disampaikan oleh Direktorat/Balai/ bagian	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Penyampaian permohonan data sudah melalui surat dengan batas waktu sesuai jadwal	Januari - Maret 2022	Data pendukung dari Direktorat/ Balai/Bagia n untuk penyampaia n secara tepat waktu	Surat/Nota Dinas, portal aplikasi DJKA	Evaluasi kelengkapan data kepada pimpinan secara berkala	10 Januari- Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan		Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi		
1	Penyusunan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai belum sesuai ketentuan	3 Anggota Tim belum mempunyai wawasan/pengertian tentang peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan Rencana usulan kebutuhan formasi pegawai	4 Rapat dan Membuat dropbox Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai untuk sharing pengetahuan dan komunikasi antar anggota Tim	5 Koordinasi intensif dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk sharing pengetahuan terkait Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	6 Januari - Maret 2022	7 Rapat dan Sharing pengetahuan secara mandiri	8 Membuat dropbox	9 Evaluasi hasil penyusunan Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	10 Januari- Maret 2022
3	Pelaksanaan rapat koordinasi/ konsinyering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu/tertunda	Terbatasnya pelaksanaan kegiatan karena pandemic COVID-19	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk social distancing	Memantau anggota Tim secara aktif dan berkoordinasi intensif dengan Tim Penyusunan Rencana Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai	Februari- Maret 2022	Usulan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk <i>social distancing</i>	Surat/Nota Dinas	Koordinasi dengan Satker terkait usulan kegiatan	Maret- Desember 2022

Rank	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Perbaikan			Rencana Perbaikan Pemantauan	Waktu
						Informasi	Komunikasi			
1										
4	Keterlambatan dalam membuat Konsep Surat Usulan Rencana Kebutuhan Pegawai	SDM yang menangani kegiatan tersebut memiliki pekerjaan baru yang harus segera di selesaikan	Membuat WA Group untuk komunikasi antar anggota tim	Mengusulkan penambahan SDM yang berkompeten	Maret 2022	Berkomunikasi secara intensif dengan PIC terkait	Nota Dinas, Telepon, WA, SMS, email, aplikasi system informasi online	Cek progress surat usulan	Maret-Desember 2022	

Jakarta, Januari 2022
Sub Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Organisasi



EVA AMIR

Pembina (IV/IIa)

NIP. 19640623 198903 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Penghapusan Barang Inventaris Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penghapusan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2	Tidak Terlaksananya Pendataan/Penghapusan BMN	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3	Tidak Mencatat jumlah Penghapusan BMN yang keluar	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	SDM yang kurang memahami peraturan dalam Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Penghapusan Barang Inventaris Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penghapusan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3.75	2
2	Tidak Terlaksananya Pendataan/Penghapusan BMN	SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.80	1
3	Tidak Mencatat jumlah Penghapusan BMN yang keluar	SDM yang kurang memahami peraturan dalam Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.88	3

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Penghapusan Barang Inventaris Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penghapusan BMN

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Pengendalian	Waktu	Perbaikan Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Membuat Surat ke Unit kerja Terkait Persyaratan Permintaan Barang	Setiap Pengajuan Permintaan Barang Penghapusan	Mengingatkan ke Petugas ,Agar Unit Peminta Barang Membuat Nota Dinas Setiap Melakukan Permintaan Barang Melakukan pengecekan dan berkoordinasi internal staff subbagian penyediaan peralatan dan penatausahaan BMN (rapat staff	Setiap Pengajuan Permintaan Barang Penghapusan	Kabag Lebih Memperhatikan Prosedur Permintaan Barang penghapusan	Setiap Pengajuan Permintaan Barang Penghapusan
2	Tidak Terlaksananya Pendataan/Penghapusan BMN	SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Melakukan Koordinasi Internal Sub 2 secara Berkala serta Mengikuti Bimtek Penghapusan	Triwulanan	Rutin Melakukan pengecekan dan Selalu Mengingatkan ke petugas untuk melaksanakan Pendataan Barang Melakukan pengecekan dan berkoordinasi internal staff subbagian penyediaan peralatan dan penatausahaan	Triwulanan	Kabag Lebih Insten Untuk Memantau Kegiatan Petugas Pendataan Barang Penghapusan	1 Tahun

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Pengendalian	Waktu	Perbaikan Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
3	Tidak Mencatat jumlah Penghapusan BMN yang keluar	SDM yang kurang memahami peraturan dalam Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Melakukan Pengecekan Secara Rutin dan Melakukan Koordinasi Internal Sub 2 Secara Berkala Penghapusan	Triwulan	BMN (rapat staff) Memastikan, Mengecek dan Mencocokkan Barang yang Datang dengan SPK dan Melakukan pengecekan dan berkoordinasi internal staff subbagian penyediaan peralatan dan penatausahaan BMN (rapat staff)	Triwulan	Kabag Melakukan Pengecekan sebelum membuat laporan Barang Penghapusan	1 Tahun

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Rapid Test Covid-19 (PENEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID 19) dan
Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapihan

Tujuan : 1. Mengidentifikasi pegawai yang terinfeksi virus Corona
2. Membantu pencegahan penyebaran virus Corona

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Adanya kenaikan harga dan langkanya alat untuk rapid test Covid-19	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana
2.	Pegawai yang hadir untuk rapid tes tidak sesuai target	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Rasa khawatir dan takut para pegawai terhadap hasil tes apabila positif dan lokasi kantor ada di berbagai wilayah	Tidak maksimalnya hasil pemeriksaan rapid tes Covid-19
3.	Adanya kenaikan harga dan langkanya cairan disinfektan	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Rapid Test Covid-19 (PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID 19) dan Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : 1. Mengidentifikasi pegawai yang terinfeksi virus Corona
2. Membantu pencegahan penyebaran virus Corona

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RAN KING
1.	Adanya kenaikan harga dan langkanya alat untuk rapid test Covid-19	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	9.50	1
2.	Pegawai yang hadir untuk rapid tes tidak sesuai target	Rasa khawatir dan takut para pegawai terhadap hasil tes apabila positif dan lokasi kantor ada di berbagai wilayah	Tidak maksimalnya hasil pemeriksaan rapid tes Covid-19	8.50	3
3.	Adanya kenaikan harga dan langkanya cairan disinfektan	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	9.00	2

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Rapid Test Covid-19 (PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID 19) dan
Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan

1. Mengidentifikasi pegawai yang terinfeksi virus Corona
2. Membantu pencegahan penyebaran virus Corona

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada capaian	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Adanya kenaikan harga dan langkanya alat untuk rapid test Covid-19	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	Mengecek harga dan stok barang melalui website dan berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenhub dinas kesehatan setempat	setiap bulan	Surat/ Nota Dinas, Telpon ke UPK kemenhub. Melakukan rapat staf (rapat internal) untuk mengingatkan dan berkoordinasi	1 Bulan	Pengecekan harga dan stok alat rapid test melalui website toko online dan meminta informasi ke Unit Pelayanan Kesehatan Kemenhub	1 Tahun
2	Pegawai yang hadir untuk rapid tes tidak sesuai target	Rasa khawatir dan takut para pegawai terhadap hasil tes apabila positif dan lokasi kantor ada di berbagai wilayah	Tidak maksimalnya hasil pemeriksaan rapid tes Covid-19	Menginformasikan satu minggu sebelum kegiatan dan dilaksanakan koordinasi dan dengan masing-masing kasubag TU dilindungi DIKA	setiap bulan	Surat/ Nota Dinas, Telpon ke UPK kemenhub. Melakukan rapat staf (rapat internal) untuk mengingatkan dan berkoordinasi	1 Bulan	Daftar pegawai yang akan mengikuti kegiatan rapid test	1 Tahun

3	Adanya kenaikan harga dan langkanya cairan disinfektan	Stok terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	Mengecek harga dan stok barang melalui website dan berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) dinas kesehatan setempat	setiap bulan	Surat/ Nota Dinas, Telpn ke UPK kemenhub. Melakukan rapat staf (rapat internal) untuk mengingatkan dan berkoordinasi	1 Bulan	Pengecekan harga dan stok alat rapid test melalui website toko online dan meminta informasi ke Unit Pelayanan Kesehatan Kemenhub	1 Tahun
---	--	--	---	---	--------------	--	---------	--	---------

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Sosialisasi P4GN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1	Pengumpulan data pegawai tidak sesuai.	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Ada pegawai honorer yang tidak terdata dan sulitnya mendapatkan data pegawai dilapangan.	Sosialisasi tidak dapat dilakukan keseluruhan pegawai
2	Banyaknya kegiatan yang berada di waktu yang sama	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Kurangnya jumlah personil/peserta/orang untuk melakukan kegiatan tersebut	Kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target
3	Pemotongan Anggaran	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Ada pemotongan/penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Kegiatan Terhambat/Gagal
4	Pembuatan SK, SPT dan surat pendukung lainnya yang memakan waktu cukup lama	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Banyaknya surat yang perlu untuk ditandatangani, sehingga proses penandatanganan SK, SPT dan surat pendukung lainnya terhambat	Surat tidak dapat terdistribusi dengan cepat/tepat waktu
5	Disposisi surat yang memakan waktu cukup lama	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Surat undangan, permohonan narasumber dan surat lainnya untuk pihak ke – 3 yang memerlukan waktu untuk disposisi surat.	Koordinasi dengan pihak ke – 3 sedikit terhambat, serta data narasumber dan peserta sulit di dapat
6	Bahan paparan/materi sulit didapatkan dari pihak narasumber	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Jam terbang narasumber yang sibuk, sehingga kesulitan dalam meminta bahan paparan/materi sosialisasi	Waktu pencetakan buku materi menjadi lebih lama (terhambat)
7	Pembuatan design spanduk, banner dan seminar kit yang memakan waktu cukup lama	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Tidak adanya pegawai yang memiliki keahlian design grafis	Pembuatan spanduk, banner dan seminar kit terhambat

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Sosialisasi P4GN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Pengumpulan data pegawai tidak sesuai.	Ada pegawai honorer yang tidak terdata dan sulitnya mendapatkan data pegawai dilapangan.	Sosialisasi tidak dapat dilakukan keseluruh pegawai	12.69	1
2	Banyaknya kegiatan yang berada di waktu yang sama	Kurangnya jumlah personil/peserta/orang untuk melakukan kegiatan tersebut	Kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target	9.38	2
3	Pemotongan Anggaran	Ada pemotongan/penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Kegiatan Terhambat/Gagal	6.23	6
4	Pembuatan SK, SPT dan surat pendukung lainnya yang memakan waktu cukup lama	Banyaknya surat yang perlu untuk ditandatangani, sehingga proses penandatanganan SK, SPT dan surat pendukung lainnya terhambat	Surat tidak dapat terdistribusi dengan cepat/tepat waktu	8.63	4
5	Disposisi surat yang memakan waktu cukup lama	Surat undangan, permohonan narasumber dan surat lainnya untuk pihak ke – 3 yang memerlukan waktu untuk disposisi surat.	Koordinasi dengan pihak ke – 3 sedikit terhambat, serta data narasumber dan peserta sulit di dapat	9.00	3
6	Bahan paparan/materi sulit didapatkan dari pihak narasumber	Jam terbang narasumber yang sibuk, sehingga kesulitan dalam	Waktu pencetakan buku materi menjadi lebih lama (terhambat)	7.22	5

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
		meminta bahan paparan/materi sosialisasi			
7	Pembuatan design spanduk, banner dan seminar kit yang memakan waktu cukup lama	Tidak adanya pegawai yang memiliki keahlian design grafis	Pembuatan spanduk, banner dan seminar kit terhambat	4.25	7

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : **Bagian Kepegawaian dan Umum**

Kegiatan : **Sosialisasi P4GN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Tujuan : **Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada capaian Pengendalian	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Pengumpulan data pegawai tidak sesuai:	Ada pegawai honorer yang tidak terdata dan sulitnya mendapatkan data pegawai dilapangan.	Sosialisasi tidak dapat dilakukan keseluruhan pegawai	Membuat dropbox Tim SAKIP untuk sharing pengetahuan dan komunikasi antar anggota Tim	2022	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tlp untuk mengingatkan Pegawai	Rapat Triwulanan	Pemantauan hasil sosialisasi berikut daftar hadir peserta	1 Tahun
2	Banyaknya kegiatan yang berada di waktu yang sama	Kurangnya jumlah personil/peserta/orang untuk melakukan kegiatan tersebut	Kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target	Membuat dropbox Tim SAKIP untuk sharing pengetahuan dan komunikasi antar anggota Tim	2022	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tlp untuk mengingatkan Pegawai	Rapat Triwulanan	Daftar pegawai yang akan dan telah mengikuti kegiatan rapid test	1 Tahun

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada capaian Pengendalian	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
3	Pemotongan Anggaran	Pemotongan/penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Kegiatan Terhambat/Gagal	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	Usulan RKA	Penyerapan Dokumen DIPA	Kabag Umum mengecek pembuatan dropbox	Pada saat Kegiatan Penyusunan LKIP
4	Pembuatan SK, SPT dan surat pendukung lainnya yang memakan waktu cukup lama	Banyaknya surat yang perlu untuk ditandatangani, sehingga proses penandatanganan SK, SPT dan surat pendukung lainnya terhambat	Surat tidak dapat terdistribusi dengan cepat/tepat waktu	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	Usulan RKA	Penyerapan Dokumen DIPA	Kabag Umum mengecek pembuatan dropbox	Pada saat Kegiatan Penyusunan LKIP
5	Disposisi surat yang memakan waktu cukup lama	Surat undangan, permohonan narasumber dan surat lainnya untuk pihak ke – 3 yang memerlukan waktu untuk disposisi surat.	Koordinasi dengan pihak ke – 3 sedikit terhambat, serta data narasumber dan peserta sulit di dapat	Pemantauan Surat yang dilakukan lebih agresif	Setiap pengajuan	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Komunikasi dengan pimpinan	Rapat awal Tahun	Memantau kecepatan proses tanda tangan surat/penyelesaian persuratan	Setiap Pengajuan
6	Bahan paparan/materi sulit didapatkan dari pihak narasumber	Jam terbang narasumber yang sibuk, sehingga kesulitan dalam meminta bahan paparan/materi sosialisasi	Waktu pencetakan buku materi menjadi lebih lama (terhambat)	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tlp	Check List data dukung oleh pimpinan tim	Rapat awal Tim Penyusun LKIP	Rapat awal Tim Penyusunan LKIP

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada capaian Pengendalian	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
7	Pembuatan design spanduk, banner dan seminar kit yang memakan waktu cukup lama	Tidak adanya pegawai yang memiliki keahlian design grafis	Pembuatan spanduk, banner dan seminar kit terhambat	Melakukan pendelegasian kepada Subbag Prolap sesuai jadwal kegiatan	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tlp	Semesteran	Pemantauan hasil pengadaaan baik secara kualitas dan kuantitas serta waktu	1 Tahun

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Keamanan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK/AKIBAT
1.	Tidak terlaksananya pengamanan untuk tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Tidak terpenuhinya rasa nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
2.	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Tidak terpenuhinya pelaksanaan pengamanan pimpinan yang sesuai kebutuhan pimpinan
3.	Tidak terlaksananya pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	Tidak terpenuhinya rasa aman dan nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Keamanan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANK ING
1.	Tidak terlaksananya pengamanan untuk tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Tidak terpenuhinya rasa nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	6.25	2
2.	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Tidak terpenuhinya pelaksanaan pengamanan pimpinan yang sesuai kebutuhan pimpinan	6.88	1
3.	Tidak terlaksananya pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	Tidak terpenuhinya rasa aman dan nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1.89	3

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPAIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Keamanan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Pengendalian	Waktu	Perbaikan Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Tidak terlaksananya pengamanan tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Tidak terpenuhinya rasa nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Memberikan arahan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.	Setiap kegiatan	Melakukan pengarahan sebelum memulai kegiatan dan berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi mengenai update informasi keadaan kantor	Setiap kegiatan	Kabag mengingatkan petugas keamanan untuk selalu melaksanakan SOP	Setiap kegiatan
2	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Tidak terpenuhinya pelaksanaan pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Memberikan arahan dan koordinasi kepada petugas keamanan internal	1 bulan	Rutin melakukan pengawasan dan Selalu Mengingat kepetugas untuk Melaksanakan tugas sesuai SOP secara lisan/surat	1 bulan	Kabag mengingatkan petugas keamanan untuk selalu melaksanakan SOP dan menjaga etika dalam memberikan pelayanan pengamanan pimpinan	1 Tahun

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak Capaian Pengendalian	Rencana Perbaikan Pengendalian	Waktu	Perbaikan Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
3	Tidak terlaksananya pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	Tidak terpenuhinya rasa aman dan nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	Setiap Bulan	Mengontrol dan memastikan petugas keamanan telah bertugas sesuai SOP melalui lisan/surat dan Berkoordinasi dengan koordinator petugas keamanan Biro Umum tentang keadaan keamanan gedung kantor.	Triwulan	Kabag melakukan monitoring dan meminta laporan kondisi dan situasi keamanan gedung	1 Tahun

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1	Tidak adanya Nota Dinas dari Unit Kerja peminta barang	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2	Tidak terlaksananya Pendataan/Inventarisasi BMN	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3	Tidak Mencatat jumlah Persediaan ATK/BMN yang keluar pada kartu BMN	Sub Koordinator kelompok Rumah Tangga	SDM yang kurang memahami peraturan dalam Penatausahaan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Tidak adanya Nota Dinas dari Unit Kerja peminta barang	SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3.75	2
2	Tidak terlaksananya Pendataan/Inventarisasi BMN	SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.80	1
3	Tidak Mencatat jumlah Persediaan ATK/BMN yang keluar pada kartu BMN	SDM yang kurang memahami peraturan dalam Penatausahaan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.88	3

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon III : Bagian Kepegawaian dan Umum

Kegiatan : Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMN

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Pengendalian	Waktu	Perbaikan Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Membuat Surat ke Unit kerja Terkait Persyaratan Permintaan Barang	Setiap Pengajuan Permintaan Barang	Mengingatkan ke Petugas, Agar Unit Peminta Barang Membuat Nota Dinas Setiap Melakukan Permintaan Barang Melakukan pengecekan dan berkoordinasi internal staff subbagian penyediaan peralatan dan penatausahaan BMN (rapat staff)	Setiap Pengajuan Permintaan Barang	Kabag Lebih Memperhatikan Prosedur Permintaan Barang	Setiap Pengajuan Permintaan Barang
2	Tidak Terlaksananya Pendataan/ Penghapusan BMN	SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Melakukan Koordinasi Internal Sub 2 secara Berkala	2022	Rutin Melakukan Pengecekan dan Selalu Mengingatkan ke petugas untuk Melaksanakan Pendataan Barang Melakukan pengecekan dan berkoordinasi internal staff subbagian penyediaan peralatan dan penatausahaan	2022	Kabag Lebih Insten Untuk Memantau Kegiatan Petugas Pendataan Barang	2022

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Pengendalian	Rencana Pengendalian	Waktu	Perbaikan Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
3	Tidak Mencatat jumlah Penghapusan BMN yang keluar	SDM yang kurang memahami peraturan dalam Penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam Penatausahaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Melakukan Pengecekan Secara Rutin dan Melakukan Koordinasi Internal Sub 2 Secara Berkala	2022	BMN (rapat staff) Memastikan, Mengecek dan Mencocokkan Barang yang Datang dengan SPK dan Melakukan pengecekan dan berkoordinasi internal staff subbagian penyediaan peralatan dan penatausahaan BMN (rapat staff)	2022	Kabag Melakukan Pengecekan sebelum membuat laporan Barang	2022

Jakarta, Januari 2022
Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum



SYAFEK JAMHARI, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680910 199403 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga
Kegiatan : Keamanan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Tidak terlaksananya pengamanan untuk tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Tidak terpenuhinya rasa nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
2.	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Tidak terpenuhinya pelaksanaan pengamanan pimpinan yang sesuai kebutuhan pimpinan
3.	Tidak terlaksananya pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	Tidak terpenuhinya rasa aman dan nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Keamanan Kantor Pusat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Tidak terlaksananya pengamanan untuk tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Tidak terpenuhinya rasa nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	6.25	2
2.	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Tidak terpenuhinya pelaksanaan pengamanan pimpinan yang sesuai kebutuhan pimpinan	6.88	1
3.	Tidak terlaksananya pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	Tidak terpenuhinya rasa aman dan nyaman di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1.89	3

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga
Kegiatan : Keamanan Kantor di Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Tidak terlaksananya pengamanan untuk tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Memberikan arahan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.	1 Bulan	Surat/Nota Dinas	Melakukan pengarahan dan berkoordinasi dengan intensif dengan petugas keamanan	1 Bulan	Memberikan arahan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.	1 Tahun
2	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Memberikan arahan dan koordinasi kepada petugas keamanan internal	1 bulan	Meminta informasi kepada sespri atau ajudan pimpinan terkait pengamanan pimpinan	Memberikan pengarahan dan informasi mengenai pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan pimpinan kepada satgaspam	1 Bulan	Memberikan arahan dan koordinasi kepada petugas keamanan baik eksternal maupun internal sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam hal pengamanan	1 Tahun
3	Tidak terlaksananya	Sumber daya	Mengevaluasi dan	1 bulan	Menginstruksik	Berkoordinasi	1 Bulan	Mengevaluasi dan	1 Tahun

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	mengawasi pelaksanaan pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor		an kepada petugas keamanan untuk melaporkan kondisi keamanan gedung kepada koordinator keamanan secara berkala.	dengan koordinator petugas keamanan Biro Umum terkait kondisi keamanan sekitar gedung dan juga petugas keamanan internal		mengawasi pelaksanaan pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M.

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Ketersediaan SDM yang kurang memahami tata cara pengadaan barang di Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Tidak terlaksananya pendataan /Inventaris BMN	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Anggota tim SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan BMN	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3.	Tidak tercatatnya jumlah Inventaris BMN yang keluar pada kartu Persediaan	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	SDM yang kurang mentaati peraturan dalam penatausahaan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	Ketersediaan SDM yang kurang memahami tata cara pengadaan barang di Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3.75	2
2.	Tidak terlaksananya pendataan /Inventaris BMN	Anggota tim SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan BMN	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.80	1
3.	Tidak tercatatnya jumlah Inventaris BMN yang keluar pada kartu Persediaan	SDM yang kurang mentaati peraturan dalam penatausahaan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.88	3

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDYOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan BMN

10	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang	Ketersediaan SDM yang kurang memahami tata cara pengadaan barang di Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Menginformasikan dan Meminta unit Kerja Peminta Barang Untuk Melengkapi dengan Nota Dinas Permintaan Barang	Tiap ada Permintaan	Membuat Nota Dinas ke bagian terkait perihal kelengkapan permintaan barang	Melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan internal staff subbagian Rumah Tangga (rapat staff)	Setiap pengajuan	Koordinasi dengan direktorat terkait terkait rencana Prosedur Permintaan Barang	Tiap ada permintaan
2	Tidak terlaksananya pendataan /inventaris BMN	Anggota tim SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan BMN	Memerintahkan Kepada Petugas Untuk Melaksanakan Pendataan Barang	Setiap Bulan	Mengingatkan ke petugas untuk melaksanakan pendataan	Melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan internal staff subbagian Rumah Tangga (rapat staff)	2022	Evaluasi laporan Bagian Lebih Intens Untuk Memantau Kegiatan Petugas Pendataan Barang	Tiap Bulan
3	Tidak tercatatnya jumlah Inventaris BMN yang keluar	SDM yang kurang mentaati peraturan dalam	Memberi arahan Kepada Petugas Untuk Selalu Mencatat	Setiap Bulan	Mengintruksikan kepada petugas agar mengecek	Melakukan pengecekan dan berkoordinasi	2022	Koordinasi dan Melakukan Pengecekan	Tiap Bulan

10	Pernyataan Risiko pada kartu Persediaan	Penyebab penatausahaan BMN	Rencana Keg Pengendalian Jumlah Invetaris Barang	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan sebelum membuat laporan Persediaan Barang	Waktu
					Informasi dan mencocokkan Barang yang datang dengan SPK	Komunikasi dengan internal staff subbagian Rumah Tangga (rapat staff)			

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RESIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Sosialisasi P4GN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1	Pengumpulan data pegawai tidak sesuai.	Pegawai honorer yang tidak terdata dan sulitnya mendapatkan data pegawai dilapangan.	Sosialisasi tidak dapat dilakukan keseluruhan pegawai
2	Banyaknya kegiatan yang berada di waktu yang sama	Kurangnya jumlah personil/peserta/orang untuk melakukan kegiatan tersebut	Kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target
3	Pemotongan Anggaran	Ada pemotongan/penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Kegiatan Terhambat/Gagal
4	Pembuatan SK, SPT dan surat pendukung lainnya yang memakan waktu cukup lama	Banyaknya surat yang perlu untuk ditandatangani, sehingga proses penandatanganan SK, SPT dan surat pendukung lainnya terhambat	Surat tidak dapat terdistribusi dengan cepat/tepat waktu
5	Disposisi surat yang memakan waktu cukup lama	Surat undangan, permohonan narasumber dan surat lainnya untuk pihak ke – 3 yang memerlukan waktu untuk disposisi surat.	Koordinasi dengan pihak ke – 3 sedikit terhambat, serta data narasumber dan peserta sulit di dapat
6	Bahan paparan/materi sulit didapatkan dari pihak narasumber	Jam terbang narasumber yang sibuk, sehingga kesulitan dalam meminta bahan paparan/materi sosialisasi	Waktu pencetakan buku materi menjadi lebih lama (terhambat)
7	Pembuatan design spanduk, banner dan seminar kit yang memakan waktu cukup lama	Tidak adanya pegawai yang memiliki keahlian design grafis	Pembuatan spanduk, banner dan seminar kit terhambat

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDoyo, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Sosialisasi P4GN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Pengumpulan data pegawai tidak sesuai.	Pegawai honorer yang tidak terdata dan sulitnya mendapatkan data pegawai dilapangan.	Sosialisasi tidak dapat dilakukan keseluruh pegawai	12.69	1
2	Banyaknya kegiatan yang berada di waktu yang sama	Kurangnya jumlah personil/peserta/orang untuk melakukan kegiatan tersebut	Kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target	9.38	2
3	Pemotongan Anggaran	Ada pemotongan/penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Kegiatan Terhambat/Gagal	6.23	6
4	Pembuatan SK, SPT dan surat pendukung lainnya yang memakan waktu cukup lama	Banyaknya surat yang perlu untuk ditandatangani, sehingga proses penandatanganan SK, SPT dan surat pendukung lainnya terhambat	Surat tidak dapat terdistribusi dengan cepat/tepat waktu	8.63	4
5	Disposisi surat yang memakan waktu cukup lama	Surat undangan, permohonan narasumber dan surat lainnya untuk pihak ke - 3 yang memerlukan waktu untuk disposisi surat.	Koordinasi dengan pihak ke - 3 sedikit terhambat, serta data narasumber dan peserta sulit di dapat	9.00	3

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
6	Bahan paparan/materi sulit didapatkan dari pihak narasumber	Jam terbang narasumber yang sibuk, sehingga kesulitan dalam meminta bahan paparan/materi sosialisasi	Waktu pencetakan buku materi menjadi lebih lama (terhambat)	7.22	5
7	Pembuatan design spanduk, banner dan seminar kit yang memakan waktu cukup lama	Tidak adanya pegawai yang memiliki keahlian design grafis	Pembuatan spanduk, banner dan seminar kit terhambat	4.25	7

Jakarta, Januari 2022
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
 Direktorat Jenderal Perkeretaapian



WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Sosialisasi P4GN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Pengumpulan data pegawai tidak sesuai.	Ada pegawai honorer yang tidak terdata dan sulitnya mendapatkan data pegawai dilapangan.	Membuat dropbox Tim SAKIP untuk sharing pengetahuan dan komunikasi antar anggota Tim	2022	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tip	Rapat Triwulanan	Pengecekan harga dan stok alat rapid test melalui website toko online dan meminta informasi ke Unit Pelayanan Kesehatan Kemenhub	Mei/Juni 2022
2	Banyaknya kegiatan yang berada di waktu yang sama	Kurangnya jumlah personil/peserta/orang untuk melakukan kegiatan tersebut	Membuat dropbox Tim SAKIP untuk sharing pengetahuan dan komunikasi antar anggota Tim	2022	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tip	Rapat Triwulanan	Daftar pegawai yang akan mengikuti kegiatan rapid test	Mei/Juni 2022

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
3	Pemotongan Anggaran	Ada pemotongan/penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	Usulan RKA	Penyerapan Dokumen DIPA	Kabag Umum mengecek pembuatan dropbox	Pada saat Kegiatan Penyusunan LKIP
4	Pembuatan SK, SPT dan surat pendukung lainnya yang memakan waktu cukup lama	Banyaknya surat yang perlu untuk ditandatangani, sehingga proses penandatanganan SK, SPT dan surat pendukung lainnya terhambat	Melakukan evaluasi biaya dengan skala prioritas	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	Usulan RKA	Penyerapan Dokumen DIPA	Kabag Umum mengecek pembuatan dropbox	Pada saat Kegiatan Penyusunan LKIP
5	Disposisi surat yang memakan waktu cukup lama	Surat undangan, permohonan narasumber dan surat lainnya untuk pihak ke - 3 yang memerlukan waktu untuk disposisi surat.	Pemantauan Surat yang dilakukan lebih agresif	Setiap pengajuan	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Komunikasi dengan pimpinan	Rapat awal Tahun	Memantau kecepatan proses tanda tangan surat/penyelesaian persuratan	1 Tahun
6	Bahan paparan/materi sulit didapatkan dari pihak narasumber	Jam terbang narasumber yang sibuk, sehingga kesulitan dalam meminta bahan paparan/materi sosialisasi	Pimpinan Tim dalam rapat awal mengingatkan perwakilan bidang/bagian untuk menyiapkan data dukung sesuai jadwal kegiatan	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tip	Check List data dukung oleh pimpinan tim	Rapat awal Tim Penyusun LKIP	Rapat awal Tim Penyusun LKIP

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana Intokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
7	Pembuatan design spanduk, banner dan seminar kit yang memakan waktu cukup lama	Tidak adanya pegawai yang memiliki keahlian design grafis	Melakukan pen delegasian kepada Subbag Prolap	Pada saat pelaksanaan kegiatan penyusunan	ND, Memo, Surat, Rapat, Sosialisasi, Diklat, Workshop, PKS, Fax, WA, Email, Tlp	belum ada		Sesudah rapat awal tim penyusun

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M
Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972


RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga
Kegiatan : Keamanan Kantor di Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tujuan : Terwujudnya rasa aman di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Tidak terlaksananya pengamanan untuk tamu di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam melaksanakan pengamanan	Memberikan arahan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.	1 Bulan	Surat/Nota Dinas	Melakukan pengarahan dan berkoordinasi dengan intensif dengan petugas keamanan	1 Bulan	Memberikan arahan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.	1 Tahun
2	Tidak terlaksananya pengamanan yang sesuai kebutuhan pimpinan	Sumber daya manusia (SDM) yang kurang tanggap dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal	Memberikan arahan dan koordinasi kepada petugas keamanan internal	1 bulan	Meminta informasi kepada sespri atau ajudan pimpinan terkait pengamanan pimpinan	Memberikan pengarahan dan informasi mengenai pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan pimpinan kepada satgasppam	1 Bulan	Memberikan arahan dan koordinasi kepada petugas keamanan baik eksternal maupun internal sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam hal pengamanan	1 Tahun
3	Tidak terlaksananya	Sumber daya	Mengevaluasi dan	1 bulan	Menginstruksik	Berkoordinasi	1 Bulan	Mengevaluasi dan	1 Tahun

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
	pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	manusia (SDM) yang kurang tanggap dan responsif dalam menangani kendala	mengawasi pelaksanaan pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor		an kepada petugas keamanan untuk melaporkan kondisi keamanan gedung kepada koordinator keamanan secara berkala.	dengan koordinator petugas keamanan Biro Umum terkait kondisi keamanan sekitar gedung dan juga petugas keamanan internal		mengawasi pelaksanaan pengamanan gedung kantor beserta sarana dan prasarana kantor	

Jakarta, Januari 2022
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
 Direktorat Jenderal Perkeretaapian


 WARDoyo, SE., M.M.
 Penata (III/c)
 NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Penghapusan BMN Kantor di Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penghapusan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Tidak ada Nota Dinas dari unit kerja peminta barang Penghapusan	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Ketersediaan SDM yang kurang memahami tata cara penghapusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi penghapusan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.	Tidak terlaksananya pendataan /Penghapusan BMN	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	Anggota tim SDM kurang memahami tata cara pencatatan dan pendataan Penghapusan BMN	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penghapusan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3.	Tidak tercatatnya jumlah penghapusan BMN yang keluar	Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga	SDM yang kurang mentaati peraturan dalam penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penghapusan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDoyo, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Penghapusan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penghapusan BMN

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Tidak ada Nota Dinas dari unit peminta barang penghapusan	Ketersediaan data SDM yang kurang memahami tata cara penghapusan barang	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi penghapusan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3.75	2
2.	Tidak terlaksananya pendataan /penghapusan BMN	Anggota tim SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan penghapusan BMN	Penyusunan Laporan Tidak terciptanya ketertiban administrasi dalam penghapusan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.80	1
3.	Tidak tercatatnya jumlah penghapusan BMN yang keluar	SDM yang kurang mentaati peraturan dalam penghapusan BMN	Tidak terciptanya ketertiban dalam penghapusan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.88	3

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDYOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Penghapusan BMN Kantor di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi penghapusan BMN

10	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1	Tidak ada Nota Dinas dari unit peminta barang penghapusan	SDM yang kurang memahami tata cara penghapusan barang	Menginformasikan dan Meminta unit Kerja Peminta penghapusan Barang Untuk Melengkapi dengan Nota Dinas Permintaan penghapusan Barang	Awal Tahun Anggaran	Penyampaian agar mengikuti persyaratan proses penghapusan barang	Surat/Nota Dinas, dokumen anggaran	Setiap pengajuan	Koordinasi dengan direktorat terkait terkait rencana Prosedur Permintaan penghapusan Barang	1 Tahun
2	Tidak terlaksananya pendataan / penghapusan BMN	Anggota tim SDM kurang memahami tatacara pencatatan dan pendataan penghapusan BMN	Memerintahkan Kepada Petugas Untuk Melaksanakan Pendataan penghapusan Barang	Setiap pengajuan	Penyampaian Undangan Penghapusan dari Balai dan Satker kepada Sesditjen Perkeretaapian	Surat/Perjanjian Kerjasama	Semesteran	Evaluasi laporan Bagian Lebih Intens Untuk Memantau Kegiatan Petugas Pendataan Penghapusan Barang	1 Tahun
3	Tidak tercatatnya jumlah penghapusan BMN yang keluar	SDM yang kurang mentaati peraturan dalam penghapusan BMN	Memberi arahan Kepada Petugas Untuk Selalu Mencatat Jumlah Penghapusan	Semesteran	Permintaan data Penyampaian kebutuhan alokasi yang dibutuhkan	Surat/Nota Dinas, portal aplikasi DJKA	Semesteran	Koordinasi dan Melakukan Pengecekan sebelum membuat laporan	1 Tahun

10	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
					dalam pelaksanaan kegiatan			Penghapusan Barang	

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3850758
3813972

DAFTAR RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Rapid Test Covid-19 (Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19) dan Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : 1. Mengidentifikasi pegawai yang terinfeksi virus Corona
2. Membantu pencegahan penyebaran virus Corona

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Adanya kenaikan harga dan langkanya alat untuk rapid test Covid-19	Subbag Rumah Tangga	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana
2.	Pegawai yang hadir untuk rapid tes tidak sesuai target	Subbag Rumah Tangga	Rasa khawatir dan takut para pegawai terhadap hasil tes apabila positif dan lokasi kantor ada di berbagai wilayah	Tidak maksimalnya hasil pemeriksaan rapid tes Covid-19
3.	Adanya kenaikan harga dan langkanya cairan disinfektan	Subbag Rumah Tangga	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDoyo, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Rapid Test Covid-19 (Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19) dan Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : 1. Mengidentifikasi pegawai yang terinfeksi virus Corona
2. Membantu pencegahan penyebaran virus Corona

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1.	Adanya kenaikan harga dan langkanya alat untuk rapid test Covid-19	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	9.50	1
2.	Pegawai yang hadir untuk rapid tes tidak sesuai target	Rasa khawatir dan takut para pegawai terhadap hasil tes apabila positif dan lokasi kantor ada di berbagai wilayah	Tidak maksimalnya hasil pemeriksaan rapid tes Covid-19	8.50	3
3.	Adanya kenaikan harga dan langkanya cairan disinfektan	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Perubahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan waktu pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana	9.00	2

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDoyo, SE., M.M
Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV : Kelompok Bagian Rumah Tangga

Kegiatan : Rapid Test Covid-19 (Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19) dan Penyemprotan Disinfektan di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan : 1. Mengidentifikasi pegawai yang terinfeksi virus Corona
2. Membantu pencegahan penyebaran virus Corona

No.	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Keg Pengendalian	Waktu	Rencana		Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
					Informasi	Komunikasi			
1.	Adanya kenaikan harga dan langkanya alat untuk rapid test Covid-19	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Mengecek harga dan stok barang melalui website dan berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenhub dinas kesehatan setempat	setiap bulan	Koordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat	Surat/ Nota Dinas, Telp, Melakukan rapat staf (rapat internal)	1 Bulan	Pengecekan harga dan stok alat rapid test melalui website toko online dan meminta informasi ke Unit Pelayanan Kesehatan Kemenhub	Triwulan
2.	Pegawai yang hadir untuk rapid tes tidak sesuai target	Rasa khawatir dan takut para pegawai terhadap hasil tes apabila positif dan lokasi kantor	Menginformasikan satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan dan Melakukan koordinasi dan dengan masing-masing	setiap bulan	Melakukan komunikasi melalui telp/aplikasi Whats App ke setiap masing-masing kasubbag TU	Surat/ Nota Dinas, melalui grup internal pada aplikasi Whats App, Melakukan	1 Bulan	Daftar pegawai yang akan mengikuti kegiatan rapid test	Triwulan

		ada di berbagai wilayah	kasubbag TU dilingkungan DJKA			koordinasi dengan pihak terkait (rapat internal)			
3.	Adanya kenaikan harga dan langkanya cairan disinfektan	Stok barang terbatas, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak	Mengecek harga dan stok barang melalui website dan berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenhub dinas kesehatan setempat	setiap bulan	Koordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat	Surat/ Nota Dinas, Telpon, Melakukan rapat staf (rapat internal)	1 Bulan	Pengecekan harga dan stok alat rapid test melalui website toko online dan meminta informasi ke Unit Pelayanan Kesehatan Kemenhub	Triwulan

Jakarta, Januari 2022

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda di Sekretariat
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

WARDOYO, SE., M.M

Penata (III/c)

NIP. 19820818 2010 121 005

LAMPIRAN 4
SK TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
SPIP



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR : HK.209/1/2/K1/DJKA/2022**

TENTANG

**TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA TINGKAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi pada Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5707);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA TINGKAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan maupun ketentuan yang berlaku terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari:
- a. Ruang lingkup penilaian meliputi:
 - 1) Mekanisme penilaian;
 - 2) Fokus Penilaian;
 - 3) Kegiatan Pengendalian;
 - 4) Informasi dan Komunikasi;
 - 5) Pemantauan Pengendalian Intern.
 - b. Komponen penilaian meliputi:
 - 1) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
 - 2) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
 - 3) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur:
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI);
 - 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
- KEEMPAT : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan oleh Tim Penilaian Mandiri pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, S.E., M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621005 198903 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Nomor : HK.209/112/K1/DJKA/2022
Tanggal : 7 Februari 2022

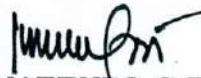
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA TINGKAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

1. Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Pelaksana
Ketua : Kepala Bagian Perencanaan
Sekretaris : Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
Anggota :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Kepala Bagian Hukum;
 3. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum;
 4. Sub Koordinator Kelompok Rencana;
 5. Sub Koordinator Kelompok Program;
 6. Sub Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran;
 7. Sub Koordinator Kelompok Perbendaharaan;
 8. Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran;
 9. Sub Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-undangan;
 10. Sub Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum;
 11. Sub Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
 12. Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi.
 13. Koordinator Sub Kelompok Tata Usaha;
 14. Koordinator Sub Kelompok Rumah Tangga.

- Sekretariat :
 1. Yurnaliza;
 2. Arinta Luwiyana
 3. Novie Hasta Wahyudi;
 4. Sigit Sukmoro;
 5. Andhika Mardjuni;
 6. Viki Okissa;
 7. Indah Dwi Ariani;

8. Ayu Permata Sani;
9. Merinda Pangestikasari;
10. Trinanda Meinar Ariani;
11. Gunawan;
12. Mustika Riyanti;
13. Diah Cempaka.

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, S.E., M.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19621005 198903 1 001

LAMPIRAN 5
HASIL PENILAIAN MANDIRI YANG TELAH
DILAKUKAN
PENJAMINAN KUALITAS OLEH APIP

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Periode Penilaian 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	1,938	3,75%		0,07		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,357	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,833	3,75%		0,07		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,917	10%		0,29		
Analisis Risiko (2.2)	2,583	10%		0,26		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,07		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,07		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,650	5%		0,08		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,167	7,50%		0,16		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,375	7,50%		0,18		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,511		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,753	

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	3	15%		0,45		
Capaian <i>Output</i>	3	15%		0,45		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		2,75		
BOBOT HASIL			30,00%		0,825	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,578

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)**3,19**

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		2,00			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,00	2,00			
KAPABILITAS	30,00%		0,48			
KEPEMIMPINAN	5,00%	0,94	0,05			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,00	0,15			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	0,75	0,04			
KEMITRAAN	2,50%	0,00	0,00			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,95	0,24			
HASIL	30,00%		0,71			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,00	0,38			
OUTCOMES	11,25%	3	0,34			
TOTAL	100,00%		3,19			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)**2,07**

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,87			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,94	0,19			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,94	0,14			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,00	0,07			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	2,00	0,29			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,94	0,19			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,89			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,00	0,27			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,00	0,07			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,00	0,27			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,94	0,14			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,94	0,14			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,31			
INVESTIGASI	8,00%	1,94	0,16			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,94	0,16			
TOTAL	100%		2,07			

KAPABILITAS APIP**2**